

LAPORAN TAHUNAN

BIRO
PERENCANAAN
DAN KEUANGAN

2021



LAPORAN
TAHUNAN

BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

2021



LAPORAN TAHUNAN
BIRO
PERENCANAAN
DAN KEUANGAN

2021



LAPORAN
TAHUNAN
2021

20

21

BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

KATA PENGANTAR |



ALHAMDULILLAH, PUJI DAN SYUKUR KITA PANJATKAN KE HADIRAT TUHAN YANG MAHA ESA, KARENA ATAS RAHMAT DAN KARUNIA-NYA, KITA DAPAT MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSI DI BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN BADAN POM SEPANJANG TAHUN 2021.

LAPORAN TAHUNAN DISUSUN DENGAN TUJUAN SEBAGAI MEDIA BAGI PIHAK-PIHAK YANG MEMBUTUHKAN INFORMASI PELAKSANAAN KEGIATAN YANG KOMPREHENSIF DI BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEPANJANG TAHUN 2021. LAPORAN TAHUNAN MERUPAKAN SALAH SATU BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN ATAS TUGAS DAN FUNGSI YANG TELAH DILAKSANAKAN OLEH BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN.

LAPORAN TAHUNAN INI BERISIKAN NARASI DAN URAIAN, GAMBAR, GRAFIK DAN TABEL HASIL KEGIATAN BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEPANJANG TAHUN 2021. LAPORAN INI JUGA DIMAKSUDKAN SEBAGAI DASAR DAN GAMBARAN PELAKSANAAN TUGAS DAN PELAKSANAAN ANGGARAN DI TAHUN BERIKUTNYA UNTUK MENCAPAI TINGKAT KEBERHASILAN YANG LEBIH BAIK DI MASA YANG AKAN DATANG. KEBERHASILAN BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN DALAM MENGEMBAN TUGAS DAN AMANATNYA SANGAT DIDUKUNG OLEH PERAN AKTIF PIMPINAN DAN SELURUH STAF DI LINGKUNGAN BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN SERTA KERJASAMA YANG BAIK DENGAN SELURUH UNIT KERJA DI BADAN POM.

KAMI MENYADARI BAHWA LAPORAN TAHUNAN INI MASIH JAUH DARI SEMPURNA, MAKA KAMI MENGHARAPKAN MASUKAN, SARAN DAN KRITIKAN DARI SEMUA PIHAK UNTUK PERBAIKAN DI MASA YANG AKAN DATANG. KAMI BERHARAP SEMOGA LAPORAN TAHUNAN 2021 INI DAPAT MEMBERIKAN MANFAAT BAGI KITA BERSAMA DAN PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT.

JAKARTA, 30 JUNI 2022

KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

YUDIANTO, ST., MT., MPP

LAPORAN
TAHUNAN

20

21

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	vii
Daftar Tabel.....	xi
BAB 1: PENDAHULUAN.....	1
1.1. VISI, MISI DAN BUDAYA ORGANISASI	1
1.2 STRUKTUR ORGANISASI DAN TUGAS, POKOK & FUNGSI.....	3
BAB 2: PENGELOLAAN SUMBER DAYA.....	9
2.1 SUMBER DAYA MANUSIA	9
2.1.1 Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	9
2.1.2 Data Pegawai Berdasarkan Jabatan	9
2.1.3 Data Pegawai Berdasarkan Usia	10
2.1.4 Kebutuhan Pegawai	11
2.1.5 Peningkatan Kompetensi SDM.....	12
2.2 SURAT MENYURAT	17
BAB 3: CAPAIAN KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN	18
3.1 Indikator Kinerja Utama.....	18
3.2 Realisasi Anggaran.....	23
BAB 4: KEGIATAN BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEPANJANG TAHUN 2021	24
Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM di Lingkup Biro Perencanaan dan Keuangan	24
IKU 1: Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas	24
a. Rapat Kerja Nasional Tahun 2021 di Bali	24
b. Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020.....	26
c. Bimtek SAKIP dan Monev Online Loka POM Satker Mandiri Tahun 2021.....	29
d. Bimbingan Teknis (Bimtek) SAKIP dan Monev Online Tahun 2021	33
IKU 2: Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM	37

a. Layanan Pendampingan Terhadap Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Unit Organisasi/Satker	37
b. Pengembangan e-performance.....	39
c. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program, kegiatan, dan Reformasi Birokrasi 42	
d. Pengembangan aplikasi e-planning SIMETRIS.....	44
IKU 3: Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) BPOM	48
a. Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Balai Besar/ Balai POM	48
b. Rapat Evaluasi Nasional Tahun 2021 di Bandung.....	50
c. Pengembangan Manajemen Kinerja BPOM dengan Pelaporan Capaian Kinerja dan Anggaran Melalui BOC.....	52
d. Bimtek Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis Unit Organisasi/Satker	54
e. Bimtek Penyusunan PK dan RAPK Unit Organisasi/Satker melalui aplikasi <i>e-planning</i> SIMETRIS.....	55
f. <i>Workshop</i> Jabatan Fungsional Perencana di Lingkungan BPOM	56
e. Penyusunan Pedoman Jabatan Fungsional Perencana di Lingkungan BPOM	58
IKU 4: Nilai Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) BPOM	59
a. Koordinasi, Evaluasi dan Verifikasi Tagihan Belanja Badan POM	59
b. Pembinaan Pelaksanaan Anggaran	59
c. FGD IKPA dan Indikator Capaian Output	61
IKU 5: Persentase kesesuaian Laporan Keuangan BPOM yang disusun dengan SAP ..	63
a. Workshop SAKTI Modul Pelaksanaan	63
b. Pelaksanaan Bimtek Sistem Akuntansi Instansi dan Penyusunan Laporan Keuangan (Pusat dan Balai)	64
c. Penyusunan Laporan Keuangan BPOM	65
d. Pengelolaan PNBPN Fungsional dan Penyusunan Laporan PNBPN Badan POM	66
e. FGD Laporan Keuangan BPOM.....	68
Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan Biro Perencanaan dan Keuangan.....	69
IKU 6: Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro Perencanaan dan Keuangan.....	69
a. Survei kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan.....	69

Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya Kualitas Dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan SATKER sesuai pedoman	71
IKU 7: Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan satker terhadap pedoman.....	71
a. Asistensi Penyusunan Perencanaan Kinerja BPOM	72
b. Pemanjapan Mekanisme Penganggaran di BB/BPOM	72
c. Supervisi Penganggaran Bersama Instansi Terkait	73
d. Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran.....	73
e. Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKA-K/L Alokasi Anggaran	75
f. Penyiapan Bahan dan Pengawasan RDP dengan Mitra Kerja Badan POM	77
h. Penyusunan Standar Biaya Keluaran (SBK)	78
i. Workshop Penganggaran Kegiatan Terpadu Pusat dan UPT BPOM.....	78
j. Perencanaan Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) BPOM	79
Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan BPOM	80
IKU 8: Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan BPOM yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar	80
a. Penyusunan Laporan Tahunan Badan POM Tahun 2020	81
b. Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Tahun 2021	83
c. Penyusunan Laporan Kinerja BPOM tahun 2020	84
d. Penyusunan Reviu Rencana Strategis BPOM 2020-2024.....	86
e. Penyusunan <i>Grand Design</i> Pengawasan Obat dan Makanan 2045.....	88
f. Pengembangan Indikator Pembangunan Pengawasan Obat dan Makanan.....	90
g. Penyusunan Rencana Kerja BPOM Tahun Anggaran 2022	91
h. Penyusunan Revisi Perjanjian Kinerja BPOM Tahun 2021 dan Penyusunan Perjanjian Kinerja BPOM Tahun 2022	95
i. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BPOM Tahun 2022	97
IKU 9: Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan SETTAMA yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar	99
a. Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2020	99

b. Penyusunan Reviu Rencana Strategis Sekretariat Utama Tahun 2020-2024	100
c. Penyusunan Revisi Perjanjian Kinerja BPOM Tahun 2021 dan Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2022.	102
Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya kualitas layanan dukungan strategis Pimpinan.	105
IKU 10: Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis Pimpinan	105
a. Koordinasi Penyiapan Bahan Substansi Kepala BPOM.....	105
d. Pendampingan Kegiatan Strategis Kepala BPOM.....	108
e. Pemantauan Tindak Lanjut Arahan Kepala BPOM dan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Program Strategis Pimpinan (PSP).....	108
Sasaran Kegiatan 6: Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Biro Perencanaan dan Keuangan yang optimal.....	111
IKU 11: Indeks RB Biro Perencanaan dan Keuangan	111
a. Nilai Reformasi Birokrasi Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2021	111
Sasaran Kegiatan 7: Terwujudnya SDM Biro Perencanaan dan Keuangan yang Berkinerja Optimal	112
IKU 12: Indeks Profesionalitas ASN Biro Perencanaan dan Keuangan	112
a. Pemeliharaan bagian Perencanaan	112
b. Koordinasi Biro Perencanaan dan Keuangan Lintas Sektor.....	112
Bab 5: PENUTUP	113

Daftar Gambar

Gambar 1. 1 Bagan Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan.....	4
Gambar 2. 1 Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	9
Gambar 2. 2 Grafik PNS berdasarkan Jabatan Tahun 2021	10
Gambar 2. 3 Grafik Persentase Pegawai Berdasarkan Usia Tahun 2021	10
Gambar 2. 4 Jumlah Pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan dari Tahun 2010-2021 .	11
Gambar 2. 5 Perbandingan Surat Keluar di Biro Perencanaan dan Keuangan	17
Gambar 3. 1 Grafik % Realisasi Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2017-2021	23
Gambar 4. 1 Rapat Kerja Nasional Tahun 2021 di Bali.....	24
Gambar 4. 2 Ibu Kepala Badan POM membuka Rapat Kerja Nasional Tahun 2021 di Bali	25
Gambar 4. 3 Rakernas Dilaksanakan Secara Hibrid.....	25
Gambar 4. 4 Pemukulan Gong oleh Gubernur Bali dalam Rakernas 2021	25
Gambar 4. 5 Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020-2021	
Gambar 4. 6 Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan membuka acara Bimtek SAKIP dan Monev Online Loka POM Satker Mandiri	29
Gambar 4. 7 Bimtek SAKIP dan Monev Online Loka POM Satker Mandiri	32
Gambar 4. 8 Bimtek SAKIP dan Monev Online Juni 2021	33
Gambar 4. 9 Penilaian Layanan Penyusunan Reviu Renstra seluruh Unit Kerja BPOM...	38
Gambar 4. 10 Penilaian Layanan Penyusunan Peta Strategi seluruh Unit Kerja BPOM. .	38
Gambar 4. 11 Penilaian Layanan Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahunan seluruh Unit Kerja BPOM.....	38
Gambar 4. 12 Aplikasi Simetris	39
Gambar 4. 13 Halaman Muka Aplikasi E-performance	40
Gambar 4. 14 Menu Laporan Realisasi IKU Aplikasi E-performance.....	40
Gambar 4. 15 Menu Realisasi Anggaran Aplikasi E-performance.....	41
Gambar 4. 16 Menu Dashboard Aplikasi E-performance	41
Gambar 4. 17 Menu Data SAS Aplikasi E-performance	42
Gambar 4. 18 Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Triwulan Tahun 2021	43

Gambar 4. 19 Laporan Kinerja Dalam Angka Triwulanan	43
Gambar 4. 20 Tampilan dashboard Aplikasi e-Planning Simetris.....	44
Gambar 4. 21 Tampilan Menu Renja Sumber: Biro Perencanaan dan Keuangan, 2021 ..	45
Gambar 4. 22 Tampilan Menu Renstra	46
Gambar 4. 23 Tampilan Manual IKU	46
Gambar 4. 24 Hasil Cetak PK dan RAPK.....	47
Gambar 4. 25 Dokumentasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan: (A) BBPOM di Surabaya, (B) BBPOM di Samarinda, (C) Loka POM di Bogor, dan (D) Loka POM di Tanimbar	49
Gambar 4. 26 Kegiatan Rapat Evaluasi Nasional Tahun 2021	50
Gambar 4. 27 Kepala Badan POM, Ibu Penny K. Lukito, memberikan arahan pada Rapat Evaluasi Nasional Badan POM Tahun 2021.....	51
Gambar 4. 28 Aplikasi BOC	53
Gambar 4. 29 Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan menyampaikan paparan pembuka pada Bimtek Penyusunan/Reviu Renstra Unit Organisasi/Satker	54
Gambar 4. 30 Bimtek Penyusunan PK dan RAPK melalui Aplikasi e-Planning Simetris ...	56
Gambar 4. 31 Workshop Jabatan Fungsional Perencana (JFP) BPOM.....	57
Gambar 4. 32 Workshop Jabatan Fungsional Perencana (JFP) BPOM.....	57
Gambar 4. 33 Penyusunan Pedoman Manajemen Kinerja Jabatan Fungsional Perencana di Lingkungan BPOM	58
Gambar 4. 34 Hasil Survey Internal Kepuasan Pelayanan Tahun 2021	70
Gambar 4. 35 Laporan Hasil Survey Kepuasan Layanan Tahun 2021.....	71
Gambar 4. 36 pelaksanaan diskusi penyusunan peta strategi level 0, I dan II di Lingkungan BPOM	72
Gambar 4. 37 Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran Tahun 2022.....	75
Gambar 4. 38 Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKA-K/L Alokasi Anggaran Tahun 2022.....	76
Gambar 4. 39 Kegiatan Penelaahan RKA BOK POM TA 2022	80
Gambar 4. 40 Buku Laporan Tahunan BPOM Tahun 2020.....	81

Gambar 4. 41 Buku Petunjuk Pelaksanaan Anggaran dan Petunjuk Teknis Kegiatan Tahun 2021	83
Gambar 4. 42 Pertemuan Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Anggaran dan Petunjuk Teknis Kegiatan Tahun 2021	84
Gambar 4. 43 Buku Laporan Kinerja BPOM Tahun 2020	85
Gambar 4. 44 Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan menyampaikan paparan Revisi/Reviu Renstra BPOM Tahun 2020-2024 pada Rakorpim bersama Eselon I.....	86
Gambar 4. 45 FGD penyusunan Revisi/Reviu Renstra BPOM Tahun 2020-2024 pada tanggal 27 April 2021	87
Gambar 4. 46 Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis BPOM Tahun 2020-2024	88
Gambar 4. 47 Kerangka Logis Grand Design POM 2045.....	89
Gambar 4. 48 Buku Ringkasan Eksekutif Grand Design POM 2045	89
Gambar 4. 49 Focus Group Discussion Pembahasan Indeks Pengawasan Pangan	90
Gambar 4. 50 Focus Group Discussion Pembahasan Indeks Pengawasan Pangan	91
Gambar 4. 51 Trilateral Meeting Tahap I Penyusunan Penyusunan	92
Gambar 4. 52 Trilateral Meeting Tahap II Penyusunan Penyusunan	94
Gambar 4. 53 Dokumen Revisi Perjanjian Kinerja BPOM tahun 2021.	96
Gambar 4. 54 Dokumen Perjanjian Kinerja BPOM tahun 2022.	97
Gambar 4. 55 Penetapan SK Kepala Badan POM tentang RKT BPOM Tahun 2022.....	98
Gambar 4. 56 Buku Laporan Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2021	99
Gambar 4. 57 Keputusan Sekretaris Utama Nomor HK.02.02.2.21.12.21.305 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Sekretariat Utama BPOM Tahun 2020-2024.....	101
Gambar 4. 58 Dokumen Revisi Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama tahun 2021.	102
Gambar 4. 59 Dokumen Perjanjian Kinerja BPOM tahun 2022.	103
Gambar 4. 60 Penetapan SK Sekretaris Utama BPOM tentang RKT Sekretariat Utama Tahun 2022.....	104
Gambar 4. 61 Rapat Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan 24 September 2021.....	105
Gambar 4. 62 Rapat Koordinasi Mekanisme Penyiapan Bahan Pimpinan tanggal 2 November 2021	107

Gambar 4. 63 Sebaran Keterkaitan Topik Bahan Kegiatan Kepala BPOM tahun 2021 dan Satker	107
Gambar 4. 64 Konsolidasi Tim Monev PSP 27 Oktober 2021	109
Gambar 4. 65 Profil Sebaran Disposisi 'Pantau' per Satker dan Status Tindak Lanjut Tahun 2021	110
Gambar 4. 66 Laporan Monev PSP Tahun 2021	110
Gambar 4. 67 Data Nilai RB BPOM per Area Perubahan Tahun 2021	111



Daftar Tabel

Tabel 2. 1 Analisis Beban Kerja di Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2021	11
Tabel 2. 2 Diklat Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2021	13
Tabel 3. 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2021	18
Tabel 3. 2 Capaian IKU Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2021.....	20

BAB 1: PENDAHULUAN

1.1. VISI, MISI DAN BUDAYA ORGANISASI

Biro Perencanaan dan Keuangan berperan strategis untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi BPOM. Visi dan Misi Biro Perencanaan dan Keuangan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015 - 2019 sama dengan Visi dan Misi BPOM yaitu:

Visi

“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Misi

- **Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia**
- **Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa**
- **Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga**
- **Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya**

Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai unit penunjang menggunakan misi Badan POM untuk melakukan perencanaan tahunan maupun 5 (lima) tahunan dan memastikan semua kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Badan POM tertuang dalam dokumen perencanaan serta ketersediaan alokasi anggaran untuk pelaksanaannya. Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai koordinator dan fasilitator harus memastikan bahwa semua sumber daya dipergunakan untuk program dan kegiatan yang berkontribusi signifikan terhadap pencapaian kinerja organisasi. Kinerja organisasi dipantau dan diukur baik indikator *output* maupun indikator *outcome* secara periodik. Mengingat sumber daya terbatas, Biro Perencanaan dan Keuangan harus bijaksana menetapkan prioritas, berdasarkan kebutuhan organisasi dan arahan pimpinan. Untuk membangun organisasi yang efektif dan efisien, diperlukan Budaya Organisasi.

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarya dan berkarya. Budaya organisasi dikembangkan dengan nilai-nilai dasar sebagai berikut:

Budaya Organisasi BPOM		
P	Profesional	Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.
I	Integritas	konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan
K	Kredibilitas	Dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.
K	Kerjasama Tim	Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.
I	Inovatif	Mampu melakukan pembaruan sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi terkini.
R	Responsif/ Cepat Tanggap	Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI DAN TUGAS, POKOK & FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menggantikan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor: 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Tugas Biro Perencanaan dan Keuangan berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM No. 21 Tahun 2020 pasal 12, Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perencanaan, penyusunan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja, dan pengelolaan keuangan, serta koordinasi bahan substansi strategis pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Kepala BPOM Nomor 21 Tahun 2020, Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi penyusunan, penyerasian, dan pengintegrasian rencana strategis dan rencana tahunan di lingkungan BPOM;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara;
- c. penyiapan koordinasi dan pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri;
- d. penyiapan koordinasi dan pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pengelolaan kinerja organisasi di lingkungan BPOM;
- e. penyiapan koordinasi bahan substansi strategis pimpinan;
- f. penyiapan koordinasi dan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Kemudian dalam melaksanakan fungsinya, Biro Perencanaan dan Keuangan dibagi menjadi:

1. Kelompok Substansi Perencanaan;
2. Kelompok Substansi Penganggaran;
3. Kelompok Substansi Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja;
4. Kelompok Substansi Keuangan;
5. Kelompok Substansi Dukungan Strategis Pimpinan
6. Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut adalah bagan struktur organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan:



Gambar 1. 1 Bagan Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan

Kelompok Substansi Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, dan penyusunan rencana strategis dan rencana tahunan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Substansi Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan analisis dan penyerasian rencana strategis jangka menengah dan jangka Panjang

- Penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan analisis dan penyerasian rencana tahunan atau jangka pendek.

Kelompok Koordinasi Substansi Perencanaan terdiri atas:

- Sub Koordinasi Perencanaan I, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan analisis dan penyerasian rencana strategis jangka menengah dan jangka panjang, serta rencana tahunan atau jangka pendek di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, Sekretariat Utama, Pusat, Inspektorat Utama, dan Unit Pelaksana Teknis BPOM di wilayah Provinsi Aceh, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Selatan.
- Sub Koordinasi Perencanaan II, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan analisis dan penyerasian rencana strategis jangka menengah dan jangka panjang, serta rencana tahunan atau jangka pendek di lingkup Instansi BPOM, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Deputi Bidang Penindakan, dan Unit Pelaksana Teknis BPOM di wilayah Provinsi Bali, Bangka Belitung, Banten, Bengkulu, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Papua, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

Kelompok Substansi Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Substansi Penganggaran menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara
- Penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan dan analisis pinjaman dan hibah luar negeri.

Kelompok Koordinasi Substansi Penganggaran terdiri atas:

- Sub Koordinasi Penganggaran BPOM Pusat, mempunyai tugas melakukan persiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja pada satuan kerja BPOM Pusat serta pengelolaan dan analisis pinjaman dan hibah luar negeri
- Sub Koordinasi Penganggaran Unit Pelaksana Teknis BPOM, mempunyai tugas melakukan persiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja pada satuan kerja Unit Pelaksana Teknis BPOM.

Kelompok Substansi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja mempunyai tugas melaksanakan persiapan koordinasi, dan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Substansi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja menyelenggarakan fungsi:

- Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja organisasi di lingkungan BPOM

Kelompok Koordinasi Substansi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja terdiri atas:

- Sub Koordinasi Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja I, yang mempunyai tugas melakukan persiapan bahan koordinasi, dan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja organisasi di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, Sekretariat Utama, Pusat, Inspektorat Utama, dan Unit Pelaksana Teknis BPOM di wilayah Provinsi Aceh, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Selatan.
- Sub Koordinasi Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja II, yang mempunyai tugas melakukan persiapan bahan koordinasi, dan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja organisasi di lingkup Instansi BPOM, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Deputi Bidang Penindakan, dan Unit Pelaksana Teknis BPOM di wilayah Provinsi Bali, Bangka Belitung, Banten, Bengkulu, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Barat,

Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Papua, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

Kelompok Substansi Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan BPOM. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Substansi Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan
- Penyiapan bahan koordinasi, dan pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan keuangan di lingkungan BPOM
- Penyiapan bahan koordinasi, dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan sistem akuntansi BPOM
- Penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Kelompok Koordinasi Substansi Keuangan terdiri atas:

- Sub Koordinasi Perbendaharaan dan Penerimaan Bukan Pajak, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengelolaan perbendaharaan dalam pelaksanaan anggaran, dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diterima oleh BPOM
- Sub Koordinasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan sistem akuntansi, pelaksanaan analisis laporan keuangan satuan kerja, dan penyusunan laporan keuangan BPOM

Kelompok Substansi Dukungan Strategis Pimpinan mempunyai tugas penyiapan koordinasi bahan, pemantau dan evaluasi program dan kegiatan strategis pimpinan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Substansi Dukungan Strategis Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan koordinasi bahan substansi strategis pimpinan
- Penyiapan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi program strategis pimpinan
- Pendampingan kegiatan strategis pimpinan

Kelompok Koordinasi Substansi Dukungan Strategis Pimpinan terdiri atas:



- Sub Koordinasi Dukungan Substansi Pimpinan, mempunyai tugas menyiapkan dan/atau mengolah rancangan rancangan bahan serta menyusun dokumen substansi teknis Kepala BPOM
- Sub Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Program Strategis Pimpinan, mempunyai tugas melakukan pemantauan, analisis, dan evaluasi tindak lanjut arahan Kepala BPOM serta perkembangan program strategis pimpinan

Sub Bagian Tata Usaha Biro Perencanaan dan Keuangan berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 21 Tahun 2020 Pasal 15 mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan, dan administrasi penjaminan mutu biro.



BAB 2:

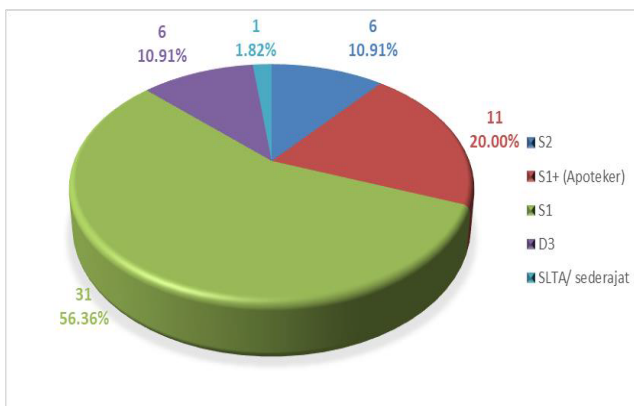
PENGELOLAAN SUMBER DAYA

2.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Biro Perencanaan dan Keuangan didukung oleh 5 (empat) Kelompok Substansi dengan jumlah pegawai pada tahun 2021 terdiri dari 55 (lima puluh lima) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 31 (tiga puluh satu) orang pegawai tidak tetap (pramubakti). Pada tahun 2021, pegawai di Biro Perencanaan dan Keuangan mengalami perubahan jumlah pegawai karena adanya reorganisasi. Terdapat 2 (dua) orang pegawai yang pindah ke Biro Umum dan Biro Hukum dan Organisasi. Selain itu, Biro Perencanaan dan Keuangan mendapatkan CPNS sebanyak 6 (enam) orang pegawai, 1 (satu) orang PNS pindahan Komnas HAM dan 2 (dua) orang pegawai pensiun di bulan Agustus dan November 2021.

2.1.1 Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan dapat dilihat pada grafik berikut ini :



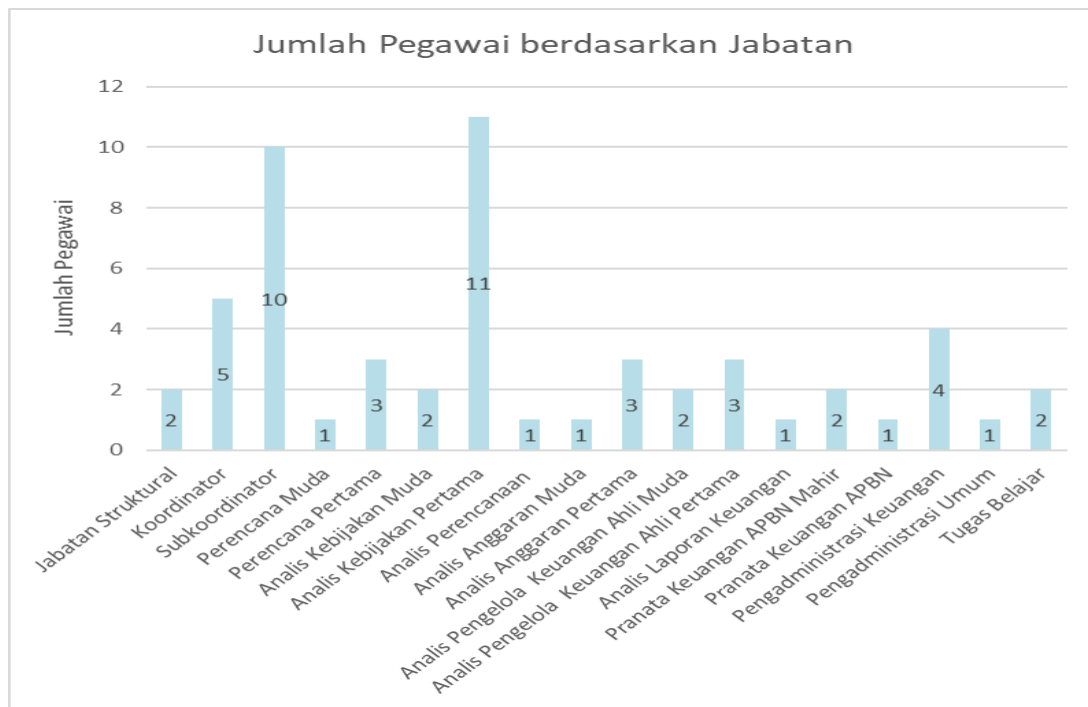
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021. Populasi terbesar pada tahun 2021 masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu pegawai dengan tingkat pendidikan Sarjana (S1) sejumlah 31 pegawai dengan persentase 56.36 % dari total pegawai.

Gambar 2. 1 Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

2.1.2 Data Pegawai Berdasarkan Jabatan

Berikut adalah grafik data pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan berdasarkan jabatan struktural, koordinator, sub koordinator, jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum. Dari 55 orang PNS, 2 diantaranya menduduki jabatan struktural, 5 orang koordinator dan 10 orang sub koordinator. Di tahun 2021 terdapat

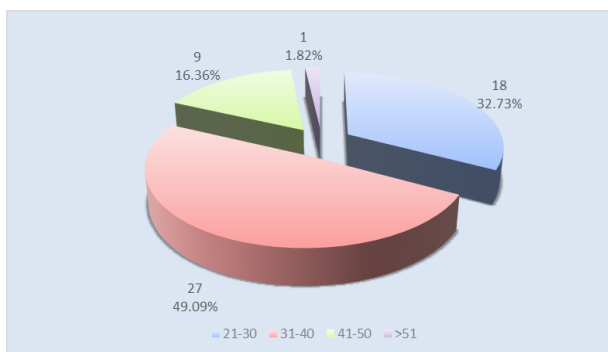
perubahan jumlah pegawai yang diakibatkan oleh reorganisasi Badan POM sehingga Biro Perencanaan dan Keuangan mendapatkan tambahan 1 (satu) Kelompok Substansi Dukungan Strategis Pimpinan. Selain itu terdapat perpindahan pegawai dari Biro Perencanaan dan Keuangan ke Unit Kerja yang lain dan mendapatkan pegawai CPNS. Selain perubahan formasi jabatan, ada 2 (dua) pejabat struktural yang mengikuti Tugas Belajar.



Gambar 2. 2 Grafik PNS berdasarkan Jabatan Tahun 2021

2.1.3 Data Pegawai Berdasarkan Usia

Pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan termuda berusia 21 tahun dan tertua 52 tahun dengan sebaran seperti pada grafik di bawah ini :

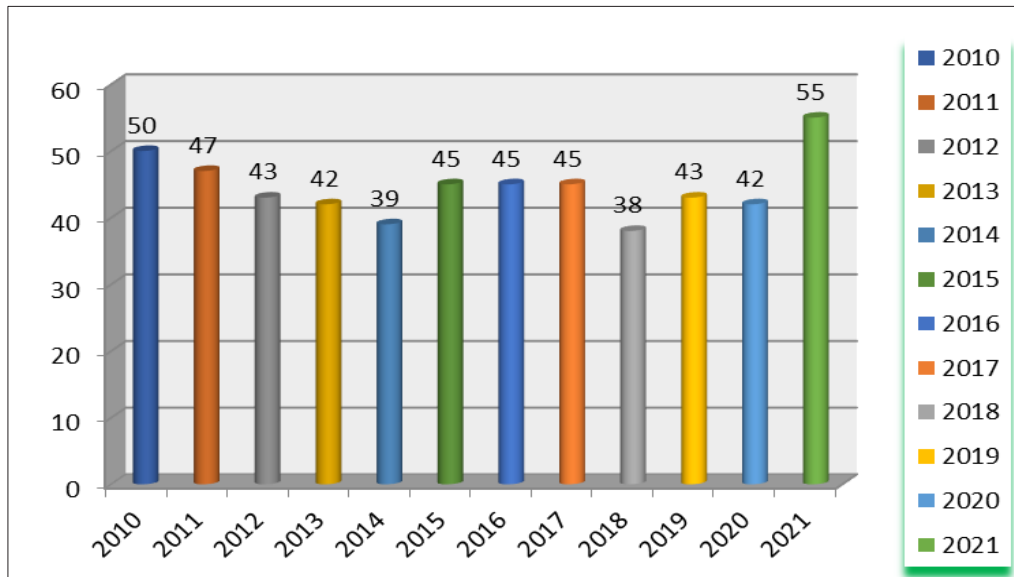


Gambar 2. 3 Grafik Persentase Pegawai Berdasarkan Usia Tahun 2021

Gambar 2.3 menunjukkan bahwa pada tahun 2021, populasi terbesar PNS Biro Perencanaan dan Keuangan adalah usia 31-40 tahun yaitu sebesar 49.09%, diikuti oleh kelompok usia 21-30 tahun ke atas yaitu sebesar 32.73%.



2.1.4 Kebutuhan Pegawai



Gambar 2. 4 Jumlah Pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan dari Tahun 2010-2021

Pada tahun 2021, dampak dari reorganisasi Badan POM, Biro Perencanaan dan Keuangan mendapatkan tambahan pada struktur organisasi, yaitu penambahan Kelompok Substansi Dukungan Strategis Pimpinan sejumlah 10 orang pegawai. Selain itu juga mendapatkan 1 (satu) orang pegawai pindahan dari Komnas HAM dan mendapatkan pegawai CPNS sebanyak 6 orang pegawai. Biro Perencanaan dan Keuangan juga mempunyai 2 orang pegawai yang pensiun pada tahun 2021, tetapi secara keseluruhan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan mengalami peningkatan jumlah pegawai dari 42 orang pegawai menjadi 55 orang pegawai.

Berdasarkan Analisis Beban Kerja yang dihitung pada tahun 2021, kebutuhan SDM di Biro Perencanaan dan Keuangan berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Analisis Beban Kerja di Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2021

No	Jabatan	ABK	Bezzeting	Gap
1	Perencana Utama	1	0	1
2	Perencana Madya	3	1	2
3	Perencana Muda	6	4	2
4	Perencana Pertama	18	2	16
5	Analisis Kebijakan Madya	6	3	3
6	Analisis Kebijakan Muda	22	4	18
7	Analisis Kebijakan Pertama	43	10	33

No	Jabatan	ABK	Bezzeting	Gap
8	Analisis Anggaran Madya	6	2	4
9	Analisis Anggaran Muda	8	2	6
10	Analisis Anggaran Pertama	8	2	6
11	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Madya	3	2	1
12	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda	6	1	5
13	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Pertama	5	0	5
14	Pranata Keuangan APBN Penyelia	1	0	1
15	Pranata Keuangan APBN Mahir	3	0	3
16	Pranata Keuangan APBN Terampil	4	1	3
17	Arsiparis Ahli Pertama	0	0	0
18	Arsiparis Penyelia	2	0	2
19	Arsiparis Mahir	2	0	2
20	Arsiparis Terampil	5	1	4
21	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	0	0	0
22	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	1	0	1
23	Analisis Kepegawaian Penyelia	1	0	1
24	Analisis Kepegawaian Pelaksana	1	0	1
25	Penata Laksana Barang (JF)	1	0	1
26	Pranata Komputer Ahli Pertama	2	0	2
27	Pranata Komputer Pelaksana	1	0	1
28	Pengadministrasian Keuangan (JFU)	1	1	0
29	Pengadministrasian Umum (JFU)	1	1	0
30	Calon PFM Ahli Pertama dari DSP	1	1	0
Total		162	38	124

Untuk mengimbangi semakin beratnya tugas dan tanggung jawab, sementara jumlah PNS terbatas, maka sejak tahun 2013, Biro Perencanaan dan Keuangan merekrut tenaga tambahan non PNS (pramubakti) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pada empat bagian. Sampai dengan tahun 2021, total pegawai non PNS yang telah direkrut adalah 28 orang.

2.1.5 Peningkatan Kompetensi SDM

Untuk menjawab tantangan dan tanggung jawab pelaksanaan program dan menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi ke depan, yang semakin besar, serta dengan mempertimbangkan ketersediaan jumlah pegawai saat ini, maka Biro Perencanaan dan

Kuangan membuat usulan perencanaan kebutuhan pendidikan lanjutan dan pendidikan pelatihan.

Sebagian besar tugas-tugas perencanaan seperti perencanaan jangka panjang dan strategis, pengembangan organisasi dan tatalaksana kerja, pengembangan metode dan sistem *sampling*, pengembangan sistem pengelolaan data terpadu, serta pengembangan sistem pelaporan membutuhkan analisis yang tajam dan mendalam. Oleh karena itu, disamping memerlukan penambahan jumlah SDM, Biro Perencanaan dan Keuangan perlu meningkatkan kompetensi teknis maupun manajerial pegawai, baik melalui pendidikan berkelanjutan maupun pelatihan. Peningkatan kompetensi yang dilakukan Biro Perencanaan dan Keuangan adalah sesuai dengan pedoman kompetensi yang ada.

Peningkatan kompetensi melalui pendidikan berkelanjutan yang dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan pada tahun 2021, meliputi:

Tugas Belajar atas nama Ikhsani Adil Kusbudiwanti, S. Farm., Apt dengan mengambil Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Tugas Belajar atas nama Pantri Widyastuti, S. Farm., Apt dengan mengambil Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Indonesia, Jakarta

Sedangkan peningkatan kompetensi melalui pelatihan ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2. 2 Diklat Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2021

No	Judul Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Waktu	Jumlah Peserta
1	Pertemuan Penyusunan Juklak TA 2021	Biro Perencanaan dan Keuangan	Hotel Mercure Jakarta Cikini	8 – 9 Februari 2021	10
2	<i>Bimtek Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020</i>	Biro Perencanaan dan Keuangan	Hotel Haris, Bekasi	10-11 Februari 2021	12
3	<i>Workshop Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2021</i>	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Badan POM	Hotel Intercontinental Pondok	16-19 Februari 2021	6

No	Judul Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Waktu	Jumlah Peserta
			Indah Jakarta		
4	<i>Workshop Peningkatan Peran dan Pengembangan Karier Analis Kebijakan Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM</i>	Biro Perencanaan dan Keuangan	Zoom Meeting	26 Maret 2021	20
5	<i>Bimbingan Teknis SAKIP dan Monev Online Loka POM Satker Mandiri</i>	Biro Perencanaan dan Keuangan	Novotel Cikini, Jakarta	7 April 2021	18
6	Bimbingan Teknis Awareness QMS ISO 9001:2015 BPOM Tahun 2021	Biro Hukum dan Organisasi	Grand Mercure Hotel, Kemayoran	22 April 2021	6
7	Bimbingan Teknis Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai	Biro Sumber Daya Manusia	Hotel Ritz Carlton Jakarta	23 April 2021	3
8	Sosialisasi Siklus Perencanaan, Penganggaran dan Monitoring	Balai POM di Mamuju	Zoom Meeting	26 April 2021	6
9	INTIPS Podcast "Buka Informasi, Hak Kamu Untuk Tahu"	Biro Hukum dan Organisasi	Webinar	28 April 2021	6
10	Sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Negara	Biro Umum	Hotel Harris Kelapa Gading	29 April 2021	6
11	Webinar Akuntansi Piutang Negara : Dukungan Akuntansi dalam Pengelolaan Piutang dan Crash Program Keringanan Piutang	Kementerian Keuangan	Virtual Conference	3 Mei 2021	3
12	Sosialisasi KIE Belanja Cerdas Jangan Asal Klik	Biro Hukum dan Organisasi	Badan POM	3 Mei 2021	4
13	Sosialisasi Pengukuran Indeks Kesadaran dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan Tahun 2021	Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	Aplikasi Zoom Meeting	4 Mei 2021	5
14	Kegiatan Sosialisasi Dan Penguatan Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Koordinasi Perencanaan Pengawasan Obat dan Makanan Pada Biro	Biro Perencanaan dan Keuangan	Sentul	16 – 18 Mei 2021	80

No	Judul Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Waktu	Jumlah Peserta
	Perencanaan Dan Keuangan BPOM RI				
15	Forum Diseminasi Hasil Riset dan Kajian Obat dan Makanan	PRKOM	Luring / Daring	19 – 20 Mei 2021	7
16	Memahami proses pengambilan keputusan dan hal-hal yang dipertimbangkan dalam mengambil keputusan (The Art of Decision Making)	PPSDM POM	Zoom Meeting	20 Mei 2021	2
17	SOSIALISASI PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN BADAN POM	Biro Umum	Zoom Meeting	25 Mei 2021	2
18	Pengelolaan Karier Jabatan Fungsional Perbendaharaan	Biro Sumber Daya Manusia	Hotel Shangri-La Jakarta	3 – 4 Juni 2021	12
19	Workshop Penilaian Angka Kredit Analisis Kebijakan Biro Perencanaan dan Keuangan	Biro Perencanaan dan Keuangan	Zoom Meeting	3 Juni 2021	10
20	Transformasi Kebijakan Tugas Belajar bagi PNS- Mekanisme Pemberian Beasiswa LPDP	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan	Hotel Novotel Cikini	15 Juni 2021	2
21	Bimtek SAKIP dan Monev Online	Biro Perencanaan dan Keuangan	Jakarta	21 – 25 Juni 2021	21
22	Membangun Relasi yang Sehat di Lingkungan Kerja	Biro Sumber Daya Manusia	Online Meeting	28 Juni 2021	4
23	Perkembangan Pengawasan Obat dan Makanan: Harapan dan tantangannya	Biro Perencanaan dan Keuangan	Aplikasi Zoom Meeting	29 Juni 2021	27
24	<i>ENHANCING YOUR PERSONAL EFFECTIVENESS</i>	PPM MANAJEMEN	Zoom Meeting	27 – 29 Juli 2021	20
25	<i>CAPACITY BUILDING ONLINE</i> “MEMBANGUN MENTAL JUARA UNTUK MENINGKATKAN PERFORMA”	Biro Perencanaan dan Keuangan	Aplikasi Zoom Meeting	12 Agustus 2021	80

No	Judul Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Waktu	Jumlah Peserta
26	<i>Character Building: "Meningkatkan Produktivitas dan Sense of Crisis pada Saat Pandemi Covid-19, The Art of Leadership, dan Inovasi Pelayanan Publik"</i>	Biro Perencanaan dan Keuangan	Virtual Conference	18 Agustus – 8 September 2021	80
27	Overviu SAKTI	Kementerian Keuangan	Virtual Conference	9 September 2021	2
28	<i>TRAINING ON EVIDENCE BASED POLICY MAKING</i>	Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Zoom Meeting	9 September 2021	5
29	Program Pelatihan Analisis dan Pengolahan Data	LPEM FEB UI	Zoom meeting (online)	13-17 September 2021	2
30	Pelatihan Penyusunan <i>Policy Brief</i>	LPEM FEB UI	Zoom meeting (online)	29-30 September 2021	16
31	SOSIALISASI PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN ANGGARAN 2021	Biro Umum	Virtual Meeting	15 September 2021	5
32	SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA	Biro Perencanaan dan Keuangan	JAKARTA	28 – 30 Setpember 2021	12
33	WORKSHOP SAKTI MODUL PELAKSANAAN	Kementerian Keuangan	Virtual Conference	4 Oktober 2021	11
34	<i>IN HOUSE TRAINING ANALIS KEBIJAKAN</i>	Institute for Policy Development Universitas Gadjah Mada (UGM)	Virtual Conference	6 – 12 Oktober 2021	17
35	Pelatihan Konsep dan Teknik Analisis Kebijakan	DMKP UGM-INDEV FISIPOL UGM dan Biro Perencanaan dan Keuangan	Zoom meeting (online)	6-8 Oktober 2021	16

No	Judul Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Waktu	Jumlah Peserta
36	Pelatihan Teknik Penyusunan <i>Policy Brief</i>	DMKP UGM-INDEV FISIPOL UGM dan Biro Perencanaan dan Keuangan	<i>Zoom meeting (online)</i>	11-12 Oktober 2021	16
37	<i>Webinar "A Snapshot of New Changing Nature of Work: Policy Action to Combat Inequality"</i>	UGM	<i>Zoom meeting (online)</i>	21 Oktober 2021	1
38	Pelatihan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan	MAP DMKP FISIPOL UGM	<i>Zoom meeting (online)</i>	21-22 Oktober 2021	6
39	BIMBINGAN TEKNIS PELATIHAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGI (RENSTRA) LOKA POM MANDIRI	Biro Perencanaan dan Keuangan	Aplikasi Zoom Meeting	15 - 16 November 2021	5
40	<i>Re-creating Value and Strengthening Culture Through High Class Response</i>	HCR.ID	Hotel Grand Mercure Kemayoran	29 - 30 November 2021	85
41	Monitoring dan Evaluasi	LPEM FEB UI	<i>Zoom meeting (online)</i>	6-8 Desember 2021	4

2.2 SURAT MENYURAT



Penerimaan surat masuk pada Biro Perencanaan dan Keuangan sepanjang tahun 2021 adalah sebanyak 4202 surat. Sementara itu, surat keluar dari Biro Perencanaan dan Keuangan pada tahun 2021 adalah sebanyak 1462 surat. Pada tahun 2021 Biro Perencanaan dan Keuangan telah sepenuhnya memanfaatkan Aplikasi SIKD, untuk Aplikasi Surat Meyurat Internal sebagaimana mendukung implementasi SPBE Badan POM.

Penerimaan surat masuk pada Biro Perencanaan dan Keuangan sepanjang tahun 2021 adalah sebanyak 4202 surat. Sementara itu, surat keluar dari Biro Perencanaan dan Keuangan pada tahun 2021 adalah sebanyak 1462



Gambar 2. 5 Perbandingan Surat Keluar di Biro Perencanaan dan Keuangan

BAB 3:

CAPAIAN KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

3.1 Indikator Kinerja Utama

Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2021 ditetapkan oleh Sekretaris Utama pada tanggal 20 Desember 2020, kemudian pada awal tahun 2021 terdapat pergantian Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan sehingga Perjanjian Kinerja 2021 di revisi dan ditetapkan kembali oleh Sekretaris Utama pada tanggal 7 Januari 2021. Sehubungan dengan ditetapkannya Reviu Renstra BPOM dan Sekretaris Utama 2020-2024, maka terdapat penyesuaian pada Peta Strategi Biro Perencanaan dan Keuangan, sehingga ditetapkan kembali Perjanjian Kinerja sesuai dengan reviu renstra seperti dibawah ini:

Tabel 3. 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM di Lingkup Biro Perencanaan dan Keuangan	1 Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas	4,22
		2 Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM	72,44
		3 Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) BPOM	94
		4 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPOM	94,87
		5 Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan BPOM yang disusun sesuai SAP	100%
2	Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	1 indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	3,80
3	Meningkatnya Kualitas Dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan	1 Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan	77,43%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	pelaporan keuangan SATKER sesuai pedoman	keuangan SATKER terhadap pedoman	
4	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan BPOM	1 Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan BPOM yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar	100%
		2 Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan SESTAMA yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar	100%
5	Meningkatnya kualitas layanan dukungan strategis Pimpinan	1 Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis Pimpinan	83
6	Terwujudnya tata kelola pemerintah Biro Perencanaan dan Keuangan yang optimal	1 Indeks RB Biro Perencanaan dan Keuangan	72,2
8	Terwujudnya SDM Biro Perencanaan dan Keuangan yang berkinerja optimal	1 Indeks Profesionalitas ASN Biro Perencanaan dan Keuangan	81
9	Menguatnya data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Biro Perencanaan dan Keuangan	1 Indeks pengelolaan data dan informasi di Biro Perencanaan dan Keuangan	2
10	Terkelolanya Keuangan di Biro Perencanaan dan Keuangan secara Akuntabel	1 Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan	Efisien (100%)

Berikut pencapaian IKU Biro Perencanaan dan Keuangan pada tahun 2021:

Tabel 3. 2 Capaian IKU Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	
1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM di Lingkup Biro Perencanaan dan Keuangan	1	Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas	4,22	3.96	93.83	Baik
		2	Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM	72,44	70,67	97.56	Baik
		3	Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) BPOM	94	91,36	97,19	Baik
		4	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPOM	94,87	95.72	100,8	Baik
		5	Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan BPOM yang disusun sesuai SAP	100%	100%	100	Baik
2	Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro	1	indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	3,8	3,2	84,2	Baik

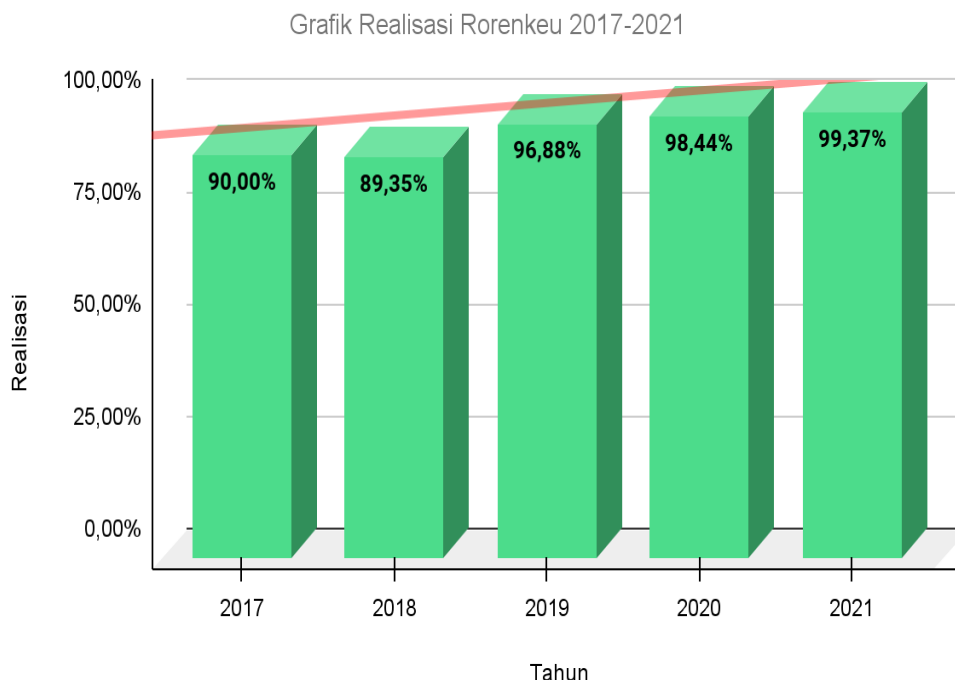
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	
	Perencanaan dan Keuangan						
3	Meningkatnya Kualitas Dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan SATKER sesuai pedoman		Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Monev dan Pelaporan Kinerja, Pelaksanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan Satker Terhadap Pedoman	77,43	71	94.13	Baik
4	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan BPOM	1	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Monev dan Pelaporan Kinerja, Pelaksanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan BPOM yang Diselesaikan Tepat Waktu dan Sesuai Standar terhadap pedoman	100	100	100	Baik
		2	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Monev dan Pelaporan Kinerja,	100	100	100	Baik

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	
			Pelaksanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan Sekretariat Utama yang Diselesaikan Tepat Waktu dan Sesuai Standar				
4	Meningkatnya kualitas layanan dukungan strategis Pimpinan	1	Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis Pimpinan	83	84.41	101.70	Baik
7	Terwujudnya tata kelola pemerintah Biro Perencanaan dan Keuangan yang optimal	1	Indeks RB Biro Perencanaan dan Keuangan	72,2	72.2	100	Cukup
8	Terwujudnya SDM Biro Perencanaan dan Keuangan yang berkinerja optimal	1	Indeks Profesionalitas ASN Biro Perencanaan dan Keuangan	81	85,18	105.16	Baik
9	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Biro Perencanaan dan Keuangan	1	Indeks pengelolaan data dan informasi di Biro Perencanaan dan Keuangan	2	2,5	125	Sangat Baik

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
10	Terkelolanya Keuangan di Biro Perencanaan dan Keuangan secara Akuntabel	1 Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan	Efisien (100%)	100%	100	Baik

3.2 Realisasi Anggaran

Pada tahun 2021, berdasarkan OMSPAN Tahun Anggaran 2021 **pagu anggaran** yang harus dipertanggungjawabkan oleh Biro Perencanaan dan keuangan adalah sebesar Rp. 13,859,474,000,00 sedangkan **realisasi anggaran** Biro Perencanaan dan Keuangan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 13,771,930,972,00 sehingga jika dibandingkan dengan penyerapan tahun 2019, penyerapan Biro Perencanaan dan Keuangan mengalami kenaikan dari 98.44% menjadi 99.37%.



Gambar 3. 1 Grafik % Realisasi Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2017-2021

BAB 4:

KEGIATAN BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEPANJANG TAHUN 2021

Pencapaian 10 Sasaran Kegiatan dan 14 Indikator Kinerja tersebut dilakukan melalui program dan kegiatan tahunan yang dilaksanakan secara mandiri oleh kelima unit kerja tingkat eselon III yaitu Kelompok Substansi Perencanaan, Kelompok Substansi Penganggaran, Kelompok Substansi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja, Kelompok Substansi Keuangan dan Kelompok Substansi Dukungan Strategis Pimpinan atau juga kegiatan yang disusun dengan melibatkan lintas sektor/supra sistem.

Sasaran Kegiatan 1:

Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM di Lingkup Biro Perencanaan dan Keuangan

IKU 1: Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas

Kegiatan-kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan IKU 1 adalah:

a. Rapat Kerja Nasional Tahun 2021 di Bali



Gambar 4. 1 Rapat Kerja Nasional Tahun 2021 di Bali

Pengawasan obat dan makanan menjadi penuh tantangan akibat dampak dari pandemi COVID-19. Untuk itu, penguatan kapasitas pelaku usaha melalui pembinaan dan pendampingan perlu ditingkatkan. Badan POM menciptakan kemudahan berusaha, namun juga tetap memperhatikan aspek keamanan dan mutunya. Hal ini dilakukan demi untuk perlindungan masyarakat dan mendorong penyediaan produk berkualitas dan berdaya saing, serta upaya pemulihan ekonomi.



Gambar 4. 2 Ibu Kepala Badan POM membuka Rapat Kerja Nasional Tahun 2021 di Bali

Intensifikasi koordinasi pengawasan untuk penguatan pembinaan dan pendampingan pelaku usaha menjadi fokus pembahasan dalam pembahasan Rapat Kerja Nasional Tahun 2021 Badan POM. Selasa (30/03), Gubernur Bali I Wayan Koster bersama Kepala Badan POM Penny K. Lukito membuka kegiatan rangkaian Rakernas secara langsung.

Rakernas ini berlangsung selama 3 Hari dimulai dari hari Senin hingga Rabu, 29-31 Maret 2021 dan dilakukan secara daring dan luring.

Peningkatan koordinasi pengawasan yang sedang difokuskan Badan POM merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Dalam Inpres tersebut, Badan POM bersama sembilan (9) Kementerian lainnya, serta Gubernur, Bupati, dan Walikota diamanatkan untuk melakukan peningkatan efektivitas dan penguatan pengawasan obat dan makanan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.



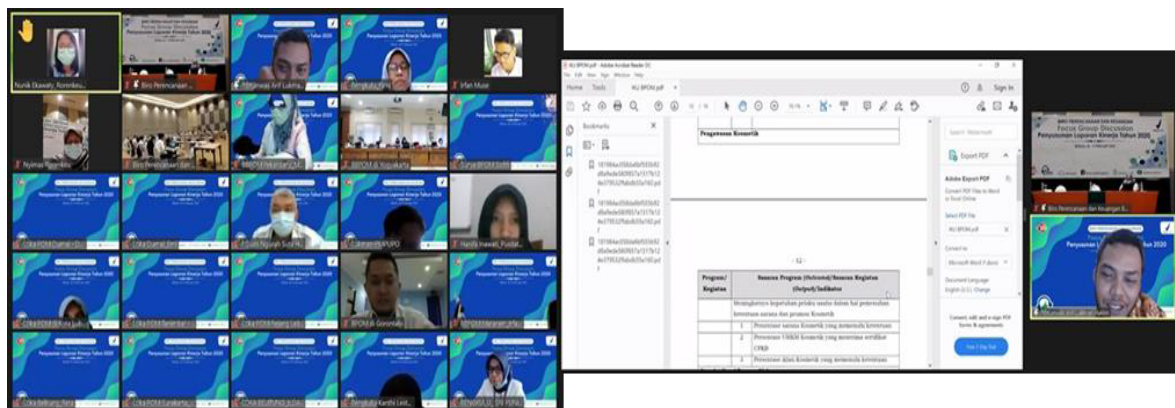
Gambar 4. 3 Rakernas Dilaksanakan Secara Hibrid



Gambar 4. 4 Pemukulan Gong oleh Gubernur Bali dalam Rakernas 2021

b. Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020

Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 diselenggarakan pada tanggal 10 – 11 Februari 2021 di Bekasi. Peserta Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 adalah TU Eselon I dan 28 unit kerja pusat secara luring dan 33 Balai Besar/Balai POM dan 40 Loka POM secara daring. Narasumber pada kegiatan ini adalah dari Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN-RB, Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat – Bappenas, Inspektur I dan II, Kepala Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan, Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional, Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan, Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kepala Biro Sumber Daya dan Manusia dan Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan.



Gambar 4. 5 Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM dalam paparannya menyampaikan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Instansi Pemerintah. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan juga menyampaikan agar meningkatkan komitmen seluruh unit kerja sampai level terkecil untuk mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik dan memanfaatkan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian reward and punishment.



Selanjutnya, Kementerian PAN dan RB menyampaikan bahwa secara umum hasil evaluasi di 2020 memenuhi harapan. Beliau juga menyampaikan bahwa BPOM termasuk salah satu instansi pemerintah yang konsisten dalam melaporkan laporan kinerja. Narasumber dari Inspektorat Utama BPOM menyampaikan target nilai rata rata evaluasi AKIP mitra kerja inspektorat tahun 2020 adalah 81 atau kategori Memuaskan (A). Namun realisasi hanya 77,24 atau sangat baik. Meskipun terdapat Unit/Satuan Kerja yang mencapai kategori Memuaskan (A), secara keseluruhan rata-rata nilai hasil Unit/Satuan Kerja belum mencapai target. Terkait WBK/WBBM, sampai dengan 2020 unit kerja yang memperoleh WBBM sebanyak 1 unit yaitu Dit. RPO dan 10 unit WBK yaitu Ditwas Kosmetik, Ditwas OT SK, Ditwas PRRS, Ditwas PRTTB, Dit. Reg Obat, Dit SPO, P3OMN, BBPOM Jakarta, BBPOM Semarang, dan BBPOM Gorontalo. Selanjutnya juga disampaikan hasil Survei Kepuasan Masyarakat BPOM 2020, terdapat 10 unit yang tidak mencapai target, yaitu BBPOM Pontianak, BBPOM Denpasar, Balai POM Mamuju, BBPOM Serang, Dit. Standardisasi Pangan Olahan, Balai POM Batam, BBPOM Samarinda, BBPOM Bandung, Dit, Registrasi Pangan Olahan dan Ditwas PRRS.

Narasumber dari Biro Hukum dan Organisasi menyampaikan materi terkait Indeks Peayanan Publik, Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan BPOM Tahun 2020 dan Indeks Kualitas Kebijakan BPOM Tahun 2020. Pada rekapitulasi kategori IPP UPP BPOM Tahun 2020 terdapat 1 unit kerja dengan predikat baik dengan catatan (BPOM di Mamuju), 22 unit kerja dengan predikat baik, 22 unit kerja dengan predikat sangat baik, dan 2 unit kerja dengan predikat pelayanan prima. Diharapkan pada tahun 2024 seluruh UPP di lingkungan BPOM telah meraih kategori pelayanan prima dengan IPP minimal 4,51. Untuk KIE, pada triwulan 4 semua unit kerja pusat dan UPT yang memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) telah melaksanakan survei. Terdapat beberapa unit kerja pusat dan UPT dengan data responden yang kosong pada triwulan 2 dan 3. Selanjutnya untuk hasil penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2019 adalah sebesar 64,96 dengan kategori cukup.

Koordinator Monev dan Lapkin memaparkan terkait format penyusunan LAPKIN 2020. Untuk membandingkan kinerja antar satker dalam penyusunan laporan kinerja tahun 2020, klaster balai-balai pembanding dibagi menjadi 8 klaster. Narasumber dari Pusat

Riset dan Kajian Obat dan Makanan menyampaikan hasil evaluasi beberapa indikator BPOM tahun 2020 yaitu Indeks Kesadaran Masyarakat adalah 74,29, Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan (IKEPU) adalah 86,81, Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha (Compliance Index) Obat Dan Makanan adalah 80,06.

Narasumber Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan menyampaikan paparan terkait capaian dan evaluasi Program Prioritas Nasional 2020 (Desa, Pasar, Sekolah). Berdasarkan perhitungan capaian tahun 2020, terdapat 157 desa yang sudah selesai diintervensi 1 desa yang tidak selesai diintervensi (terhenti pada tahap pelatihan kader). Untuk pasar, terdapat 66 pasar yang sudah diberikan intervensi serta 500 petugas pasar yang sudah memperoleh bimbingan teknis pengelolaan pasar. Pada PJAS, Terdapat 2 tahapan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu pemeriksaan keamanan PJAS di lingkungan sekolah dan sertifikasi Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah.

Narasumber Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional menyampaikan terkait indikator Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP. Dari 33 Balai, terdapat 22 Balai yang nilai SKL nya memenuhi nilai 70% (target 23 dari total 33 balai mendapat nilai >70%). Koordinator Monev dan Lapkin memaparkan hasil Indeks Pengawasan Obat dan Makanan. Hasil IPOM tahun 2020 adalah 75,45 (nasional), 85,72 untuk komoditi Obat, 79,16 untuk komoditi Obat Tradisional, 81,81 untuk komoditi Suplemen Kesehatan, 85,48 untuk komoditi Kosmetik dan 81,04 untuk komoditi Pangan Olahan. Narasumber dari Biro SDM memaparkan terkait Indeks Profesionalitas ASN, yaitu Nilai IP ASN BPOM pada tahun 2020 adalah 82,88, nilai ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang memiliki nilai 72,37. Terakhir Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan memaparkan terkait Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal. Dari target tahun 2020 yaitu 1,5, ada 6 BB/Balai POM yang belum memenuhi target, sedangkan pada unit pusat hanya 1 yang memenuhi target yaitu Direktorat Standardisasi Pangan Olahan.

Dalam kegiatan ini juga dilakukan kegiatan desk Hasil Kegiatan Pengawasan/RHPK, RHPK/RKP, e-performance, dan Draft Lapkin Tahun 2020. Output dari kegiatan ini adalah

tersusunnya draf Laporan Kinerja masing-masing satuan kerja (43 draf Laporan Kinerja) dan SDM yang meningkat kompetensinya terkait SAKIP.

Sebagai tindak lanjut pertemuan ini adalah perlunya komitmen dari seluruh Unit Kerja dari seluruh Unit Kerja untuk melaporkan data capaian Hasil Kegiatan Pengawasan/RHPK, RAPK/RKP, aplikasi e-monev Bappenas, SMART DJA, TEPRAs dan e-Performance BPOM secara tepat waktu. Seluruh Unit Kerja juga diharapkan tepat waktu dalam menyampaikan Laporan Kinerja baik kepada Biro Perencanaan dan Keuangan maupun melalui aplikasi e-SAKIP Reviu KemenPAN RB, dimana melalui aplikasi tersebut ketepatan waktu Unit Kerja dalam menyampaikan laporan juga akan direviu oleh Inspektorat II BPOM. Selain itu, dalam melakukan penginputan data capaian, Unit Kerja agar menyamakan data capaian antara Laporan Kinerja, monev online dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja/RKP agar tidak terjadi ketidaksesuaian pada data yang diinput.

c. Bimtek SAKIP dan Monev Online Loka POM Satker Mandiri Tahun 2021

Bimtek SAKIP dan Monev *Online* Loka POM Satker Mandiri Tahun 2021

Kegiatan Bimtek SAKIP dan Monev *Online* Loka POM Satker Mandiri Tahun 2021 diselenggarakan pada tanggal 4 s.d. 7 April 2021 di Hotel Novotel Jakarta Cikini. Peserta Sosialisasi, Bimtek SAKIP dan Monev *Online* Loka POM Satker Mandiri Tahun 2021 sejumlah 62 orang, terdiri dari 20 peserta Unit Kerja Pusat dan 42 peserta dari Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia. Narasumber pada kegiatan ini adalah dari Biro



Gambar 4. 6 Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan membuka acara Bimtek SAKIP dan Monev Online Loka POM Satker Mandiri

Perencanaan dan Keuangan Badan POM, DJPb Kementerian Keuangan, DJA Kementerian Keuangan, Bappenas, LKPP, LPSE, dan Konsultan Aplikasi Simetris.

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM dalam paparannya menyampaikan bahwa SAKIP merupakan

rangkaiannya sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi,

pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Instansi Pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP dimulai dari Satuan Kerja tingkat Eselon II, level Unit Kerja Tingkat Eselon I/UPT Saker Mandiri hingga ke level Badan POM. Selain itu, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan juga menyampaikan bahwa s.d. 31 Maret 2021 sebesar 12,13% sehingga perlu upaya peningkatan terhadap realisasi anggaran tahun 2021.

Selanjutnya, Koordinator Kelompok Substansi Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja menyampaikan bahwa dasar hukum pelaksanaan SAKIP adalah Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang SAKIP yang diturunkan pelaksanaannya dalam PermenPAN RB No. 53 Tahun 2014. Di lingkungan Badan POM sudah ditetapkan keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Badan POM. Dalam pelaporan kinerja, harus disusun Laporan Kinerja Interim yang disampaikan setiap triwulan dan Laporan Kinerja Tahunan, sementara laporan evaluasi internal yang merupakan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan disampaikan setiap triwulan. Kriteria dalam capaian indikator kinerja adalah target dapat dicapai, capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya, dasar perhitungan valid, sumber data yang dapat dipercaya, dapat ditelusuri, dan dapat diverifikasi.

Dalam paparan yang disampaikan Subkoordinator Subkelompok Substansi Perencanaan Strategis, setiap Satker diwajibkan menyusun Renstra berdasarkan peraturan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, dan Permen PPN No. 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L 2020-2024.

Narsumber Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menghasilkan pencapaian RO yang optimal diantaranya: (1) menginventarisir daftar RO yang dikelola dan menyiapkan kertas kerja untuk menghitung dan memonitor progres dan capaiannya dalam 1 tahun, (2) menyiapkan metode perhitungan capaian RO untuk setiap RO yang dikelola, (3) mengidentifikasi berbagai aktivitas yang relevan dalam

pencapaian output untuk diperhitungkan dalam RVRO, (4) menentukan entry point kapa suatu RO dapat diakui, (5) melakukan evaluasi pencapaian output secara berkala, (6) memperkuat koordinasi antar PPK dan antar PPK dengan PPSDM dalam hal perekaman data, (7) melakukan pengisian data capaian output secara wajar, tepat, dan akurat dan mengunggah data ke OMSPAN sebelum batas akhir pelaporan, dan (8) aktif berkoordinasi dengan KPPN apabila terdapat output yang tidak terkonfirmasi, dan segera melakukan perbaikan data apabila diperlukan.

Narasumber Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa dasar hukum yang menjadi dasar dalam pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L yang sebelumnya adalah PMK 214/PMK.02/2017 telah diubah menjadi PMK 22/PMK.02/2021. Pada tahun 2020, Badan POM mendapat peringkat 15 dari 53 K/L dalam kategori K/L dengan pagu kecil. Terdapat 32 output yang termasuk ke dalam data anomali karena melebihi 120%, hal ini perlu menjadi perhatian agar tidak seolah-olah ada overbudget dan perlu diberikan justifikasi secara jelas dan disampaikan kepada mitra di PMK karena hal tersebut akan berdampak pada alokasi penganggaran di tahun berikutnya.

Narasumber Bappenas menyampaikan bahwa seluruh pengembangan aplikasi e-Monev dalam rangka perbaikan fitur untuk meningkatkan kualitas data dan penyajian data yang lebih baik dan lebih lengkap dalam kerangka pemanfaatan data/analisis data. Pelaporan komponen dan output di aplikasi e-Monev dilakukan setiap bulan oleh masing-masing Satker, sedangkan pelaporan e-Monev oleh Kementerian/Lembaga dilakukan tiap triwulan kepada Bappenas.

Narasumber LKPP dan LPSE Badan POM menyampaikan bahwa data pada tabel rencana paket pengadaan terintegrasi dengan aplikasi SiRUP dan dilakukan penarikan setiap 1x24 jam. SiRUP merupakan aplikasi berbasis web yang berfungsi sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP. Saat ini, LPSE Badan POM memiliki aplikasi monitoring PBJ yaitu aplikasi AMEL yang dapat diakses melalui <https://lpse.pom.go.id/eproc4/amel/>.

Dalam kegiatan ini juga dilakukan sosialisasi dashboard BPOM Operational Center (BOC) dan RHPK, dimana BOC dapat diakses melalui <https://command-center.pom.go.id/>. Data-data yang perlu dilaporkan adalah (1) hasil sampling dan pengujian, (2) pemeriksaan sarana produksi, (3) pemeriksaan sarana distribusi, (4) sertifikasi, (5) tindak lanjut hasil pengawasan, (6) intelijen dan penyidikan, (7) KIE, (8) jenis KIE, (9) pengawasan iklan/label, (10) realisasi anggaran, dan (11) pengendalian pembangunan fisik/rehabilitasi/renovasi gedung.

Sosialisasi aplikasi Simetris (e-Planning dan e-Performance) juga dilaksanakan pada kegiatan ini. Kedua aplikasi tersebut dapat diakses melalui <http://simetris.esolution-tech.com/>.

Dalam kegiatan ini juga dilakukan kegiatan desk capaian kinerja dan anggaran yang bertujuan untuk mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh seluruh Loka POM Satker Mandiri baik dalam pengisian aplikasi monev online maupun pelaporan secara manual.



Gambar 4. 7 Bimtek SAKIP dan Monev Online Loka POM Satker Mandiri

Output dari kegiatan ini adalah SDM yang meningkat kompetensinya dalam penerapan SAKIP serta kepatuhan dalam pelaporan kinerja dan anggaran melalui aplikasi monev online. Untuk mengetahui seberapa besar pemahaman peserta terhadap SAKIP dan monev online, pada acara ini dilakukan pre-test dan post-test. Peserta yang hanya

mengikuti pre atau post-test adalah sebanyak 13 orang. Peserta yang mengikuti pre dan post-test adalah sebanyak 27 orang, dengan hasil sebagai berikut:

1. Peserta yang mengalami penurunan hasil post-test dibandingkan terhadap pre-test adalah sebanyak 2 orang (7,41%)
2. Peserta yang mengalami peningkatan hasil post-test dibandingkan terhadap pre-test adalah sebanyak 24 orang (88,89%)
3. Peserta yang tidak mengalami penurunan/ peningkatan hasil post-test dibandingkan terhadap pre-test adalah sebanyak 1 orang (3,70%).

Sebagai tindak lanjut pertemuan ini adalah perlunya komitmen dari seluruh Unit Kerja dalam melaporkan hasil kegiatan pengawasan baik melalui aplikasi monev online maupun pelaporan manual secara tepat waktu, serta dalam diharapkan data yang disampaikan sesuai antara pelaporan melalui aplikasi monev maupun secara manual.

d. Bimbingan Teknis (Bimtek) SAKIP dan Monev Online Tahun 2021



Gambar 4. 8 Bimtek SAKIP dan Monev Online Juni 2021

Bimbingan Teknis (Bimtek) SAKIP dan Monev *Online* Tahun 2021 Kegiatan Sosialisasi, Bimtek SAKIP dan Monev *Online* Tahun 2021 diselenggarakan pada tanggal 23 - 25 Juni 2021 di Hotel Grand Mercure Kemayoran Jakarta.

Peserta Sosialisasi, Bimtek SAKIP dan Monev *Online* Tahun 2021 berasal dari seluruh Unit Kerja Pusat, Balai Besar/Balai PO dan LOKA POM Satuan Kerja non Mandiri. Pada pertemuan tersebut menghadirkan narasumber dari eksternal yaitu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Keuangan, serta narasumber internal dari Biro Hukum dan Organisasi LPSE Badan POM, Tim Dana Alokasi Khusus (DAK) Kedeputan dan Pusat dan Data Informasi Obat dan Makanan.

Narasumber Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa dasar hukum yang menjadi dasar dalam pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L yang sebelumnya adalah PMK 214/PMK.02/2017 telah diubah menjadi PMK 22/PMK.02/2021. Pada tahun 2020, BPOM berada di peringkat 15 dari 53 K/L dengan pagu kecil, hal ini disebabkan nilai IKPA belum maksimal sehingga perlu menjadi perhatian agar tidak hanya memperhatikan NKA pada aplikasi SMART namun juga 12 variabel IKPA. Dari sisi aplikasi, pada tahun 2021 aplikasi SMART telah terintegrasi dengan aplikasi lainnya yaitu OMSPAN dan SAS untuk level Satuan Kerja.

Narasumber Bappenas menyampaikan bahwa saat ini Bappenas sedang berusaha mengawal program, kegiatan dan output yang dilaksanakan oleh K/L tidak hanya terlaksana namun harus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Pelaporan komponen dan rincian output di aplikasi e-Monev dilakukan setiap bulan oleh masing-masing Satuan Kerja, sedangkan pelaporan e-Monev oleh Kementerian/Lembaga dilakukan tiap triwulan. Data e-Monev yang terbuka dan dapat dilakukan pengisian adalah data 4 bulan terakhir. Bappenas mengapresiasi pelaporan BPOM di tahun 2020. Berdasarkan pelaporan tersebut, sebesar 87% komponen dilaporkan tidak terdapat masalah dalam pelaksanaannya. Hal ini perlu menjadi perhatian apakah data ini sudah benar atau kendala yang sebenarnya dialami belum dilaporkan

Narasumber Biro Hukum dan Organisasi menyampaikan bahwa evaluasi klasifikasi UPT BPOM saat ini masih mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kriteria Klasifikasi UPT di Lingkungan BPOM. Evaluasi klasifikasi UPT BPOM Tahun 2020 menggunakan sumber data Laporan Tahunan Balai Besar/Balai POM Koordinator dan Laporan Tahunan Loka POM 2019. Berdasarkan Hasil Evaluasi Klasifikasi UPT BPOM 2020, terdapat beberapa Rekomendasi Klasifikasi UPT BPOM yaitu: Peningkatan 4 Balai POM menjadi Balai Besar POM, yaitu Balai POM di Palu, Balai POM di Jambi, Balai POM di Kendari dan Balai POM di Kupang; Peningkatan 15 Loka POM menjadi Balai POM; Pembentukan 3 Loka POM. Dengan adanya rekomendasi tersebut kedepannya Balai Besar POM yang awalnya berjumlah 21 UPT bertambah menjadi 25 UPT, Balai POM yang awalnya berjumlah 12 UPT menjadi 23 UPT dan Loka POM yang awalnya berjumlah 40

UPT menjadi 28 UPT. Selain Klasifikasi UPT, Biro Hukum dan Kerjasama juga menyampaikan tentang Sosialisasi dan Evaluasi Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan. Tingkat Efektifitas KIE dihitung dengan menggunakan Nilai Indeks. Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis dapat mengetahui nilai indeks di aplikasi Evaluasi KIE dengan alamat <http://evaluasikie.pom.go.id>.

Narasumber LKPP dan LPSE Badan POM menyampaikan bahwa data pada tabel rencana paket pengadaan terintegrasi dengan aplikasi SiRUP dan dilakukan penarikan data setiap 1x24 jam. SiRUP merupakan aplikasi berbasis web yang berfungsi sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP. Saat ini, LPSE Badan POM memiliki aplikasi monitoring PBJ yaitu aplikasi AMEL yang dapat diakses langsung tanpa *login* dan *password* melalui <https://lpse.pom.go.id/eproc4/amel/>. AMEL ditujukan sebagai salah satu sarana keterbukaan informasi publik yang dijalankan oleh Badan POM.

Narasumber Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan menyampaikan terkait Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal. Target Indeks Pengelolaan Data dan Informasi pada tahun 2020 adalah 1,51; pada tahun 2021 adalah 2; pada tahun 2022 adalah 2,25; pada tahun 2023 adalah 2,5; dan pada tahun 2024 adalah 3. Komponen Indeks Pengelolaan Data dan Informasi terdiri dari dua yaitu: pemutakhiran data dan pemanfaatan sistem. Untuk Unit Kerja Pusat, komponen pemutakhiran data merupakan kegiatan verifikasi data yang dialirkan ke BOC secara manual melalui aplikasi BOC. Sedangkan komponen pemanfaatan sistem terdiri dari penggunaan dashboard di BOC dan pemanfaatan *email corporate*. Untuk UPT, komponen pemutakhiran data terdiri dari SIPT dan SPIMKer. Sedangkan komponen pemanfaatan sistem terdiri dari berita aktual; *Sharing Folder*, *Dashboard* di BOC dan email.

Narasumber Tim Dana Alokasi Khusus (DAK) Kedeputan dan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan menyampaikan bahwa untuk pelaporan kegiatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik POM tahun 2021 dapat dilakukan di aplikasi SMARTPOM dengan alamat <https://smarpom.pom.go.id/>. Aplikasi tersebut memiliki fungsi diantaranya sebagai sarana pelaporan hasil pengawasan obat dan makanan yang direkomendasikan Badan POM kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; Monitoring dan

evaluasi alokasi DAK Non Fisik yang dilaksanakan Dinas Kesehatan di daerah; Pelaporan Rencana Kerja Anggaran oleh Dinas Kesehatan ke BPOM.

Sosialisasi aplikasi Simetris juga dilaksanakan pada kegiatan ini. SIMETRIS merupakan sistem pelaporan, pemantauan, dan evaluasi kinerja BPOM, unit kerja eselon I, dan eselon II secara online berbasis peta strategi *Balanced Score Card* (BSC) untuk mendukung keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi penguatan akuntabilitas. Saat ini e-Planning dan e-Performance sudah diintegrasikan dalam Simetris yang dapat diakses melalui <http://simetris.esolution-tech.com/>.

Dalam kegiatan ini juga dilakukan kegiatan desk capaian kinerja dan anggaran yang bertujuan untuk mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh seluruh Loka POM Satker Mandiri baik dalam pengisian aplikasi monev online maupun pelaporan secara manual.

Output dari kegiatan ini adalah SDM yang meningkat kompetensinya dalam penerapan SAKIP serta kepatuhan dalam pelaporan kinerja dan anggaran melalui aplikasi monev online. Untuk mengetahui seberapa besar pemahaman peserta terhadap SAKIP dan monev *online*, pada acara ini dilakukan *pre-test* dan *post-test*. Peserta yang hanya mengikuti *pre-test* atau *post-test* berjumlah 11 orang. Peserta yang mengikuti *pre-test* dan *post-test* adalah sebanyak 76 orang dengan hasil sebagai berikut:

1. Peserta yang mengalami penurunan hasil *post-test* dibandingkan terhadap *pre-test* adalah sebanyak 2 orang (2,63%)
2. Peserta yang mengalami peningkatan hasil *post-test* dibandingkan terhadap *pre-test* adalah sebanyak 71 orang (93,42%)
3. Peserta yang tidak mengalami penurunan/peningkatan hasil *post-test* dibandingkan terhadap *pre-test* adalah sebanyak 3 orang (3,95%).

Sebagai tindak lanjut pertemuan Bimtek SAKIP dan Monev *Online* 2021 diperlukannya komitmen dari seluruh Unit Kerja/Balai Besar/Balai POM/Loka POM untuk melaporkan data capaian Hasil Kegiatan Pengawasan (RHPK) melalui BOC, RAPK, aplikasi SMART, e-Monev Bappenas, TEPR, dan Simetris menu *e-Performance* secara tepat waktu setiap bulannya. Selain itu, agar seluruh Unit Kerja/Balai Besar/Balai POM/Loka POM juga tepat waktu dalam menyampaikan laporan baik laporan evaluasi internal maupun laporan

kinerja interim setiap triwulannya. Kemudian dalam melakukan penginputan data capaian, Unit Kerja/Balai Besar/Balai POM/Loka POM dimita agar menyamakan data capaian antara Laporan Kinerja, aplikasi monev *online* dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) agar tidak terjadi ketidaksesuaian pada data yang diinput. Dengan diselenggarakannya Kegiatan Bimtek ini, diharapkan seluruh unit kerja meningkat kompetensinya dan kepatuhannya dalam pelaporan kinerja dan anggaran sehingga dapat disampaikan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

IKU 2: Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM

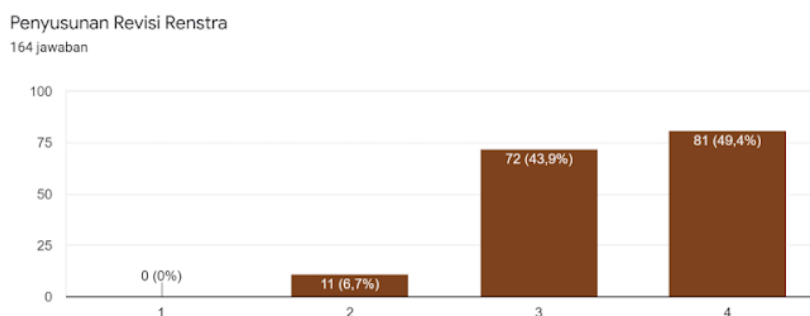
Kegiatan-kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan IKU 2 adalah:

a. Layanan Pendampingan Terhadap Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Unit Organisasi/Satker

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Internal BPOM terhadap Layanan Dukungan Manajemen oleh Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2021 yang telah dilaksanakan pada akhir tahun 2021 tepatnya sejak tanggal 20 – 31 Desember 2021, dapat diketahui bahwa dari total 403 responden, sebanyak 164 responden menilai layanan yang diberikan oleh Kelompok Substansi Perencanaan adalah sangat baik. Penilaian tersebut dilakukan dengan menggunakan skala *likert* dengan rincian sebagai berikut:

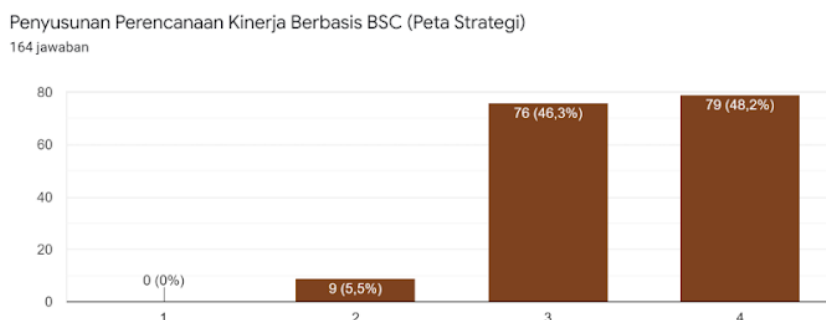
- Nilai 1: Kurang (Bobot 25 Poin);
- Nilai 2: Cukup (Bobot 50 Poin);
- Nilai 3: Baik (Bobot 75 Poin);
- Nilai 4: Sangat Baik (Bobot 100 Poin).

Berikut dibawah ini adalah hasil rekapitulasi penilaian layanan yang diselenggarakan oleh Kelompok Substansi Perencanaan:



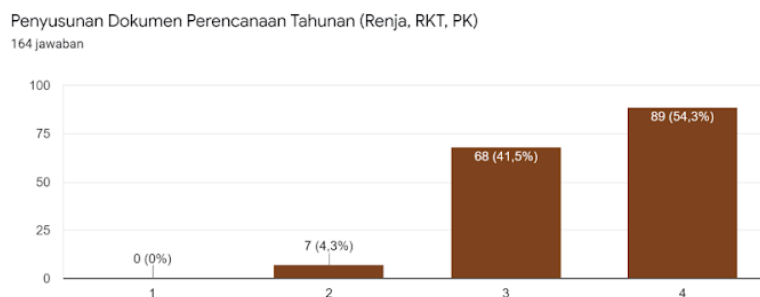
Gambar 4. 9 Penilaian Layanan Penyusunan Reviu Renstra seluruh Unit Kerja BPOM

Hasil penilaian Layanan Penyusunan Reviu Renstra seluruh Unit Kerja BPOM yang dilakukan oleh Kelompok Substansi Perencanaan memperoleh nilai sangat baik dari 81 responden.



Gambar 4. 10 Penilaian Layanan Penyusunan Peta Strategi seluruh Unit Kerja BPOM.

Hasil penilaian Layanan Penyusunan Peta Strategi/Perencanaan Kinerja berbasis BSC seluruh Unit Kerja BPOM yang dilakukan oleh Kelompok Substansi Perencanaan memperoleh nilai sangat baik dari 79 responden.



Gambar 4. 11 Penilaian Layanan Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahunan seluruh Unit Kerja BPOM.

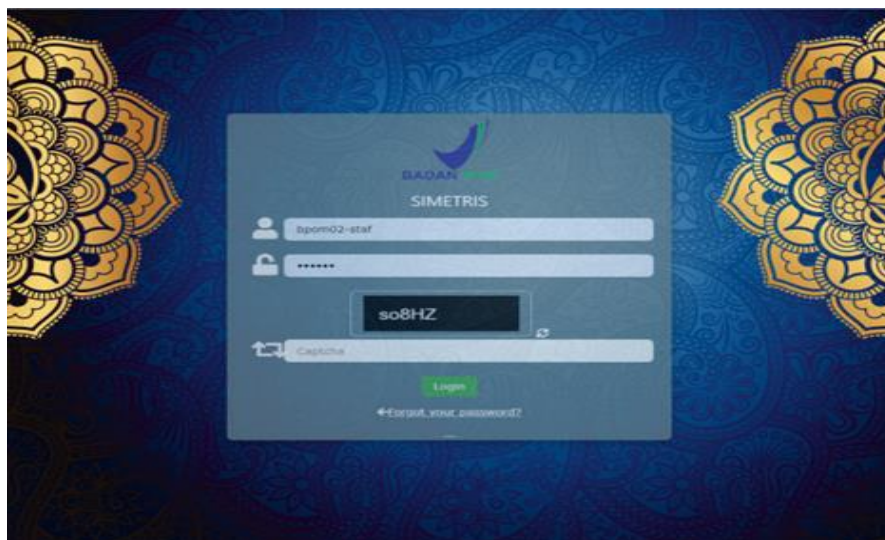


Hasil penilaian Layanan Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahunan seluruh Unit Kerja BPOM yang dilakukan oleh Kelompok Substansi Perencanaan memperoleh nilai sangat baik dari 89 responden.

b. Pengembangan e-performance

e-Performance merupakan sistem Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Kinerja secara Elektronik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sesuai dengan keputusan Kepala Badan POM No. HK.08.1.23.02.16.0562 tahun 2016 tentang Penerapan Sistem Pelaporan, Monitoring, dan Evaluasi Kinerja secara Elektronik di Lingkungan Badan POM, disebutkan bahwa seluruh Unit Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis wajib melaporkan, memonitor dan mengevaluasi kinerja secara berkala dalam e-Performance Badan POM.

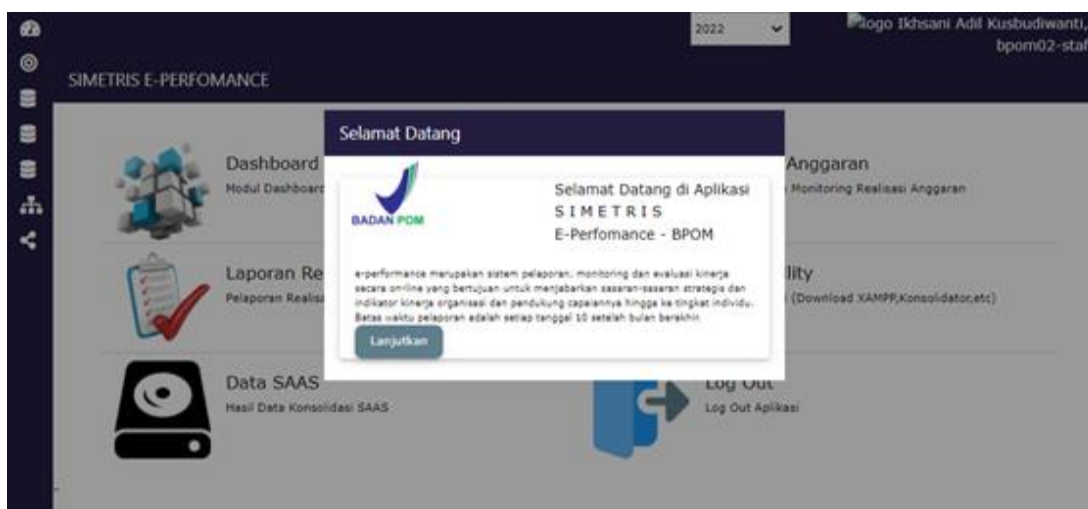
Pada tahun 2021 Biro Perencanaan dan Keuangan mengembangkan aplikasi SIMETRIS BPOM (Sistem Manajemen Kinerja Terintegrasi) dimana aplikasi tersebut terdiri dari modul *e-planning* dan modul *e-performance*. Sebelum melakukan penginputan pada modul *e-performance*, unit kerja diwajibkan untuk menginput pada modul *e-planning* yang terdiri dari Sasaran, Indikator, target indikator dan mapping anggaran per indikator pada level Kepala BPOM s.d level eselon II unit kerja pusat, BB/BPOM, dan Loka POM.



Gambar 4. 12 Aplikasi Simetris

Pengembangan *e-performance* tahun 2021 terdiri dari 2 user, yaitu user administrator unit kerja dan administrator rorenkeu. Pada user administrator rorenkeu terdapat menu verifikasi pengisian realisasi IKU setiap unit. Beberapa menu yang ada didalam aplikasi *e-performance*, yaitu:

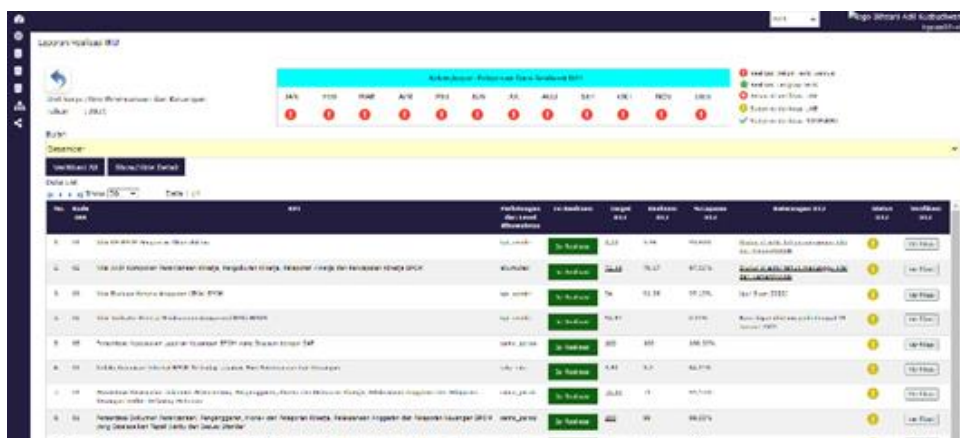
1. Tampilan Muka



Gambar 4. 13 Halaman Muka Aplikasi E-performance

Pada halaman ini akan terlihat informasi terkait *e-performance* dan batas waktu pelaporannya. Selain itu juga akan terlihat menu-menu untuk kehalaman lainnya.

2. Menu Laporan Realisasi IKU



Gambar 4. 14 Menu Laporan Realisasi IKU Aplikasi E-performance

Pada menu Laporan Realisasi IKU, unit kerja melakukan input realisasi kinerja dan verifikasi/keterangan terkait realisasi kinerja pada bulan berjalan kemudian melakukan



verifikasi apabila data yang diinput sudah final. Setelah mengisi realisasi, maka aplikasi akan otomatis melakukan perhitungan capaian kinerja. Pada halaman ini juga akan terlihat indikator dan keterangan kelengkapan pelaporan data realisasi iku yang terdiri dari 5 indikator, yaitu realisasi belum terisi semua, realisasi lengkap terisi, belum di verifikasi UKE, sudah di verifikasi UKE dan sudah di verifikasi RORENKEU.

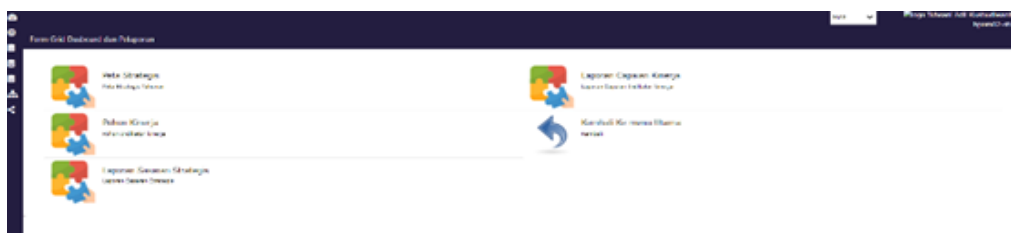
3. Realisasi Anggaran



Gambar 4. 15 Menu Realisasi Anggaran Aplikasi E-performance

Menu Laporan Realisasi Anggaran menampilkan realisasi anggaran bulan berjalan per indikator yang sebelumnya telah dilakukan mapping/tagging di aplikasi e-planning. Data realisasi anggaran berasal dari data DBSAS yang diunggah kedalam e-performance

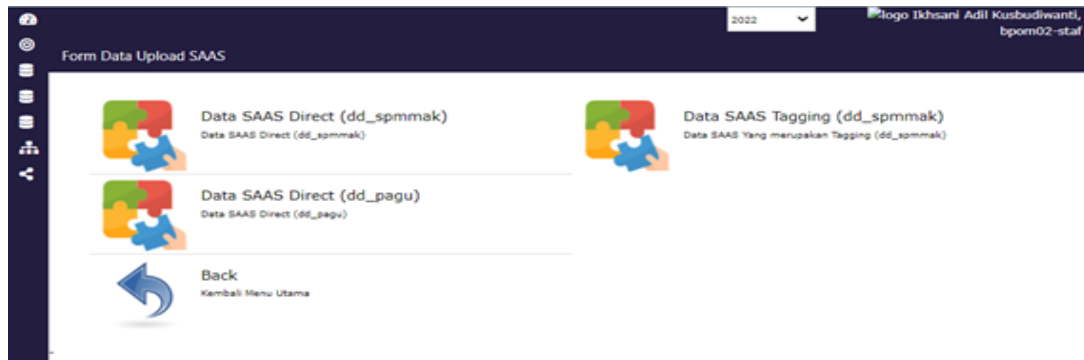
4. Dashboard



Gambar 4. 16 Menu Dashboard Aplikasi E-performance

Pada Menu Dashboard terdapat 4 menu didalamnya yaitu Peta Strategi, Pohon Kinerja, Laporan Sasaran Strategis dan Laporan Capaian Kinerja yang merupakan rangkuman/hasil pengisian yang dilakukan di menu capaian kinerja dan realisasi anggaran.

5. Data SAS



Gambar 4. 17 Menu Data SAS Aplikasi E-performance

Menu ini merupakan fasilitas yang digunakan untuk melakukan upload data DBAS agar realisasi anggaran dapat terupdate setiap bulannya.

c. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program, kegiatan, dan Reformasi Birokrasi

Monitoring dan evaluasi (monev) merupakan bagian dari siklus manajemen yang harus dikembangkan dan dibangun secara terintegrasi dengan sistem perencanaan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memantau kemajuan pelaksanaan program/kegiatan, mendapatkan informasi tentang berbagai masalah yang harus diantisipasi, dan mengidentifikasi upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang telah terjadi. Fokus utama evaluasi diarahkan kepada keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), dan dampak (*impacts*) dari pelaksanaan rencana pembangunan. Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dari suatu program/kegiatan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan; menilai efisiensi, efektifitas, manfaat, dampak, dan keberlanjutan dari suatu program; serta memberi masukan untuk penyempurnaan kebijakan kedepan.

Sampai saat ini, monev di BPOM sedang berusaha untuk dilakukan secara elektronik melalui Aplikasi Badan POM Operasional Center (BOC) dengan beberapa tabel yang terintegrasi melalui Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT). Pelaporan kinerja dari Unit Kerja Pusat dan Balai Besar/Balai POM menggunakan diatur berdasarkan pedoman

monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pada BPOM Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.04.20.132 Tahun 2020 tentang Pedoman Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Lingkungan BPOM. Untuk unit kerja di Pusat, dilakukan pertemuan triwulanan untuk menyampaikan capaian kinerja beserta kendala yang dihadapi. Untuk unit kerja di Pusat, monev dilakukan dengan pelaksanaan pertemuan rutin penanggung jawab data per triwulan.



Gambar 4. 18 Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Triwulan Tahun 2021

Hasil dari pertemuan ini disusun menjadi (1) Laporan Kinerja Dalam Angka Triwulanan; dan (2) Laporan realisasi anggaran, realisasi fisik, hambatan pelaksanaan kegiatan beserta rencana tindak lanjut per triwulan.



Gambar 4. 19 Laporan Kinerja Dalam Angka Triwulanan

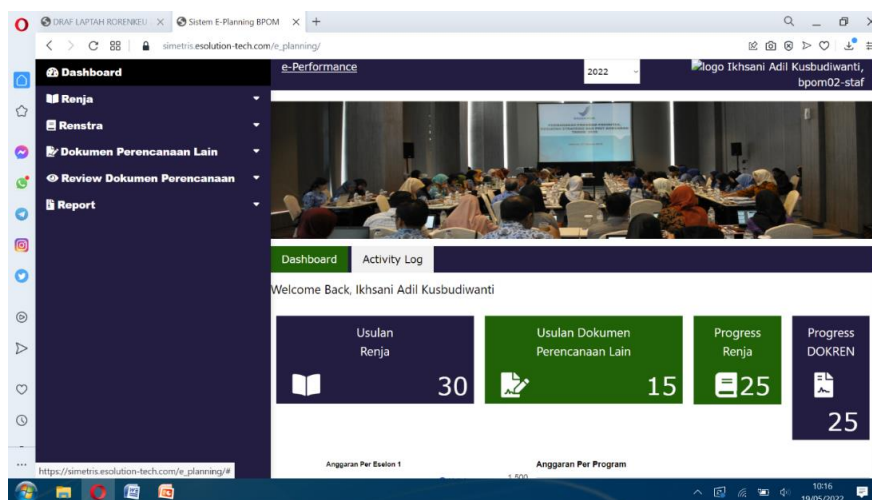
d. Pengembangan aplikasi e-planning SIMETRIS

e-Planning merupakan aplikasi yang dibangun untuk mendukung sistem *bottom-up planning* dan *top down policy* yang efektif dan efisien berbasis Teknologi Informasi sebagai bagian dari pelaksanaan *e-Government*. Pada prinsipnya pembangunan Aplikasi e-planning untuk mempermudah proses Perencanaan Strategis dan Tahunan di BPOM. Sebelumnya, proses permintaan data untuk perencanaan kinerja tahun selanjutnya (n+1) oleh masing-masing unit kerja masih dilakukan secara manual dan proses pengajuannya langsung dilakukan dalam sistem/aplikasi KRISNA Bappenas.

Selain Perencanaan Tahunan, dalam aplikasi ini juga dibangun fitur untuk mengakomodir database Perencanaan strategis, terutama terkait Sasaran, Indikator dan Target 5 tahun serta Manual Indikatornya. Pengembangan aplikasi e-Planning Simetris pada tahun 2021 adalah penambahan modul Rencana Strategis (Renstra) yang memuat pengisian target dalam periode Renstra 2020-2024, menu Manual Indikator Kinerja Utama (Manual IKU) untuk level Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan, penambahan fitur cetak Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK).

1. Tampilan Muka

Setelah melakukan *login* dan memilih modul e-Planning, pengguna memasuki halaman muka e-Planning. Terdapat beberapa pilihan pada *dashboard* modul e-Planning. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

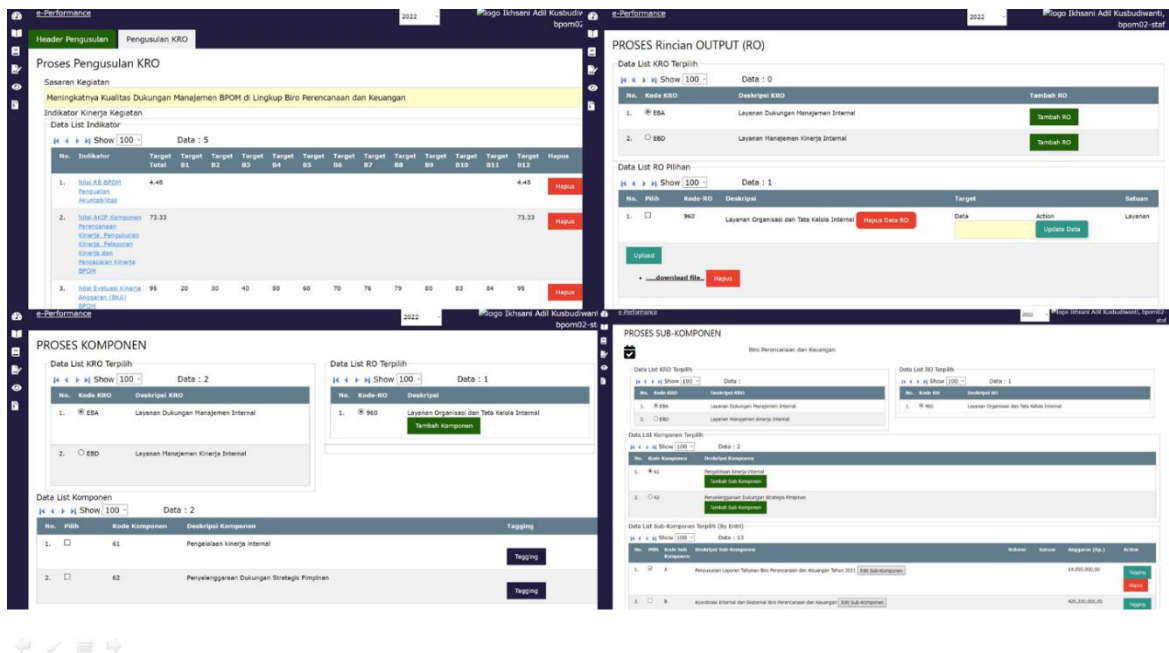


Gambar 4. 20 Tampilan dashboard Aplikasi e-Planning Simetris.

Pada halaman muka ini aplikasi e-Planning Simetris ini memuat *dashboard* yang berisi menu Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis (Renstra), Dokumen Perencanaan Lain (Manual IKU), Reviu Dokumen Perencanaan (Cetak PK dan RAPK), dan Report (*Report Renja, Report Renstra, dan Report Tagging*).

2. Menu Renja

Pada menu Renja, unit kerja melakukan pembuatan pengusulan e-Planning yang dilanjutkan dengan pengisian target indikator kinerja, Klasifikasi Rincian Output (KRO), Rincian Output (RO), Komponen hingga Sub Komponen. Pada Sub Komponen terdapat tombol Verifikasi yang berfungsi untuk mengajukan verifikasi pengisian Renja ke Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan. Untuk isian target pada menu Renja ini akan mengalir ke modul e-Performance, sehingga jika target tidak diisi, maka indikator tersebut tidak muncul di e-Performance.



Gambar 4. 21 Tampilan Menu Renja Sumber: Biro Perencanaan dan Keuangan, 2021

3. Menu Renstra

Pada menu Renstra, pengguna dapat mengisi target kinerja indikator dan anggaran seperti yang tercantum pada dokumen Renstra di masing-masing unit kerja.

No.	Deskripsi	Target					Anggaran				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas	4.9	5.25	5.6	5.66	5.7	1824444550	2068856100	2275741710	2503315881	2753647469
2.	Nilai AKIP Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM	73.25	76.73	81.08	81.93	82.8	9514466800	743692000	818061200	899867320	989854052
3.	Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) BPOM	93	94	95	96	97	191806200	220860000	242946000	267240600	293964660
4.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPOM	94.24	94.87	95.22	95.57	95.92	869918000	1192175000	1311392500	1442531750	1586784925
5.	Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan BPOM yang Disusun dengan SAP	100	100	100	100	100	1114789500	1778634000	1956497400	2152147140	2367361854

Gambar 4. 22 Tampilan Menu Renstra

Sumber: Biro Perencanaan dan Keuangan, 2021.

4. Menu Manual IKU

Menu Manual IKU pada e-Planning berfungsi untuk memasukkan definisi operasional, cara perhitungan, periode pelaporan, validasi, perhitungan capaian IKU dan polaritasnya. Menu ini wajib diisi oleh unit kerja karena jika tidak diisi maka, indikator tersebut tidak muncul di modul e-Performance sehingga capaian atau realisasi IKU nya tidak dapat diisi.

Manual Indikator Kinerja (IKU)

Pencarian Data: Unit Kerja: BPOM02 - Biro Perencanaan dan Keuangan

Form Entri Data: ID-Key (autogenerated): 0000002976

Tanggal: 18/03/2021

Periode Pelaporan: Tahunan

Sasaran Kegiatan (SK): Meningkatkan Kualitas Dukungan Manajemen

Indikator Kinerja (IKU): Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas - (20)

Validasi: KPI Sendiri

Stakeholder: Maximize

Definisi Operasional: reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan menyangkut aspek mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan (organisasi), tata laksana, sumber daya manusia aparatur, peraturan perundang-undangan, dan pelayanan publik. reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), sasaran reformasi birokrasi terdiri atas pemerintah yang efektif dan efisien, pelayanan publik yang baik dan berkualitas, serta pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi. rudi tujuan reformasi birokrasi adalah membangun atau membentuk profil dan perilaku aparatur negara dengan: integritas tinggi; produktivitas tinggi dan bertanggung jawab; dan kemampuan memberikan pelayanan yang prima. pelayanan prima adalah kepuasan yang dirasakan oleh publik sebagai dampak dari hasil kerja birokrasi yang profesional, sasaran rb diwujudkan melalui delapan area perubahan

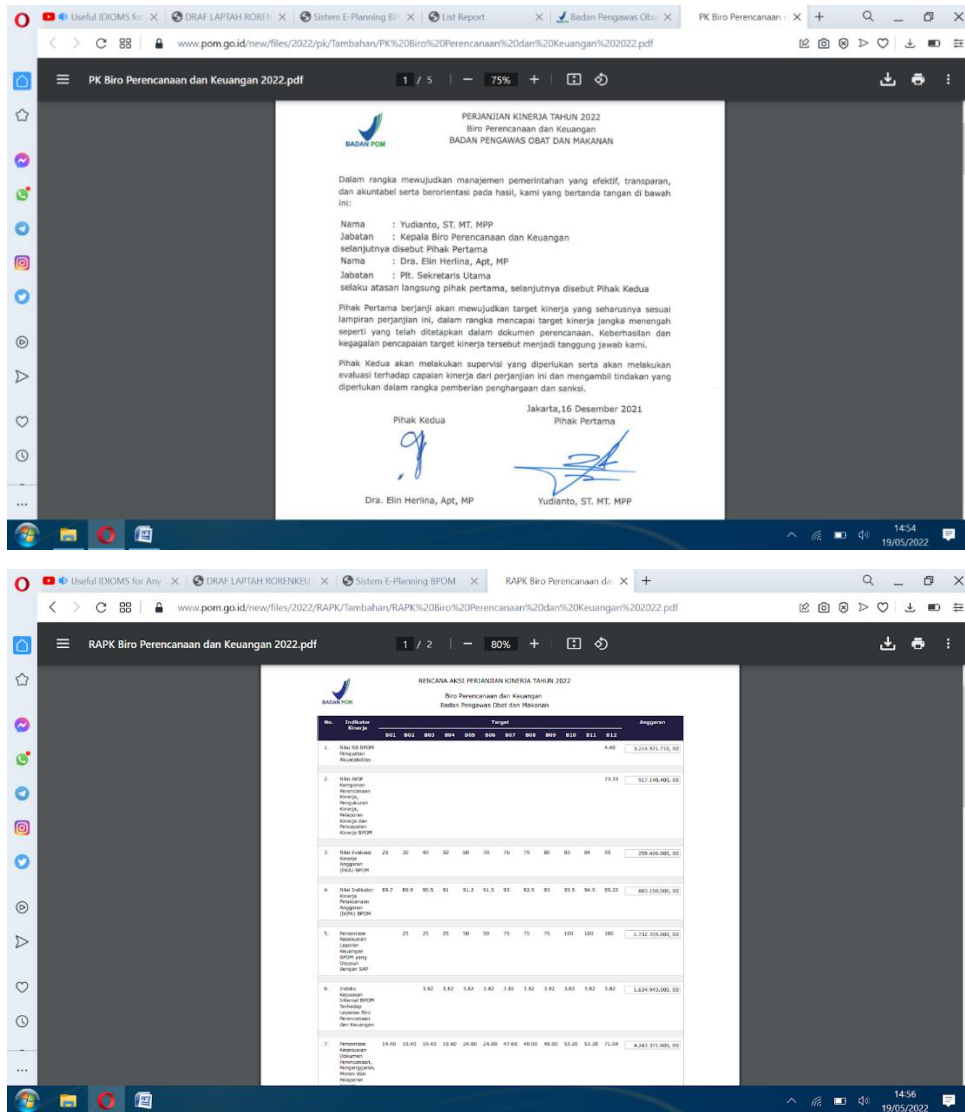
Gambar 4. 23 Tampilan Manual IKU

Sumber: Biro Perencanaan dan Keuangan, 2021.



5. Cetak PK dan RAPK

Pada menu cetak PK dan RAPK, hasil yang dicetak tersebut berasal dari isian menu Renja mulai dari target indikator kinerja hingga anggaran yang diisi pada bagian subkomponen. Unit kerja perlu memastikan bahwa target dan anggaran yang diisikan sudah sesuai dan *balanced*.



Gambar 4. 24 Hasil Cetak PK dan RAPK

Sumber: Biro Perencanaan dan Keuangan, 2021

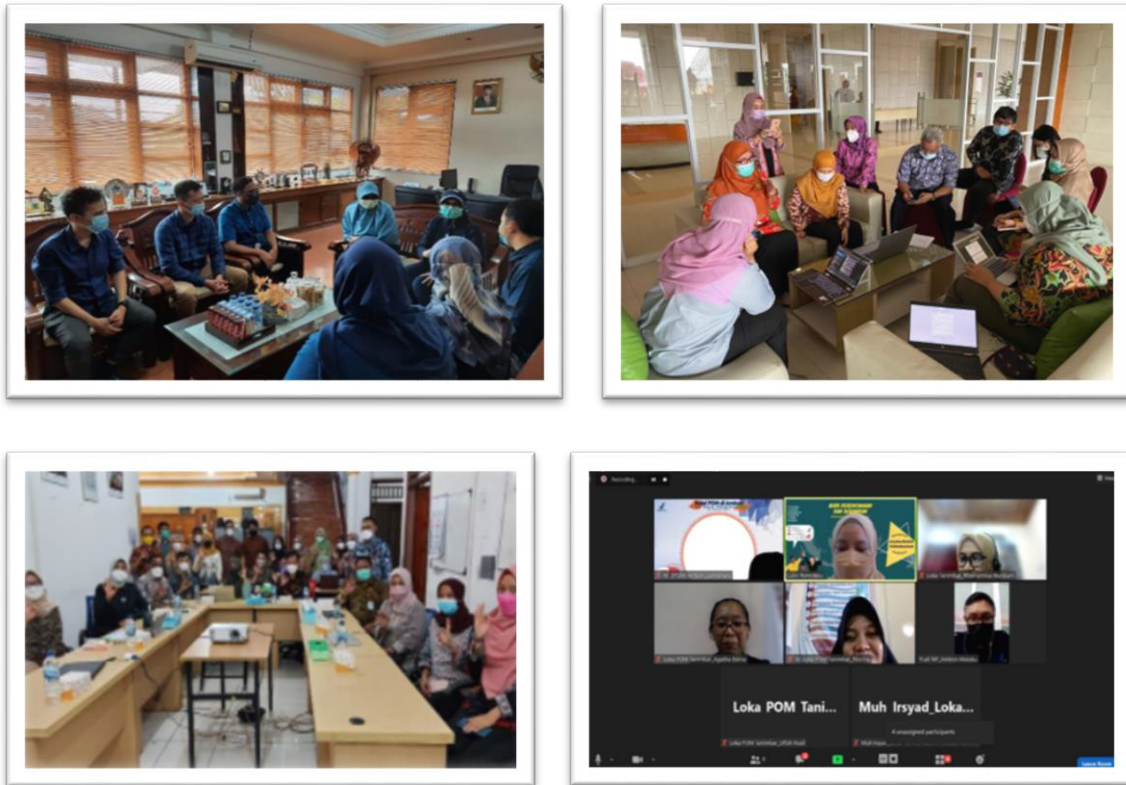
IKU 3: Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) BPOM

Kegiatan-kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan IKU 3 adalah:

a. Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Balai Besar/ Balai POM

Sebagai pengendali pelaksanaan kegiatan, Biro Perencanaan dan Keuangan berkepentingan untuk melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di daerah. Mengingat program Pengawasan Obat dan Makanan tidak didesentralisasikan, maka diperlukan monitoring dan evaluasi dari pusat terhadap program yang dilaksanakan oleh Balai Besar/ Balai POM. Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh petugas pusat merupakan proses pembelajaran bagi Balai Besar/ Balai POM untuk selanjutnya dapat melakukan monitoring secara mandiri sebagai bagian dari Sistem Pengendali Intern.

Pada tahun 2021, Biro Perencanaan dan Keuangan dalam hal ini Kelompok Substansi Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja melaksanakan monitoring dan supervisi ke 33 Balai Besar/ Balai POM dan 15 Loka POM Satker Mandiri dengan metode Luring maupun Daring. Monitoring yang dilakukan meliputi monitoring terhadap realisasi pelaksanaan kegiatan, realisasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, kepatuhan pengisian aplikasi monev *online* bulanan (aplikasi monev SMART DJA, Bappenas, Tepra (LKPP), BOC dan *e-performance*), serta kepatuhan pelaporan manual bulanan (RHPK) dan triwulanan (RAPK). Selain itu juga dilakukan diskusi dengan pejabat struktural dan tim monev dari Balai untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan. Secara keseluruhan permasalahan yang ditemui diantaranya kepatuhan penyampaian kinerja baik secara aplikasi monev *online* maupun manual, pelaksanaan kegiatan yang belum sesuai target rencana aksi, kecermatan input ketika entri data yang berpengaruh terhadap perbedaan data capaian antar aplikasi monev, pemahaman definisi operasional indikator kegiatan, keterbatasan SDM, dan sarana jangkauan internet.



Gambar 4. 25 Dokumentasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan: (A) BBPOM di Surabaya, (B) BBPOM di Samarinda, (C) Loka POM di Bogor, dan (D) Loka POM di Tanimbar

Sasaran Kegiatan 3:

Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan SATKER sesuai pedoman

IKU 7: Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan SATKER terhadap pedoman

b. Rapat Evaluasi Nasional Tahun 2021 di Bandung



Gambar 4. 26 Kegiatan Rapat Evaluasi Nasional Tahun 2021

Rapat Evaluasi Nasional (REN) Badan POM tahun 2021 dilaksanakan pada 23-26 November 2021 di Bandung dengan mengangkat tema “Melalui Evaluasi Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan yang Efektif, Kita Tingkatkan Kinerja Mendukung Peningkatan Daya Saing Bangsa”. Tujuan kegiatan ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan rencana strategis BPOM 2020-2024 serta melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). REN 2021 dilaksanakan secara kombinasi luring yang dihadiri oleh sekitar 240 orang dan daring yang dihadiri oleh pejabat struktural terkait dari Unit Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM. Dalam penyelenggaraan kegiatan ini, Biro Perencanaan dan Keuangan berkoordinasi dengan Balai Besar POM di Bandung.

Kegiatan diawali dengan arahan Kepala BPOM yang sekaligus secara resmi membuka Rapat Evaluasi Nasional BPOM Tahun 2021. Beliau menyampaikan bahwa saat ini Badan POM telah memiliki 34 Balai Besar/Balai POM serta 39 Loka POM di Kabupaten/Kota, dengan penguatan kelembagaan ini Badan POM harus semakin terdepan dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan peningkatan daya saing bangsa melalui kinerja pengawasan efektif yang menjangkau seluruh pelosok negeri.

Pandemi COVID-19 memberi hikmah pentingnya penguatan sistem kesehatan nasional serta tumbuhnya kesadaran individu untuk lebih memperhatikan kesehatan. Badan

POM senantiasa melakukan pengawalan keamanan, mutu, dan khasiat obat dan vaksin untuk penanganan COVID-19 sesuai dengan kaidah yang berlaku secara internasional dengan melibatkan para pakar dan ahli. Pandemi juga menjadi momentum kebangkitan riset dan inovasi tanah air, termasuk inisiatif penelitian dan pengembangan obat dan vaksin COVID-19.

Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan momentum yang baik ini untuk kebangkitan perekonomian nasional. Salah satunya terus menunjukkan keberpihakan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai penggerak perekonomian rakyat dan kekuatan pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi. Badan POM telah dan akan terus mendukung kemudahan berusaha UMKM Indonesia. Di tengah berbagai keterbatasan dan tantangan yang dihadapi oleh UMKM, Badan POM harus berkomitmen terus mengawal dan mengedepankan pembinaan UMKM untuk dapat memenuhi peraturan perundang-undangan.



Gambar 4. 27 Kepala Badan POM, Ibu Penny K. Lukito, memberikan arahan pada Rapat Evaluasi Nasional Badan POM Tahun 2021

Kepala Badan POM juga menyampaikan apresiasi atas peran serta dan kontribusi Unit Kerja yang telah mengharumkan nama Badan POM sehingga meraih berbagai penghargaan. Capaian tersebut merupakan pengakuan atas kerja nyata dan pengabdian seluruh jajaran Badan POM. Melalui kegiatan Rapat Evaluasi Nasional, diharapkan akan

menghasilkan luaran yang implementatif untuk perbaikan perencanaan tahun 2023-2024. Gambar ... Kepala Badan POM, Ibu Penny K. Lukito, memberikan arahan pada Rapat Evaluasi Nasional Badan POM Tahun 2021

Kegiatan dilanjutkan dengan paparan oleh narasumber lintas K/L yaitu Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Dalam Negeri. Agenda berikutnya adalah evaluasi kinerja dari masing-masing eselon I yaitu Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif,

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik; Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan; Deputi Bidang Penindakan; Inspektorat Utama dan Sekretaris Utama. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, masing-masing eselon I kemudian melakukan identifikasi masalah dan menentukan rencana tindak lanjut maupun upaya perbaikan yang diperlukan. Pada sesi Rapat Tinjauan Manajemen ISO 9001:2015, disampaikan bahwa seluruh unit kerja di lingkungan BPOM wajib menerapkan sistem manajemen mutu berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.03.20.96 Tahun 2020 tentang Penerapan Sistem Manajemen Mutu (Quality Management System) BPOM. Seluruh Unit Kerja diharapkan sudah tersertifikasi ISO 9001:2015 pada tahun 2022. Dua unit kerja baru yang akan disertifikasi tahun depan; yakni (1) Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, dan (2) Direktorat Siber Obat dan Makanan.

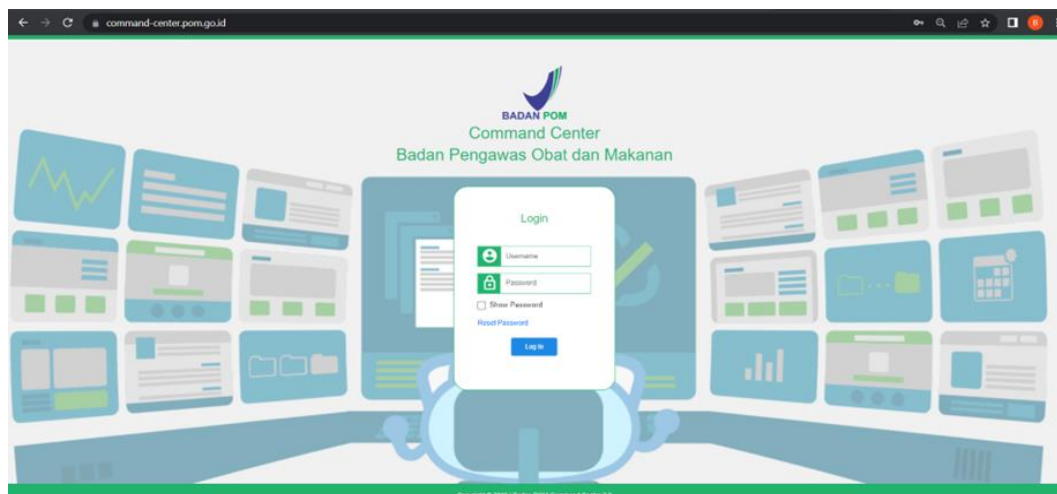
Hasil evaluasi yang diperoleh dalam REN 2021 didokumentasikan dalam Prosiding REN BPOM 2021 dan diharapkan menjadi pertimbangan dalam penyusunan perencanaan BPOM di tahun-tahun berikutnya.

c. Pengembangan Manajemen Kinerja BPOM dengan Pelaporan Capaian Kinerja dan Anggaran Melalui BOC

Pelaporan kinerja dilakukan secara berkala per bulan yang disebut sebagai pelaporan Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK). Pelaporan RHPK dilakukan secara semi elektronik menggunakan *google drive*. Namun demikian, masih ditemukan kendala terkait pelaporan ini dimana data tidak akurat karena masih dimungkinkan terdapat kesalahan pada saat input data dan isu keamanan data. Untuk meminimalkan kendala tersebut, pada tahun 2021 berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor No.HK.02.02.2.21.01.21.04 tanggal 20 Januari 2021 tentang Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Per Bulan (Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan/RHPK) melalui Badan POM Operational Center/BOC, maka pengisian RHPK dapat dilakukan pada aplikasi RHPK BOC dengan alamat <https://command-center.pom.go.id/>.

Data-data yang perlu dilaporkan dalam aplikasi tersebut adalah (1) hasil sampling dan pengujian, (2) pemeriksaan sarana produksi, (3) pemeriksaan sarana distribusi, (4) sertifikasi, (5) tindak lanjut hasil pengawasan, (6) intelijen dan penyidikan, (7) KIE, (8) jenis KIE, (9) pengawasan iklan/label, (10) realisasi anggaran, dan (11) pengendalian pembangunan fisik/rehabilitasi/renovasi gedung. Pelaporan melalui BOC telah terintegrasi dengan aplikasi lain yang ada di BPOM. Untuk data yang tidak ditunjang oleh aplikasi yang ada di BPOM, maka pelaporan dilakukan secara manual pada format di BOC. Selama proses penggunaan sistem tersebut, tidak dapat dipungkiri masih ada beberapa kendala dalam satu tahun berjalannya penggunaan aplikasi. Namun kendala tersebut dapat diatasi dengan baik. Kemudian untuk peningkatan sistem, akan dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Data pelaporan yang telah ada di aplikasi lain yang ada di BPOM tetapi masih belum masuk ke RHPK BOC akan diintegrasikan, sehingga tidak terjadi penginputan dua kali.
2. RHPK BOC akan dalam satu *server* dengan aplikasi Simetris di tahun 2022.



Gambar 4. 28 Aplikasi BOC

d. Bimtek Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis Unit Organisasi/Satker

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan SAKIP di Lingkungan BPOM, Biro Perencanaan dan Keuangan telah melakukan Bimbingan Teknis Penyusunan dan Reviu Renstra Unit Organisasi/Satuan Kerja Tahun 2020-2024 pada tanggal 21-22 Juni 2021 yang merupakan satu kesatuan rangkaian dalam pelaksanaan Bimtek SAKIP dan Monev online. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Unit Kerja baik dalam hal penyusunan Renstra maupun reviu Renstra Unit Organisasi/Satuan Kerja. Adapun pertemuan diikuti oleh perwakilan seluruh Unit Organisasi/Satker di Lingkungan BPOM.



Gambar 4. 29 Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan menyampaikan paparan pembuka pada Bimtek Penyusunan/Reviu Renstra Unit Organisasi/Satker

Kegiatan ini dilaksanakan juga sebagai bagian proses persiapan penyusunan Renstra bagi Loka POM yang telah menjadi Satuan Kerja Mandiri pada Tahun 2021 dan akan menjadi Satuan Kerja Mandiri pada Tahun 2022, di mana sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja wajib menyelenggarakan SAKIP yang salah satunya meliputi Rencana Strategis. Selain itu, bagi Unit Organisasi/Satker yang telah memiliki dokumen Renstra juga perlu melakukan reviu terhadap dokumen Renstranya masing-masing sebagai implikasi terhadap perubahan Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan BPOM maupun adanya perubahan lingkungan strategis.

Pada kegiatan tersebut, untuk memperkaya pemahaman Unit Kerja, selain dilakukan pemaparan mengenai “Reviu Renstra BPOM 2020-2024 dan Penyusunan/Reviu Renstra Unit Organisasi/Satker 2020-2024” oleh Biro Perencanaan dan Keuangan, kegiatan juga dilakukan dengan melibatkan narasumber dari Bappenas serta Kementerian Keuangan. Pada sesi paparan Bapak Pungkas B. Ali, Ph.D selaku Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas, disampaikan mengenai “Revisi Renstra BPOM dan Implikasinya pada RPJMN 2020-2024 dan RKP (Pencapaian Sasaran dan Target Kinerja Pembangunan)”. Selanjutnya pada sesi paparan oleh Bapak Anatyo dari Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas disampaikan terkait “Mekanisme Perubahan Renstra Sesuai Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas”. Sedangkan pada sesi paparan oleh Kementerian Keuangan disampaikan terkait “*Sharing Session* Penyusunan Rencana Strategis 2020-2024 dan Implementasi SAKIP di Kementerian Keuangan”.

Selain hal tersebut di atas, pada pertemuan tersebut juga dilakukan “Diskusi Penyamaan Persepsi Terhadap Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Aspek Perencanaan Kinerja Unit Organisasi/Satuan Kerja di Lingkungan BPOM” antara Inspektorat Utama, Biro Perencanaan dan Keuangan serta seluruh peserta/Unit Kerja yang hadir, sehingga diharapkan pada saat pelaksanaan serta evaluasi AKIP dan Reformasi Birokrasi di tingkat Unit Organisasi, seluruh pihak yang terlibat dapat memiliki cara pandang yang sama dan selaras dalam menyikapi berbagai permasalahan yang seringkali terjadi.

e. **Bimtek Penyusunan PK dan RAPK Unit Organisasi/Satker melalui aplikasi *e-planning* SIMETRIS**



Dalam upaya meningkatkan kualitas Perencanaan Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan, Biro Perencanaan & Keuangan menyelenggarakan BIMTEK Pengisian *e-Planning* SIMETRIS sebagai langkah awal yang harus dilalui dalam proses penyusunan Perencanaan kinerja

yang mencakup sasaran strategis, indikator dan target kinerja. Pada awal tahun perencanaan, proses penghimpunan usulan dari seluruh unit kerja dan unit teknis di Lingkungan BPOM terutama terkait target dan anggaran Rencana Kerja Tahun Anggaran selanjutnya (n+1).



Tujuan diselenggarakannya BIMTEK *e-Planning* ini diharapkan UPT BPOM mampu menguasai prosedur penggunaan aplikasi *e-Planning* SIMETRIS dengan baik sehingga dapat meningkatkan kualitas perencanaan kinerja BPOM berbasis elektronik dan terintegrasi.



Gambar 4. 30 Bimtek Penyusunan PK dan RAPK melalui Aplikasi *e-Planning* Simetris

f. *Workshop* Jabatan Fungsional Perencana di Lingkungan BPOM

Kegiatan *Workshop* Jabatan Fungsional Perencana (JFP) BPOM diselenggarakan pada tanggal 28-30 September 2021 di Hotel Grand Mercure Kemayoran Jakarta. Peserta workshop adalah Pejabat Fungsional Perencana yang ada di Unit Pusat dan Balai Besar/Balai POM. Sesuai Permenpan RB No. 4 Tahun 2020, dalam mengerjakan tugas-tugasnya, seorang perencana harus memiliki kemampuan teknis dalam melaksanakan tugas di bidang perencanaan pembangunan. Kemampuan teknis yang dimaksud adalah untuk menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan. Workshop Perencana bertujuan meningkatkan aspek profesionalisme dan kemampuan teknis perencana dalam mengerjakan tugas-tugas perencanaan di BPOM.



Gambar 4. 31 Workshop Jabatan Fungsional Perencana (JFP) BPOM.

Pertemuan diawali dengan sambutan dan arahan dari Bapak Yudianto, ST. MT. MPP selaku Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM. Selanjutnya, sesi pertama diisi oleh pemaparan dari Mohammad Iksan Maolana, SH., L.LM dari Bappenas yang membahas

tentang penyelenggaraan Jabatan Fungsional Perencana (JFP) yang sesuai dengan Permenpan RB No.16 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Perencana. Pemaparan selanjutnya dilakukan oleh Bapak Rendy R. Wrihatnolo dan Bapak M. Tomtom Makmur dari Bappenas tentang Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Lampiran SKP. Pemaparan terakhir dari Ibu Dety Nurfadilah, MBA dan Ibu Liza Agustina yang menyampaikan materi teknis dan simulasi penulisan *Policy Paper* dan *Policy Brief*.

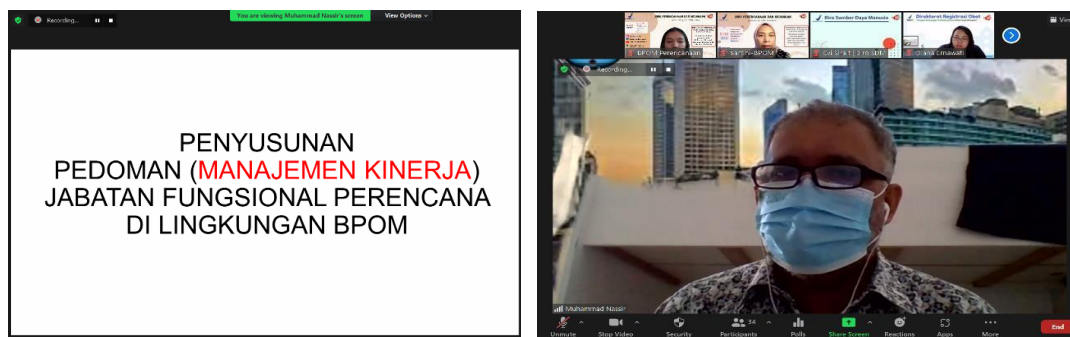
Output yang dihasilkan dari kegiatan workshop ini adalah peserta memahami tata kelola penyelenggaraan kegiatan perencanaan pembangunan, penunjang, dan pengembangan profesi. Peserta juga mampu menyusun SKP beserta lampirannya yang nyata dan terukur produktivitasnya, serta mampu menuangkan pekerjaan dalam bentuk laporan kegiatan perencana dan dapat dinilai sebagai angka kredit. Narasumber juga menyarankan agar BPOM bisa segera menyusun Tim Penilai Internal untuk menilai angka kredit Perencana.



Gambar 4. 32 Workshop Jabatan Fungsional Perencana (JFP) BPOM

e. Penyusunan Pedoman Jabatan Fungsional Perencana di Lingkungan BPOM

Seiring dengan bertambahnya jumlah Jabatan Fungsional Perencana (JFP) di BPOM, para Perencana harus dibina dan difasilitasi dalam pelaksanaan tugas, fungsi, serta karirnya sehingga mampu mendorong kinerja organisasi secara optimal. Untuk itu diperlukan seperangkat aturan/tata cara bekerja untuk JFP BPOM seperti Petunjuk Teknis (Juknis), baik dalam pelaksanaan tugas maupun penilaiannya. Kegiatan Diskusi Terkait Penyusunan Petunjuk Teknis JFP di BPOM dilaksanakan pada tanggal 25-26 dan 28 Oktober 2021 secara *daring*. Peserta diskusi adalah para Perencana yang ada di Unit Pusat dan Balai Besar/Balai POM.



Gambar 4. 33 Penyusunan Pedoman Manajemen Kinerja Jabatan Fungsional Perencana di Lingkungan BPOM

Narasumber pada diskusi ini adalah Bpk. Muhammad Nassir dan Bpk. Ivan Budi Susetyo dari Kementerian PPN/Bappenas. Dari hasil diskusi, disepakati untuk mengganti kata “*Petunjuk Teknis*” menjadi kata “*Pedoman*”, sehingga judul yang disepakati adalah “*Pedoman Manajemen Kinerja Jabatan Fungsional Perencana di Lingkungan BPOM*”. Rancangan pedoman teknis JFP di BPOM akan memuat isi sebagai berikut: 1) Mekanisme penjabaran Renstra-IKU dan Perjanjian Kinerja; 2) Penetapan Produk Kegiatan Perencana di lingkungan BPOM; 3) Cascading Produk Kegiatan Perencana di lingkungan BPOM; 4) Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perhitungan Angka Kredit; 5) Mekanisme penilaian angka kredit oleh Tim Penilai Angka Kredit BPOM; dan 6) Template laporan bagi perencana di lingkungan BPOM. Rencana tindaklanjut dari diskusi ini adalah finalisasi draft Pedoman Manajemen Kinerja JFP dan pembahasan kriteria Tim Penilai Angka Kredit BPOM.

IKU 4: Nilai Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) BPOM

Kegiatan-kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan IKU 4 adalah:

a. Koordinasi, Evaluasi dan Verifikasi Tagihan Belanja Badan POM

Kegiatan Koordinasi, Evaluasi dan Verifikasi Tagihan Belanja ini bertujuan untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian tagihan dari Satker yang ada di BPOM oleh pejabat penguji SPP/SPM sesuai dengan ketersediaan anggaran dan ketentuan yang berlaku. Dengan kegiatan ini diharapkan terjaminnya seluruh proses administrasi dan dokumen pertanggungjawaban anggaran melalui pemeriksaan dan pengujian yang didasarkan pada standard dan peraturan pelaksanaan anggaran. Pejabat Penerbit SPM, yang melaksanakan pengujian atas setiap tagihan (SPP), mempunyai tugas sangat berat, mengingat disanalah palang pintu terakhir penggunaan anggaran pada masing-masing kantor/satuan kerja dilakukan. Metodologi pelaksanaan dengan melakukan verifikasi terhadap tagihan belanja BPOM atas setiap dokumen administrasi pertanggungjawaban anggaran yang diajukan oleh unit kerja yang ada di Satker Sekretariat Utama, dan evaluasi mingguan pada setiap dokumen pembayaran (SPM) yang telah dikeluarkan. Dalam pelaksanaan Evaluasi dan Verifikasi SPP dan SPM dilakukan oleh Pejabat Penguji Tagihan.

Dalam kegiatan pelaksanaan verifikasi tagihan belanja BPOM juga dilakukan rekonsiliasi data realisasi anggaran setiap unit kerja yang ada di satuan kerja Sekretariat Utama. Rapat koordinasi dengan para pengelola keuangan yang dilakukan setiap satu bulan sekali dengan tujuan untuk mengetahui berbagai kendala yang dihadapi oleh unit kerja dalam pelaksanaan pencairan anggaran dan rekon terhadap data realisasi unit kerja. Dalam kegiatan ini juga dilaksanakan pertemuan atau sosialisasi terhadap peraturan terbaru yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan.

b. Pembinaan Pelaksanaan Anggaran

Belanja pemerintah saat ini selain diharapkan dapat memberi *multiplier effect* perekonomian nasional juga harus diperhatikan kualitasnya. Oleh sebab itu, selaku

pemegang otoritas pelaksanaan anggaran sekaligus pembina Satker K/L di bidang perbendaharaan negara, Ditjen Perbendaharaan berinisiatif melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan anggaran yang lebih intensif dari tahun-tahun sebelumnya. Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui pengukuran kinerja K/L dalam 13 indikator kinerja anggaran yang didasarkan pada aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan, kepatuhan terhadap regulasi (*compliance*), efektivitas pelaksanaan anggaran, dan Efisiensi pelaksanaan anggaran. Hasil monev pelaksanaan anggaran akan diapresiasi oleh Ditjen Perbendaharaan dalam bentuk memberikan penghargaan kepada kementerian dan lembaga dengan kinerja anggaran terbaik. Hal ini untuk mendorong penyerapan tingkat anggaran yang sehat dan diharapkan juga bisa membantu pola penyerapan anggaran di tiap kementerian lembaga lebih merata di sepanjang tahun sesuai perencanaan, sehingga menyehatkan "*cashflow*" kas pemerintah dan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi.

Pengukuran kinerja evaluasi pelaksanaan anggaran dalam 13 indikator kinerja mencerminkan aspek-aspek sebagai berikut:

- Aspek kesesuaian dengan perencanaan dengan indikator : revisi DIPA, deviasi Halaman III DIPA dan Pagu Minus;
- Aspek kepatuhan terhadap regulasi dengan indikator: penyampaian Data Kontrak, Pengelolaan UP dan TUP, Rekon LPJ Bendahara dan Dispensasi SPM;
- Aspek efektivitas pelaksanaan kegiatan dengan indikator: retur SP2D, penyerapan anggaran, capaian output, penyelesaian tagihan; dan
- Aspek efisiensi pelaksanaan kegiatan dengan indikator: perencanaan kas satker dan penolakan/kesalahan SPM.

Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Pengawas Obat Dan Makanan. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja adalah rangkaian aktivitas terintegrasi dalam rangka mereviu, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran belanja pada kementerian negara/lembaga. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran:

- melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga untuk menjamin efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi penggunaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran.
- menggunakan hasil monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran belanja oleh Menteri Keuangan selaku BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran;
 - b. pengendalian belanja negara; dan
 - c. peningkatan efisiensi anggaran belanja.

Untuk mempertegas Peraturan Pemerintah tersebut, Menteri Keuangan menerbitkan PMK Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga dimana masing-masing Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna Anggaran diberi amanat untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas APBN secara berkala dan menyeluruh sesuai periode dan aktivitasnya. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran dengan melihat sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

c. FGD IKPA dan Indikator Capaian Output

Dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja, capaian output merupakan salah satu ukuran untuk menilai bagaimana setiap anggaran yang dikelola dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, sebagai bentuk dari transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, dibutuhkan data dan informasi yang reliabel untuk mengukur perkembangan output belanja yang dikelola oleh Satker sehingga dapat diketahui sejauh mana program dan kegiatan pemerintah telah mencapai sasaran yang ditetapkan. Hal tersebut penting untuk menentukan langkah antisipatif apa yang perlu dilakukan agar setiap target output dapat tercapai pada akhir periode, serta sebagai langkah evaluasi untuk merumuskan kebijakan di masa mendatang. Namun sejauh ini, isu terkait validitas data masih menjadi permasalahan

yang perlu ditindaklanjuti segera, mengingat penerapan penganggaran berbasis kinerja telah diinisiasi sejak berlakunya paket undang-undang keuangan negara.

Tantangan berikutnya adalah bagaimana mengawal partisipasi dan kualitas pelaporan data capaian output seiring dengan implementasi Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) yang mulai efektif dilaksanakan di tahun 2021. RSPP sejatinya dapat mendorong terwujudnya belanja yang berkualitas, lebih baik (*spending better*), dan sesuai dengan tata kelola yang baik (*good governance*), melalui 1) implementasi kebijakan *money follow program*, (2) penguatan penerapan anggaran berbasis kinerja, (3) penyesuaian rumusan Program dan Kegiatan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, (4) dan penyesuaian rumusan nomenklatur Program, Kegiatan, Keluaran (Output) Kegiatan yang mencerminkan “*real work*” (konkret).

Terkait dengan pelaporan data capaian output, salah satu implikasi dari penerapan RSPP adalah perubahan struktur anggaran juga perubahan rumusan output yang dibedakan menjadi Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO). Output riil yang dihasilkan oleh Satker berada pada level RO yang menempati level data yang lebih detail yakni pada level suboutput.

Berbagai perubahan dan perbaikan tersebut tentunya harus diikuti dengan peningkatan pemahaman dari Satker terkait proses bisnis serta teknis pengoperasian sistem aplikasinya. Untuk itu, diperlukan FGD terkait Capaian Output. Kegiatan ini bekerja sama dengan Kementerian Keuangan. Peserta adalah atau Pejabat perbendaharaan yang dipersiapkan dan atau yang sudah bertugas dalam pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan yang berasal dari seluruh satuan kerja dilingkungan Badan POM. FGD IKPA Tahun 2021 telah dilaksanakan di Hotel Harris, Kelapa Gading, Jakarta tanggal 24 Mei 2021 dengan mengundang Para Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Badan POM.

Maksud dan Tujuan

1. Memberikan pemahaman kepada pengelola keuangan khususnya PPK dalam menentukan metode perhitungan capaian output.
2. Meningkatkan nilai Indikator Kinerja Capaian Output Satuan Kerja di lingkungan Badan POM yang berdasarkan hasil monitoring penilaian IKPA BPOM indikator Capaian Output memperoleh nilai terendah dari 13 Indikator lainnya.

IKU 5: Persentase kesesuaian Laporan Keuangan BPOM yang disusun dengan SAP

Kegiatan-kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan IKU 5 adalah:

a. Workshop SAKTI Modul Pelaksanaan

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Kementerian Keuangan telah membangun Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) untuk mendukung implementasi aplikasi SPAN (Sistem Pengelolaan Anggaran Negara). Penerapan SAKTI didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 223/PMK.05/2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang Pelaksanaan Piloting SAKTI, sebagaimana terakhir telah diubah dengan PMK nomor 159/PMK.08/2018 tanggal 14 Desember 2018, dan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-51/PB/2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Roll Out SAKTI Tahun 2021.

Melalui penggunaan SAKTI ditargetkan terjadinya integritas sistem dan data antara Bendahara Umum Negara (BUN) dengan data K/L sehingga efektivitas dan efisiensi belanja negara dapat tercapai.

Menyusul penerapan modul anggaran pada tahun 2021 yang lalu, Modul Pelaksanaan dan Pelaporan SAKTI akan diimplementasikan ke seluruh satker K/L, termasuk BPOM mulai awal Tahun 2022. Pelaksanaan roll out SAKTI tersebut dimulai dengan penyampaian SPM Gaji Induk Bulan Januari 2022 pada Desember 2021 yang dihasilkan dari SAKTI.

Dalam implementasi SAKTI akan dilibatkan banyak SDM yang melaksanakan aktivitas pengelolaan keuangan mulai dari penganggaran, pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban serta pelaporan. Mempertimbangkan bahwa keberhasilan implementasi pengelolaan keuangan negara perlu didukung oleh user yang berkompeten, maka menindaklanjuti End User Training (EUT) SAKTI yang telah diselenggarakan oleh KPPN mitra masing-masing Satker, Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan inisiatif strategis berupa Workshop SAKTI.

Workshop SAKTI yang dilaksanakan oleh BPOM kali ini, selain sebagai langkah persiapan penerapan modul pelaksanaan yang difokuskan pada Modul Bendahara, Modul Komitmen, dan Modul Pembayaran, dirancang juga sebagai forum koordinasi dan komunikasi antar peran dalam setiap Satker.

b. Pelaksanaan Bimtek Sistem Akuntansi Instansi dan Penyusunan Laporan Keuangan (Pusat dan Balai)

Biro Perencanaan dan Keuangan merupakan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan bimbingan terhadap pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Bimbingan Teknis SAI dan Penyusunan Laporan Keuangan adalah untuk memberikan pemahaman kepada petugas pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) agar terdapat kesamaan pemahaman dan keterpaduan langkah-langkah pada semua Satuan Kerja Di Badan POM yang terlibat dalam pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan meliputi:

Memberikan kesamaan persepsi tentang pelaksanaan penyusunan Laporan

Keuangan Satker;

Memberikan pengayaan kepada Satuan Kerja tentang teknis pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Perbaikan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja.

Tujuan dilaksanakannya dari kegiatan ini adalah :

1. Memberikan kesamaan Persepsi serta kesamaan pemahaman dan keterpaduan langkah-langkah pada semua Satuan Kerja di Badan POM yang terlibat dalam penyusunan Laporan Keuangan.

2. Tertibnya pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan di Badan POM sebagai wujud pertanggungjawaban yang tertib, dan taat pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Merupakan kegiatan prioritas yang mendukung kemadirian balai melalui penyusunan Laporan Keuangan yang sesuai Standar PSAP.

Metode pelaksanaan Bimbingan Teknis SAI dan Penyusunan Laporan Keuangan ini adalah:

1. Memberikan bimbingan teknis kepada pelaksanaan penyusun Laporan Keuangan Satuan Kerja berupa materi-materi yang terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan
2. Melakukan analisa terhadap Laporan Keuangan yang di susun oleh Satuan kerja yang di bina
3. Menelusuri kebenaran dokumen sumber yang telah di input
4. Memastikan bahwa rekonsiliasi internal dan eksternal telah dilakukan dengan benar.

Bimbingan Teknis SAI dan Penyusunan Laporan Keuangan ini di laksanakan dengan mengirimkan 2 (dua) orang petugas pusat ke Satuan Kerja di Seluruh Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia. Selama tahun 2020, kegiatan ini dilaksanakan di 13 (tiga belas) Satker.

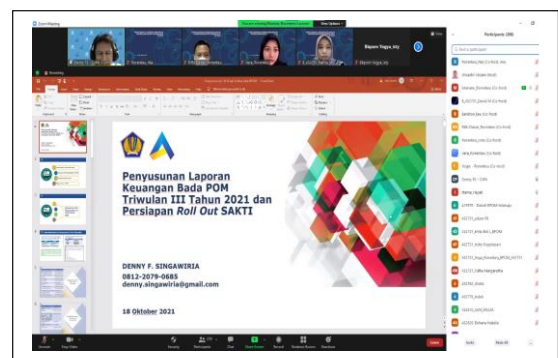
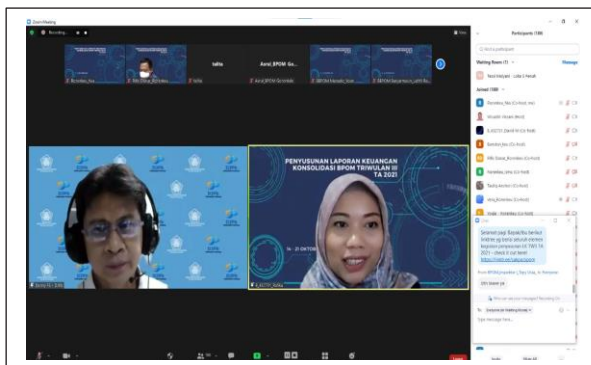
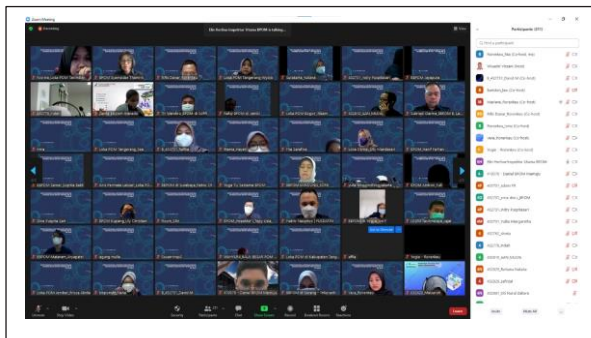
c. Penyusunan Laporan Keuangan BPOM

Badan POM sebagai lembaga negara yang akuntabel memiliki kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan secara berjenjang mulai dari tingkat UAKPA sampai dengan tingkat UAPA, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas PMK Nomor 177/ PMK.05/2015 tentang Pedoman dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Dengan adanya pandemi covid-19 yang mengubah sebagian besar proses bekerja, Badan POM tentunya tetap berusaha tanggap dan tepat waktu dalam melaksanakan tugas fungsinya. Untuk memenuhi target tersusunnya Laporan Keuangan Badan POM

Triwulan III TA 2021 yang selambat-lambatnya disampaikan ke Kementerian Keuangan dan BPK pada 1 November 2021 nanti, Biro Perencanaan dan keuangan menyelenggarakan kegiatan “Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi Triwulan III Tahun Anggaran 2021” yang berlangsung secara virtual pada 14 – 21 Oktober 2021.

Dalam kegiatan ini Bapak Denny F. Singawiria selaku Kasubdit Bimbingan Akuntansi Instansi dan Bendahara Umum Negara turut menyampaikan materi terkait Penyusunan Laporan Keuangan dan Persiapan Roll out SAKTI. Kegiatan ini dihadiri oleh petugas dari 58 satuan kerja yang merupakan Tim SAIBA, Persediaan, SIMAK, Tim Reviu dari Inspektorat dan pengelola keuangan lainnya.



d. Pengelolaan PNBP Fungsional dan Penyusunan Laporan PNBP Badan POM

Pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam pelayanan, pengaturan, perlindungan masyarakat, kepastian hukum, dan pengelolaan kekayaan negara, termasuk pemanfaatan sumber daya alam, dapat mewujudkan suatu bentuk penerimaan negara yang disebut sebagai PNBP. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), PNBP didefinisikan sebagai pungutan yang



dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Seperti Penerimaan Negara pada umumnya, sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak juga membutuhkan sebuah sistem pencatatan untuk mendukung akuntabilitas pengelolaannya. Pencatatan terhadap transaksi penerimaan sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak dilakukan oleh dua pihak, yaitu oleh pihak Instansi Pemerintah pemungut PNPB dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara melalui Sistem Akuntansi Umum (SAU).

Untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib setor dalam melakukan pembayaran ke kas negara atas semua jenis setoran, pemerintah telah menyiapkan modul penerimaan negara (MPN) yang menggantikan sistem penerimaan yang lama (SISPEN, MP3, dan EDI). MPN adalah modul penerimaan yang memuat serangkaian prosedur mulai dari penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan negara dan merupakan bagian dari sistem perbendaharaan negara dan Anggaran Negara. Dengan diimplementasikannya MPN ini diharapkan :

- peningkatan validitas nilai penerimaan negara ;
- Peningkatan akuntabilitas penerimaan negara;

Salah satu bagian dari sistem MPN adalah Sistem Informasi PNPB Online (SIMPONI), dimana merupakan sistem billing yang dikelola oleh DJA untuk memfasilitasi pembayaran PNPB dan penerimaan non anggaran. SIMPONI memberi kemudahan bagi Wajib Bayar untuk membayar PNPB dan penerimaan non anggaran melalui berbagai channel pembayaran seperti teller (Over The Counter), ATM (Automatic Teller Machine), EDC (Electronic Data Capture), maupun internet banking. Dengan demikian, masyarakat bebas memilih berbagai alternatif metode pembayaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Sedangkan terkait penatausahaan PNPB, DJPB telah membangun Aplikasi SPAN. Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) adalah sebuah

sistem yang dirancang dengan mengintegrasikan proses penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan keuangan Negara sehingga diperoleh laporan keuangan akurat yang melalui proses akuntabel dan transparan. SPAN digunakan untuk mendukung pengelolaan Keuangan Negara dalam lingkup Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Anggaran. Oleh karena itu, untuk mendukung data SPAN dalam rangka akuntabilitas laporan keuangan, pengembangan Sistem Aplikasi PNBPN Satker menjadi begitu penting. Untuk itu, Badan POM telah membangun Sistem Penerimaan PNBPN Fungsional Badan POM yang telah terintegrasi dengan SIMPONI dan SPAN dalam bentuk Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan PNBPN Fungsional Badan POM.

e. FGD Laporan Keuangan BPOM

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pembuatan Laporan Keuangan dilakukan oleh masing-masing UAKPA. Selanjutnya laporan keuangan tersebut akan di konsolidasikan oleh UAPA menjadi Laporan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 1 Tahun 2004, laporan keuangan yang wajib disusun dan disajikan oleh pemerintah pusat/daerah setidaknya meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, Laporan Operasional dan catatan atas laporan keuangan. Kewajiban penyusunan dan penyajian laporan keuangan ini dilaksanakan secara berjenjang mulai dari kepala satuan kerja selaku kuasa pengguna anggaran, menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran, sampai dengan Presiden selaku kepala pemerintahan yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa laporan keuangan.

Periode pelaporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor 065/PB/2010 adalah laporan keuangan Semester dan Laporan Keuangan Tahunan. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan ini bertujuan agar laporan keuangan yang merupakan wujud pertanggungjawaban Menteri/Kepala Lembaga atas anggaran negara yang telah digunakan dapat tersusun secara akurat, handal dan akuntabel.

Metodologi pelaksanaan kegiatan FGD dan Workshop Laporan Keuangan Badan POM ini adalah dengan melakukan rapat di Kantor dan pertemuan rapat di dalam Kota Jakarta maupun rapat melalui media daring. Pelaksanaan Kegiatan diikuti oleh seluruh staf Bagian Keuangan, Staf dari Sub Bagian Penatausahaan Barang Milik Negara, Inspektorat Utama BPOM, dan Pembina dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Kementerian Keuangan.

Sasaran Kegiatan 2:

Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan

Biro Perencanaan dan Keuangan

IKU 6: Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro Perencanaan dan Keuangan

Kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan IKU 6 adalah:

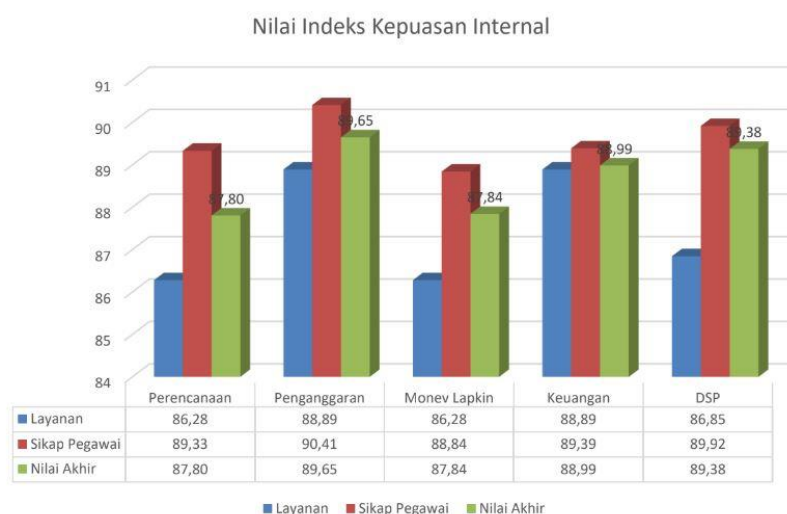
a. Survei kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan

Biro Perencanaan dan Keuangan merupakan unit kerja eselon II di bawah Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM No. 21 Tahun 2020 pasal 12, Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perencanaan, penyusunan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja, dan pengelolaan keuangan, serta koordinasi bahan substansi strategis pimpinan. Fungsi yang diselenggarakan untuk melaksanakan tugas tersebut yaitu:

- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara;
- c. penyiapan koordinasi dan pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri;
- d. penyiapan koordinasi dan pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pengelolaan kinerja organisasi di lingkungan BPOM;
- e. penyiapan koordinasi bahan substansi strategis pimpinan;
- f. penyiapan koordinasi dan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Salah satu Sasaran Kegiatan di Biro Perencanaan sesuai dengan Revisi Renstra Biro Perencanaan dan Keuangan 2020-2024 yaitu Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan dengan indikator kinerja Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan. Oleh karena itu pada tahun 2021 Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan survei kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan.

Hasil survey evaluasi Kepuasan Pelayanan Internal di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2021. Layanan yang dimaksud merujuk pada Nilai Indeks Kepuasan Layanan Internal Unit Biro Perencanaan dan Keuangan ini diperoleh dari rata-rata jumlah nilai indeks dari lima Substansi. Layanan yang dimaksud merujuk pada Peraturan Kepala Badan POM No. 21 Tahun 2020 pasal 12.



Gambar 4. 34 Hasil Survey Internal Kepuasan Pelayanan Tahun 2021



Sebagaimana Gambar 4.23 merupakan laporan hasil survey, dari laporan tersebut dapat disimpulkan Nilai Akhir Indeks Kepuasan Layanan Biro Perencanaan dan Keuangan adalah **88,73** (Delapan puluh delapan koma tujuh puluh tiga) dalam hal ini masuk dalam kategori **SANGAT BAIK**. Adapun, Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro Perencanaan dan Keuangan yang dihimpun oleh Inspektorat pada aplikasi SAPA-APIP pada Tahun 2021 adalah **3,42** (Tiga koma empat puluh dua)

*Gambar 4. 35 Laporan Hasil Survey
Kepuasan Layanan Tahun 2021*

Sasaran Kegiatan 3:

Meningkatnya Kualitas Dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan SATKER sesuai pedoman

IKU 7: Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan satker terhadap pedoman

Kegiatan-kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan IKU 7 adalah:

a. Asistensi Penyusunan Perencanaan Kinerja BPOM

Perubahan Organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan BPOM No. 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM berimplikasi terhadap perubahan/revisi Rencana Strategis BPOM Tahun 2020-2024 salah satunya adalah terkait perubahan sasaran strategis dan indikator kinerja BPOM, mulai dari level



Gambar 4. 36 pelaksanaan diskusi penyusunan peta strategi level 0, I dan II di Lingkungan BPOM

organisasi paling tinggi (lembaga) dan unit kerja di bawahnya. Untuk itu, pada tahun 2021 dilakukan reviu terhadap peta strategi Level 0, 1 dan 2 di Lingkungan BPOM sesuai OTK baru, utamanya pada unit kerja yang terdampak langsung terhadap perubahan struktur organisasi

tersebut. Hal ini juga bertujuan untuk memastikan keselarasan sasaran strategis antar unit kerja dan konsistensi cascading sasaran dan indikator. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 20 dan 23 November serta 1 Desember 2021 dilakukan pembahasan peta strategi Level 0, I dan II di Lingkungan BPOM mengacu OTK baru tersebut.

b. Pemantapan Mekanisme Penganggaran di BB/BPOM

Kegiatan Pemantapan Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran di Balai Besar/Balai POM dilakukan melalui kegiatan visitasi/kunjungan asistensi penganggaran dan asistensi penyusunan RKA-K/L di beberapa Balai Besar/Balai POM serta Loka POM yang diidentifikasi membutuhkan asistensi lebih lanjut, yaitu Balai Besar/Balai POM di Bandung, Serang, Denpasar, Banjarmasin, Pontianak, Balikpapan, Yogyakarta, Semarang serta asistensi ke Loka POM di Tasikmalaya, Tangerang, Bogor, Tarakan, Banyumas, Labuan Bajo, Banyumas, Surakarta pada rentang waktu April hingga Oktober 2021.

Tujuan dari dilaksanakannya asistensi adalah melakukan verifikasi dan *rapid appraisal* terhadap usulan BB/Balai POM dan Loka POM terkait rencana kerja dan anggaran di



2022 baik yang sudah termuat dalam RKA-K/L maupun belum tertampung dalam RKA-K/L 2022. Pendampingan/asistensi RKA-K/L maupun asistensi penganggaran kepada unit Balai Besar/Balai POM dan Loka POM dilaksanakan oleh pejabat/staf dari Substansi Penganggaran ke Balai Besar/Balai POM dan Loka POM selama 2 sampai 3 hari per kunjungan.

c. Supervisi Penganggaran Bersama Instansi Terkait

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, yang merupakan salah satu fungsi yang dimiliki oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), DPR-RI selalu melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap berbagai kebijakan dan program yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Pemerintah. Kegiatan ini antara lain bertujuan untuk meninjau dan mendapatkan gambaran secara komprehensif tentang permasalahan masyarakat dan memonitor pelaksanaan program Instansi/Badan mitra kerja Komisi IX DPR RI atau kunjungan kerja spesifik dalam rangka peninjauan pelaksanaan Pengawasan Makanan pada Bulan Ramadhan dan menjelang Lebaran Idul Fitri dan peninjauan kasus spesifik lainnya antara lain Pengembangan Bahan Baku Obat dan Obat Tradisional dan kunjungan kerja Panja RUU Pengawasan Obat dan Makanan.

Kegiatan ini merupakan pendampingan kunjungan kerja Anggota Komisi IX oleh pejabat Eselon II di BPOM. Kegiatan ini dilakukan sejumlah 26 kali yang dilaksanakan pada rentang waktu Januari hingga Oktober 2021.

d. Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran

Dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahun anggaran 2022, BPOM telah melewati beberapa tahapan dalam siklus perencanaan dan penganggaran. Saat ini terdapat Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-6/AG/2021 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L TA dan Pengesahan DIPA. Untuk itu, K/L menyusun RKA-K/L TA 2022 dengan mengacu pada Renja K/L tahun 2022, RKP tahun 2022, standar biaya TA 2022, Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L TA 2022, serta kesepakatan kegiatan terpadu pusat dan UPT. Mengingat waktu yang sangat sempit dan terbatas tersebut, maka telah dilakukan

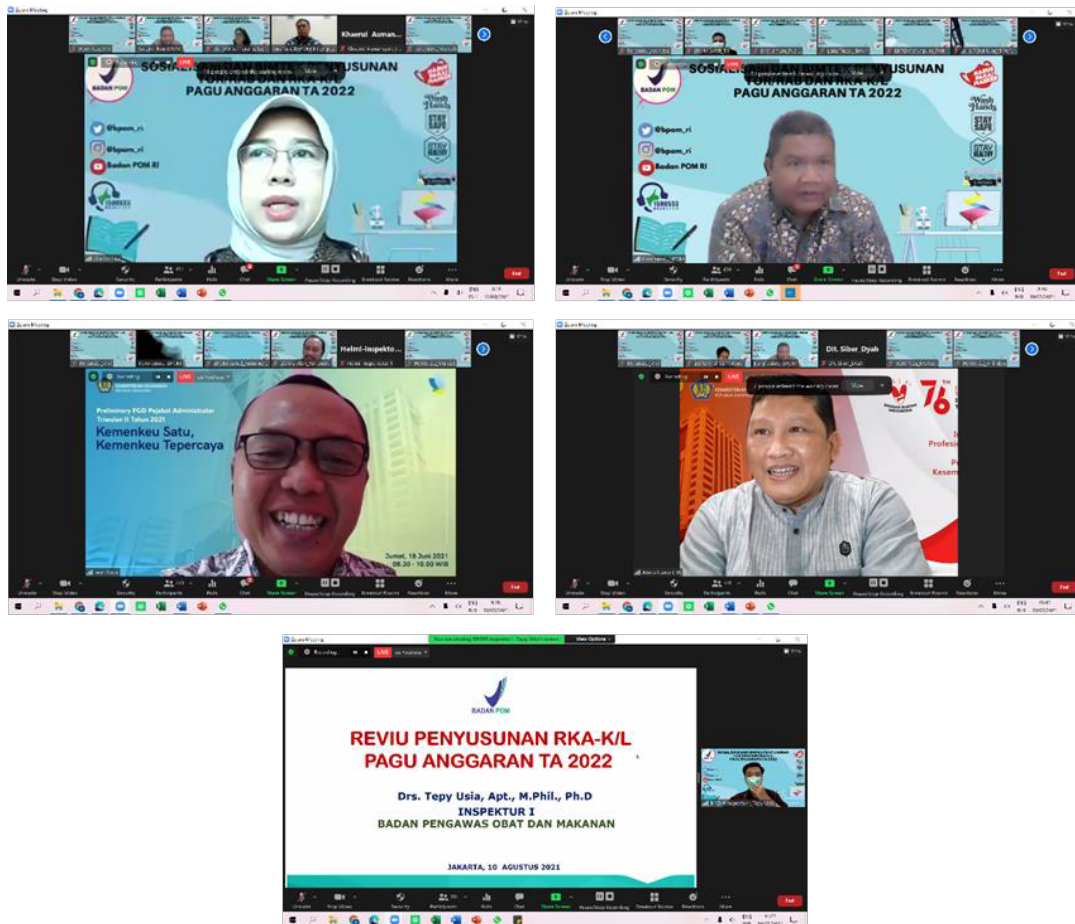
Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran dengan peserta dari unit Pusat dan BB/BPOM serta telah dilakukan penyusunan KAK, RAB dan data dukung lain yang dibutuhkan. Tujuan dari kegiatan ini adalah tersusunnya RKA-K/L masing-masing unit kerja sesuai peraturan yang berlaku; tersusunnya KAK, RAB dan data dukung; serta dilaksanakannya review RKA-K/L Pagu Anggaran TA 2022 oleh APIP BPOM. Sosialisasi dan Bimtek diselenggarakan secara daring melalui media *Zoom Meeting* pada tanggal 10 Agustus 2021.

Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari seluruh Unit eselon II Pusat dan seluruh Balai Besar/Balai/Loka POM yang terdiri dari Pejabat Pembuat Komitmen, perencana dan operator aplikasi RKA-K/L. Pertemuan Sosialisasi dan Bimtek RKA-K/L Pagu Anggaran ini merupakan tindak lanjut dari diterbitkannya Surat Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan dan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas Nomor: S-199/AG/2021 dan 08361/M.PPN/D.8/PP.04.03/07/2021 tanggal 10 Juli 2021 hal tanggal 16 Juli 2021 tentang Pelaksanaan Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga Tahun Anggaran 2022 dibuka oleh Ibu Sekretaris Utama. Kemudian pada acara ini, disampaikan paparan dari narasumber sebagai berikut:

- Direktur Sistem Penganggaran – DJA mengenai Standar Biaya Masukan TA 2022;
- Direktur Bidang PMK- DJA mengenai Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL/DIPA TA 2022
- Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan mengenai Langkah-langkah penyusunan RKA-K/L Alokasi Anggaran TA 2022
- Inspektur I mengenai Hal-hal yang akan menjadi perhatian dalam Reviu APIP TA 2022

Pada pertemuan ini juga telah dilakukan desk RKA-K/L oleh APIP BPOM. Output dari pertemuan ini adalah RKA-K/L Pagu Anggaran dan Data Dukung Tahun Anggaran 2022

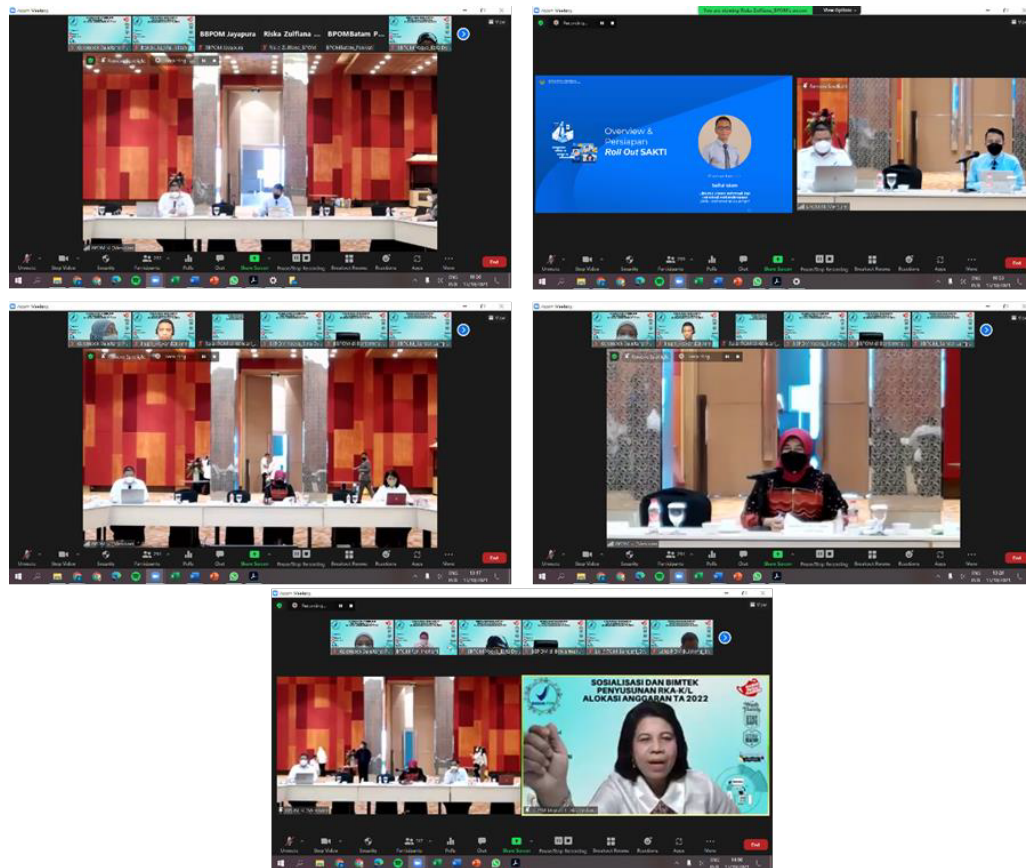
masing-masing Unit.



Gambar 4. 37 Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran Tahun 2022

e. Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKA-K/L Alokasi Anggaran

Dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahun anggaran 2022, BPOM telah melewati beberapa tahapan dalam siklus perencanaan dan penganggaran. Saat ini telah diterbitkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-909_MK.02_2021 tanggal 4 Oktober 2021 Perihal Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2022. Untuk itu, memedomani kebijakan belanja K/L dan kriteria pemanfaatan belanja mendesak K/L, serta langkah-langkah penyesuaian, penelaahan RKA-K/L TA 2022 dan penyusunan KPJM TA 2022 – 2024. Mengingat waktu yang sangat sempit dan terbatas tersebut, maka perlu dilakukan Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKA-K/L Alokasi Anggaran dengan peserta dari unit Pusat dan UPT BPOM serta menyusun KAK, RAB dan data dukung lain yang dibutuhkan pada saat penelaahan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan serta review RKA-K/L oleh APIP.



Gambar 4. 38 Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKA-K/L Alokasi Anggaran Tahun 2022

Kegiatan ini telah dilaksanakan secara *hybrid* pada tanggal 13 Oktober 2021 di Hotel Grand Mercure Kemayoran dan 14 – 15 Oktober 2021 di Hotel Aryaduta, untuk pelaksanaan secara luring di Jakarta dengan peserta meliputi : Para pejabat pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Badan POM beserta pendamping.

Output dari pertemuan ini adalah himpunan data elektronik RKA-K/L Alokasi Anggaran dan Data Dukung Tahun Anggaran 2022 seluruh satuan kerja di lingkungan BPOM.

Data dukung dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang disusun oleh seluruh Unit direviu oleh APIP/Inspektorat baik dari segi urgensi, efektifitas, efisiensi, dan juga rincian komponen/sub komponen dan kesesuaian penggunaan akun. Kumpulan Arsip Data Komputer yang dihasilkan menjadi konsep Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang akan digunakan untuk penelaahan *online* oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas.

f. Penyiapan Bahan dan Pengawasan RDP dengan Mitra Kerja Badan POM

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Setiap penggunaan APBN memerlukan koordinasi dan persetujuan DPR RI sebagai lembaga tinggi negara yang memiliki fungsi anggaran. Sesuai pembagian tugas komisi, BPOM bermitra dengan Komisi IX DPR RI yang memiliki lingkup tugas Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Koordinasi dan persetujuan dilakukan dalam bentuk Rapat Dengar Pendapat (RDP). RDP dapat dilakukan dengan tujuan pendalaman dan persetujuan anggaran serta RDP yang bertujuan khusus seperti tindak lanjut isu yang berkembang di masyarakat.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun bahan paparan pimpinan dalam Rapat Kerja dengan Mitra Kerja BPOM Mengingat bahan tersebut perlu dipersiapkan secara matang dan akurat, sehingga dibutuhkan suatu pembahasan.

Selain itu, kegiatan ini juga berupa pengawasan RDP yang diikuti peserta dari BPOM di Gedung DPR RI maupun dalam bentuk Rapat Konsinyering. Pelaksanaan kegiatan RDP antara lain :

- ✓ RDP Pembahasan RKA-K/L RKP TA 2022 pada 31 Mei 2021;
- ✓ RDP Pendalaman RKA-K/L RKP TA 2022 pada 14 Juni 2021;
- ✓ RDP Pendalaman RDP Pembahasan RKAKL 2022 dan Pembahasan Usulan Program-program Kegiatan yang didanai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada 30 Agustus 2021;
- ✓ RDP Pendalaman Pembahasan RKA-K/L TA 2022 pada 2 September 2021;
- ✓ RDP Pendalaman Pembahasan RKA-K/L TA 2022 pada 7 September 2021; dan
- ✓ RDP Pendalaman Pembahasan RKA-K/L TA 2022 pada 20 September 2021;

g. Koordinasi Penganggaran dengan Lintas Sektor

Kegiatan yang dilakukan pada pembahasan perencanaan dan penganggaran bersama lintas sektor antara lain untuk pembahasan KRO, RO, satuan dan indikator. Evaluasi

Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada tanggal 23 April 2021, persiapan RDP 14 Juni 2021 (pembahasan RKA-K/L TA2022 dengan DPR) pada tanggal 13 Juni 2021, serta pembinaan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan pada tanggal 26 – 29 September 2021.

h. Penyusunan Standar Biaya Keluaran (SBK)

Dalam menjalankan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan, BPOM membutuhkan standar biaya khusus dalam bentuk Standar Biaya Keluaran (SBK) yang berlaku di BPOM dan digunakan dalam penyusunan RKA-K/L.

SBK merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran (output)/sub keluaran (sub output) dan salah satu fungsinya sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA-K/L. SBK juga berfungsi untuk mendukung tercapainya efisiensi alokasi anggaran dan alat monitoring dan evaluasi pencapaian output.

Penyusunan Standar Biaya Keluaran (SBK) pada Tahun 2022 dilaksanakan dengan cara melakukan reviu dari SBK yang telah dilaksanakan dan masukan terhadap usulan SBK pada tahun 2022. SBK tahun 2022 dilaksanakan untuk kegiatan penyidikan di UPT dan kegiatan Intelijen.

i. Workshop Penganggaran Kegiatan Terpadu Pusat dan UPT BPOM

Arah Kebijakan Deputy I, II, III, IV, dan Sekretariat Utama Tahun 2022 telah ditetapkan melalui pelaksanaan Rapat Kerja Nasional BPOM Tahun 2021. Arah kebijakan tersebut lebih lanjut dijabarkan ke dalam strategi maupun kegiatan prioritas dengan mempertimbangkan Program Prioritas Nasional Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, situasi internal, dan tantangan global. Selanjutnya strategi maupun kegiatan prioritas tersebut perlu dituangkan secara lebih rinci dalam perencanaan dan penganggaran melalui penyelenggaraan Workshop Penganggaran Kegiatan Terpadu Pusat dan UPT BPOM yang diselenggarakan di Amaroossa, Bekasi pada tanggal 25 Juni 2021.

Adapun tujuan dari penyelenggaraan Workshop Penganggaran Kegiatan Terpadu Pusat dan UPT BPOM adalah sebagai berikut: 1) Mengevaluasi urgensi, efektivitas, efisiensi, dan dampak terhadap penyerapan OH Balai atas rencana kegiatan terpadu, baik yang bersifat nasional maupun terbatas; 2) Melakukan integrasi dan sinkronisasi rencana kegiatan terpadu tahun 2022 termasuk pembagian komponen pembiayaannya antara Unit Kerja Pusat dan UPT BPOM; dan 3) Tersusunnya dokumen kesepakatan rencana Kegiatan Terpadu Tahun 2022 beserta pembagian komponen pembiayaannya sebagai acuan penyusunan RKA-K/L tahun 2022.

Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari seluruh Unit Eselon II Pusat dan seluruh Balai Besar/Balai POM. Hasil/Output dari pelaksanaan kegiatan ini adalah kumpulan dokumen lembar kesepakatan yang telah ditandatangani oleh Unit Pusat dan UPT, kemudian ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala BPOM nomor : HK.02.02.1.2.09.21.386 tahun 2021 tanggal 9 September 2021 tentang Rencana Kegiatan Terpadu di Lingkungan BPOM TA 2022.

j. Perencanaan Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) BPOM

Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bidang Kesehatan atau disebut Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) adalah dana yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional di bidang kesehatan yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di daerah.

Dalam hal pembiayaan mengacu pada UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Pemerintah Pusat telah memberikan dukungan pelaksanaan operasional pengawasan Obat dan Makanan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melalui penyediaan BOK POM. Pada Tahun 2022, BOK POM sebesar Rp204,939 Milyar yang dialokasikan kepada 419 Kabupaten/Kota yang tersebar di 33 Provinsi.

Penggunaan DAK oleh Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan DAK. Untuk memastikan hal tersebut maka diperlukan penyusunan

Rencana Kegiatan dan Anggaran yang disepakati bersama untuk dialokasikan dalam APBD. Kegiatan Desk dalam rangka RKA DAK Nonfisik BOK POM TA 2022 dilaksanakan pada tanggal 29 November 2021 secara daring untuk membahas Mekanisme Penelaahan BOK POM TA 2022 dan tanggal 30 November – 2 Desember 2021 di Hotel Santika Premiere Kota Harapan Indah, Bekasi untuk Penelaahan BOK POM TA 2022.



Gambar 4. 39 Kegiatan Penelaahan RKA BOK POM TA 2022

Sasaran Kegiatan 4:

Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan BPOM

IKU 8: Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan BPOM yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar

Kegiatan-kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan IKU 8 adalah:

a. Penyusunan Laporan Tahunan Badan POM Tahun 2020

Laporan tahunan merupakan sumber informasi tentang kegiatan pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM dalam satu tahun anggaran. Laporan hasil pengawasan Obat dan Makanan ini, yang disusun berdasarkan data-data dari unit kerja di pusat dan daerah, dapat memberikan gambaran yang berguna bagi masyarakat/konsumen mengenai perlindungan terhadap produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat keamanan, manfaat, dan mutu. Selain masyarakat, instansi terkait juga dapat dalam melihat keberhasilan program yang dikerjakan bersama BPOM di dalam laporan tahunan ini.



Gambar 4. 40 Buku Laporan Tahunan BPOM Tahun 2020

Selain itu, laporan tahunan juga penting untuk menegaskan satu azas pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu transparansi. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka dalam penyusunan laporan tahunan diperlukan data-data yang valid dan dapat dipercaya, kajian yang mendalam serta analisis yang tajam. Laporan yang disusun berdasarkan sumber data yang sah akan menghasilkan informasi yang berharga baik untuk keperluan eksternal, yang akan menjadikan BPOM sebagai institusi yang terpercaya baik di dalam maupun di luar negeri, maupun untuk keperluan internal, yang akan menjadikan BPOM sebagai institusi yang matang dan handal di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Laporan Tahunan BPOM menjelaskan seluruh kegiatan yang dilakukan dalam periode tahun 2020 yang mencakup kegiatan standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait pengawasan Obat dan Makanan. Standardisasi dilakukan terpusat dengan maksud untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap daerah membuat standar tersendiri. Kegiatan lain adalah

penilaian (*pre-market evaluation*) yang merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat dengan maksud agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional.

Kegiatan lain yang ada dalam laporan tahunan BPOM adalah pengawasan setelah beredar (*post-market control*). Kegiatan ini bertujuan untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan *sampling* produk obat dan makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan Unit Pelaksana Teknis BPOM yang tersebar di seluruh Indonesia. Kegiatan selanjutnya adalah pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji di laboratorium guna mengetahui apakah obat dan makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat.

Kegiatan selanjutnya yang disajikan dalam laporan tahunan BPOM tahun 2020 adalah penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai *pro justicia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana. Sedangkan kegiatan terakhir pada laporan tahunan BPOM adalah manajemen atau tata kelola pemerintah. Fungsi ini sendiri bertugas untuk mendukung seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM di bidang Obat dan Makanan di Indonesia.

Didalam laporan tahunan juga disampaikan upaya BPOM dalam pemberdayaan masyarakat, baik yang dilakukan oleh BPOM sendiri maupun bermitra dengan pemangku kepentingan. Masyarakat memiliki peran penting karena merupakan salah

satu pilar dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dengan pengetahuan yang cukup tentang Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan mampu melindungi dirinya sendiri serta mampu memilih Obat dan Makanan yang memenuhi syarat dan sesuai dengan kebutuhannya.

b. Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Tahun 2021

Dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah dibuat dan dituangkan dalam DIPA dan POK tahun anggaran 2021, dalam proses pelaksanaannya mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Anggaran dan Petunjuk Teknis (Juknis) Kegiatan. Dokumen tersebut disusun berdasarkan uraian, sifat dan proses yang akan dilaksanakan di tahun berjalan, sehingga dalam implementasinya petunjuk teknis tidak dapat dipisahkan dari petunjuk pelaksanaan anggaran di lingkungan Badan POM.



Gambar 4. 41 Buku Petunjuk Pelaksanaan Anggaran dan Petunjuk Teknis Kegiatan Tahun 2021

Petunjuk Pelaksanaan Anggaran tahun anggaran 2021 bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan dan atau penyimpangan serta sebagai dasar pelaksanaan pengawasan melekat yang dilakukan secara terus menerus. Sementara Petunjuk Teknis Kegiatan tahun anggaran 2021 merupakan pedoman, khususnya bagi Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia yang dapat dijadikan acuan dalam

pelaksanaan kegiatan terpadu dengan unit yang ada di pusat dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan obat dan makanan.

Rapat pembahasan penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Anggaran dan Petunjuk Teknis Kegiatan tahun 2021 dilaksanakan pada 8 – 9 Februari 2021 di hotel Mercure Cikini secara *hybrid* (daring dan luring) dengan mengundang Narasumber Kementerian Keuangan, perwakilan Unit Eselon II Pusat serta UPT.



Gambar 4. 42 Pertemuan Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Anggaran dan Petunjuk Teknis Kegiatan Tahun 2021

c. Penyusunan Laporan Kinerja BPOM tahun 2020

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja tahun 2020 disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020–2024 serta Perjanjian Kinerja tahun 2020 yang disusun secara berjenjang berdasarkan Laporan Kinerja dari unit teknis baik di pusat maupun di daerah.

Ruang lingkup Laporan Kinerja BPOM meliputi semua kegiatan utama BPOM yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi BPOM. Kegiatan yang menjadi perhatian utama meliputi tugas pokok dan fungsi BPOM, program kerja yang menjawab isu nasional, dan aktifitas yang dominan dan vital bagi pencapaian visi dan misi BPOM. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan kinerja aktual dengan rencana atau target, dan membandingkan kinerja aktual dengan tahun-tahun sebelumnya.

Sebagai salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja BPOM, Pelaporan Kinerja memiliki bobot nilai sebesar 15 (lima belas). Hasil evaluasi KemenPAN RB terhadap implementasi SAKIP di lingkungan BPOM tahun 2020, untuk komponen Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 12.14 dengan pemenuhan sebesar 80,93% terhadap bobot komponen (15).



Gambar 4. 43 Buku Laporan Kinerja BPOM Tahun 2020

Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja BPOM Tahun 2020 adalah:

- Rapat Pembahasan Draf Laporan Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan TA 2020 yang diadakan pada Jumat, 19 Februari 2021 melalui Zoom Meeting.
- Permintaan reviu terhadap Laporan Kinerja BPOM Tahun 2020 pada tanggal 23 Februari 2021 kepada Inspektur Utama.

d. Penyusunan Reviu Rencana Strategis BPOM 2020-2024

Sepanjang Tahun 2021 Biro Perencanaan dan Keuangan telah mengoordinasikan penyusunan dokumen Reviu Renstra BPOM 2020-2024 sebagai implikasi terhadap perubahan struktur organisasi BPOM sebagaimana tertuang dalam Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM serta berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi yang berdampak terhadap pelaksanaan kinerja di antaranya adanya pandemi COVID-19 yang mengubah paradigma dan pola hidup manusia yang pada akhirnya juga berpengaruh pada pengawasan Obat dan Makanan. Reviu Renstra BPOM dilakukan dalam upaya peningkatan kinerja BPOM secara berkelanjutan serta untuk menjaga keselarasan dan konsistensi kinerja antara Level Organisasi dan Level Unit Organisasi untuk selanjutnya dijadikan dasar penjenjangan kinerja hingga level individu. Berbagai upaya tersebut dilakukan untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja serta Reformasi Birokrasi BPOM yang optimal.



Gambar 4. 44 Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan menyampaikan paparan Revisi/Reviu Renstra BPOM Tahun 2020-2024 pada Rakorpim bersama Eselon I.

Penyusunan Reviu Renstra BPOM merupakan rangkaian proses yang dilakukan dengan melibatkan Unit Organisasi di Lingkungan BPOM serta stakeholder terkait yang dimulai dari reviu terhadap lingkungan strategis terkini, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, strategi, kebijakan, program, kegiatan, reviu terhadap target kinerja serta manual IKU BPOM. Dalam penetapan target kinerja,

juga dilengkapi dengan kertas kerja sebagai dasar perhitungan target kinerja. Adapun beberapa rangkaian kegiatan utama yang dilaksanakan dalam rangka reviu Renstra BPOM, antara lain:

1. Reviu peta strategi level 0, 1, dan 2 di Lingkungan BPOM mengacu pada perubahan Organisasi dan Tata Kerja (Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020) pada tanggal 25-27 Januari 2021.
2. Pembahasan reviu target kinerja BPOM pada tanggal 18-19 Februari 2021.
3. Pembahasan rancangan reviu Renstra BPOM dan reviu target kinerja pada Lampiran I Renstra BPOM 2020-2024 pada tanggal 27 April 2021 dengan melibatkan Unit Kerja internal serta Bappenas.
4. Rakorpim dalam rangka pembahasan rancangan Reviu Renstra BPOM 2020-2024 pada tanggal 7 Mei 2021
5. Pembahasan rancangan reviu Renstra BPOM 2020-2024 bersama Kementerian PAN dan RB pada tanggal 10 Mei 2021.
6. Pembahasan rancangan reviu Renstra BPOM bersama Bappenas dan Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 8 September 2021.



Gambar 4. 45 FGD penyusunan Revisi/Reviu Renstra BPOM Tahun 2020-2024 pada tanggal 27 April 2021

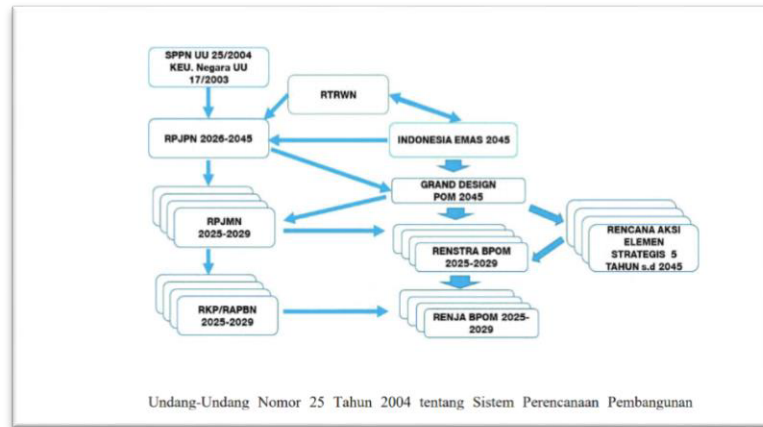
Berbagai rangkaian proses penyusunan tersebut menghasilkan output berupa Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis BPOM Tahun 2020-2024 yang selanjutnya digunakan sebagai input dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja tahunan BPOM.



Gambar 4. 46 Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis BPOM Tahun 2020-2024

e. Penyusunan *Grand Design* Pengawasan Obat dan Makanan 2045

Grand Design POM 2045 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang terkait pengawasan Obat dan Makanan. Dalam konteks perencanaan pembangunan nasional, *Grand Design* POM 2045 disusun sebagai upaya proaktif mempersiapkan perencanaan POM yang lebih baik dalam periode jangka menengah (5 tahun). Bersamaan dengan momentum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2026-2045, maka *Grand Design* POM 2045 juga akan memberikan inputan untuk RPJPN dan RPJMN. Penyusunan *Grand Design* POM 2045 dimulai pada tahun 2017, yaitu berupa penyusunan dokumen awal atau *draft* yang melibatkan *stakeholder* Kementerian/Lembaga dan eksternal. Pada tahun 2021 merupakan lanjutan penyusunan *Grand Design* POM 2045 dengan focus perbaikan konsep, kerangka, dan substansi serta perubahan periodisasi *roadmap* *Grand Design* POM 2045. Berikut adalah kerangka logis *Grand Design* POM 2045 dikaitkan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Visi Indonesia Emas 2045, kedudukan *Grand Design* POM 2045 dalam dokumen perencanaan di bidang POM.



Gambar 4. 47 Kerangka Logis Grand Design POM 2045

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Periode 2005-2025, yang kemudian dilanjutkan dengan periode 2025-2045. RPJPN 2026-2045 disusun mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan mempertimbangkan Visi Indonesia Emas 2045.



Gambar 4. 48 Buku Ringkasan Eksekutif Grand Design POM 2045

GD POM juga diharapkan akan memberikan input dalam penyusunan RPJMN 2025-2029, di mana pada Tahun 2022 akan dimulai penyusunan *background study* RPJMN. GD POM 2045 akan dijabarkan dalam bentuk rencana aksi per elemen strategis secara lebih spesifik dan operasional dalam periodisasi 5 (lima) tahun.

Pada tahun 2021, proses penyusunan *Grand Design* POM 2045 telah melibatkan berbagai macam pihak, terutama pihak eksternal untuk memberikan masukan dalam penyusunan Grand Design POM 2045. Selain itu, dokumen ini juga dibahas dengan para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan BPOM.

f. Pengembangan Indikator Pembangunan Pengawasan Obat dan Makanan

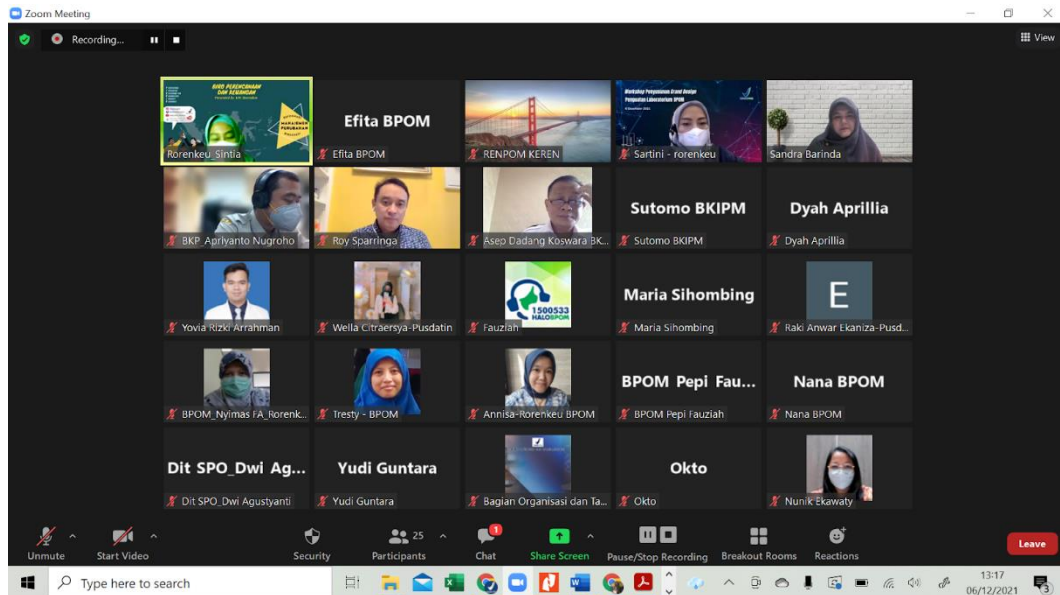
Badan POM saat ini berupaya untuk melakukan pengembangan model Indeks Pengawasan Obat dan Makanan. Upaya tersebut dilakukan melalui menyusun model indeks yang dimulai dari Produk Pangan, sebagai kegiatan awal dalam pengembangan

Daerah	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota
<p>Alat Kesehatan, dan Makanan</p> <p>1. Penyelenggaraan alat kesehatan, dan kegiatan kesehatan program nasional.</p> <p>2. Penyelenggaraan pemeriksaan, dan pengawasan alat kesehatan.</p> <p>3. Penyelenggaraan pengawasan industri, sarana produksi dan sarana distribusi alat kesehatan, alat kesehatan alat kesehatan dan peredaran alat kesehatan.</p> <p>4. Penyelenggaraan pre market obat, obat tradisional, kosmetika, alat kesehatan, PABK dan makanan rekayasa.</p> <p>5. Penyelenggaraan post market obat, alat tradisional, kosmetika, alat kesehatan, PABK dan makanan rekayasa.</p>	<p>1. Penyelenggaraan pemeriksaan, dan pengawasan alat kesehatan.</p> <p>2. Penyelenggaraan pemeriksaan, dan pengawasan alat kesehatan.</p> <p>3. Penyelenggaraan pemeriksaan, dan pengawasan alat kesehatan.</p> <p>4. Penyelenggaraan pemeriksaan, dan pengawasan alat kesehatan.</p> <p>5. Penyelenggaraan pemeriksaan, dan pengawasan alat kesehatan.</p>	<p>1. Penyelenggaraan pemeriksaan, dan pengawasan alat kesehatan.</p> <p>2. Penyelenggaraan pemeriksaan, dan pengawasan alat kesehatan.</p> <p>3. Penyelenggaraan pemeriksaan, dan pengawasan alat kesehatan.</p> <p>4. Penyelenggaraan pemeriksaan, dan pengawasan alat kesehatan.</p> <p>5. Penyelenggaraan pemeriksaan, dan pengawasan alat kesehatan.</p>	<p>1. Penyelenggaraan pemeriksaan, dan pengawasan alat kesehatan.</p> <p>2. Penyelenggaraan pemeriksaan, dan pengawasan alat kesehatan.</p> <p>3. Penyelenggaraan pemeriksaan, dan pengawasan alat kesehatan.</p> <p>4. Penyelenggaraan pemeriksaan, dan pengawasan alat kesehatan.</p> <p>5. Penyelenggaraan pemeriksaan, dan pengawasan alat kesehatan.</p>
<p>Keamanan Pangan</p> <p>1. Penyelenggaraan pemeriksaan, dan pengawasan alat kesehatan.</p> <p>2. Penyelenggaraan pemeriksaan, dan pengawasan alat kesehatan.</p> <p>3. Penyelenggaraan pemeriksaan, dan pengawasan alat kesehatan.</p> <p>4. Penyelenggaraan pemeriksaan, dan pengawasan alat kesehatan.</p> <p>5. Penyelenggaraan pemeriksaan, dan pengawasan alat kesehatan.</p>	<p>1. Penyelenggaraan pemeriksaan, dan pengawasan alat kesehatan.</p> <p>2. Penyelenggaraan pemeriksaan, dan pengawasan alat kesehatan.</p> <p>3. Penyelenggaraan pemeriksaan, dan pengawasan alat kesehatan.</p> <p>4. Penyelenggaraan pemeriksaan, dan pengawasan alat kesehatan.</p> <p>5. Penyelenggaraan pemeriksaan, dan pengawasan alat kesehatan.</p>	<p>1. Penyelenggaraan pemeriksaan, dan pengawasan alat kesehatan.</p> <p>2. Penyelenggaraan pemeriksaan, dan pengawasan alat kesehatan.</p> <p>3. Penyelenggaraan pemeriksaan, dan pengawasan alat kesehatan.</p> <p>4. Penyelenggaraan pemeriksaan, dan pengawasan alat kesehatan.</p> <p>5. Penyelenggaraan pemeriksaan, dan pengawasan alat kesehatan.</p>	<p>1. Penyelenggaraan pemeriksaan, dan pengawasan alat kesehatan.</p> <p>2. Penyelenggaraan pemeriksaan, dan pengawasan alat kesehatan.</p> <p>3. Penyelenggaraan pemeriksaan, dan pengawasan alat kesehatan.</p> <p>4. Penyelenggaraan pemeriksaan, dan pengawasan alat kesehatan.</p> <p>5. Penyelenggaraan pemeriksaan, dan pengawasan alat kesehatan.</p>
<p>Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan</p> <p>1. Penyelenggaraan pemeriksaan, dan pengawasan alat kesehatan.</p> <p>2. Penyelenggaraan pemeriksaan, dan pengawasan alat kesehatan.</p> <p>3. Penyelenggaraan pemeriksaan, dan pengawasan alat kesehatan.</p> <p>4. Penyelenggaraan pemeriksaan, dan pengawasan alat kesehatan.</p> <p>5. Penyelenggaraan pemeriksaan, dan pengawasan alat kesehatan.</p>	<p>1. Penyelenggaraan pemeriksaan, dan pengawasan alat kesehatan.</p> <p>2. Penyelenggaraan pemeriksaan, dan pengawasan alat kesehatan.</p> <p>3. Penyelenggaraan pemeriksaan, dan pengawasan alat kesehatan.</p> <p>4. Penyelenggaraan pemeriksaan, dan pengawasan alat kesehatan.</p> <p>5. Penyelenggaraan pemeriksaan, dan pengawasan alat kesehatan.</p>	<p>1. Penyelenggaraan pemeriksaan, dan pengawasan alat kesehatan.</p> <p>2. Penyelenggaraan pemeriksaan, dan pengawasan alat kesehatan.</p> <p>3. Penyelenggaraan pemeriksaan, dan pengawasan alat kesehatan.</p> <p>4. Penyelenggaraan pemeriksaan, dan pengawasan alat kesehatan.</p> <p>5. Penyelenggaraan pemeriksaan, dan pengawasan alat kesehatan.</p>	<p>1. Penyelenggaraan pemeriksaan, dan pengawasan alat kesehatan.</p> <p>2. Penyelenggaraan pemeriksaan, dan pengawasan alat kesehatan.</p> <p>3. Penyelenggaraan pemeriksaan, dan pengawasan alat kesehatan.</p> <p>4. Penyelenggaraan pemeriksaan, dan pengawasan alat kesehatan.</p> <p>5. Penyelenggaraan pemeriksaan, dan pengawasan alat kesehatan.</p>

Gambar 4. 49 Focus Group Discussion Pembahasan Indeks Pengawasan Pangan

model indeks ini. Jenis-jenis pangan yang beragam di masyarakat dengan tingkat risiko yang berbeda-beda, menjadi tantangan pengawasan bersama antar lintas sektor. Kegiatan *Focus Group Discussion* Pembahasan Indeks Pengawasan Pangan dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2021 dengan mengundang peserta dari Unit Kerja Pusat (Deputi 3, Deputi 4, Inspektorat, Sekretariat Utama dan Pusat-pusat) serta para pakar dan pemangku kepentingan.

Pemaparan materi disampaikan oleh Ibu Sandra Barinda berupa proposal penelitian yang berjudul “Penyusunan Indeks Pengawasan Pangan”. Narasumber yaitu Dr. Roy A Sparinga memberikan masukan agar focus indeks ini tidak hanya di pangan olahan, tetapi juga pangan keseluruhan sehingga harus ada koordinasi dengan Kementerian/Lembaga lainnya. BPOM bisa lebih mengawasi pangan berisiko dan membuat definisi operasionalnya.



Gambar 4. 50 Focus Group Discussion Pembahasan Indeks Pengawasan Pangan

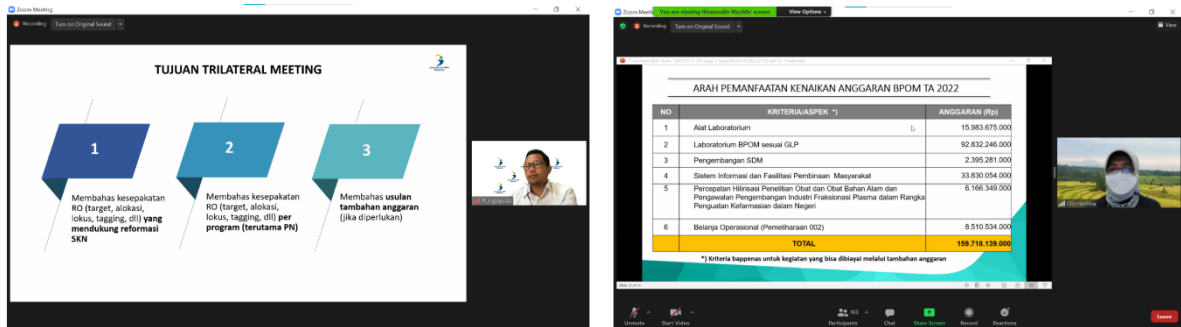
Perwakilan dari Kepala Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan - Badan Ketahanan Pangan dan perwakilan dari Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan juga turut hadir dalam kegiatan FGD ini. Perwakilan bersedia memberikan data keamanan pangan segar dan data pangan hasil perikanan per provinsi tahun 2018-2020 yang dimiliki untuk proses tindaklanjut pengembangan Indikator Pengawasan Pangan.

g. Penyusunan Rencana Kerja BPOM Tahun Anggaran 2022

Sesuai dengan Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI) Menteri PPN/Kepala Bappenas No. B.238/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2021 dan Menteri Keuangan No. S-361/MK.02/2021 tanggal 29 April 2021 perihal Pagu Indikatif Belanja K/L TA 2022, total alokasi anggaran tahun 2022 BPOM sebesar Rp 2.244.003,4 juta dengan rincian total alokasi untuk belanja operasional sebesar Rp 931.134,5 juta dan total alokasi untuk belanja non operasional sebesar Rp 1.312.868,9 juta. Menindaklanjuti SBPI tersebut, pada tanggal 24 Mei 2021 dilaksanakan *Trilateral Meeting* (TM) Tahap-1 pembahasan Pagu Indikatif BPOM Tahun Anggaran 2022 bersama dengan mitra

kerja di Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan secara daring melalui *zoom meeting*.

Gambar 4. 51 Trilateral Meeting Tahap I Penyusunan Penyusunan



Pembahasan *TM* difokuskan pada rincian *output (RO)* yang masuk dalam kategori prioritas nasional sebagai penerjemahan dari tahun ketiga RPJMN Tahun 2020-2024 dan rancangan awal RKP Tahun 2022 serta beberapa *RO* non-prioritas lainnya. Apabila dibandingkan alokasi anggaran tahun 2021, terdapat tambahan anggaran sebesar Rp 159.718,1 juta pada 2022 dengan rincian : i) Belanja Operasional Rp 8.510,5 juta untuk kenaikan Belanja Operasional dan Tambahan non-operasional (RM dan PNBP) sebesar 151.207,60 juta untuk mendukung *Major Project* Reformasi Sistem Kesehatan Nasional. Pada *TM* tersebut, pemanfaatan tambahan anggaran disepakati sebagai berikut :

1. Penguatan alat laboratorium terdiri atas Penguatan alat laboratorium (Rp 18.905,8 juta) dan Penguatan alat laboratorium di P3OMN (Rp 4.686,8 juta);
2. Peningkatan Laboratorium sesuai GLP terdiri atas Peningkatan prasarana laboratorium di UPT (Rp 70.832,2 juta), Peningkatan laboratorium POM sesuai GLP (Rp 11.497,8 juta), dan Pengembangan pengujian obat dan makanan (Rp 10.502,2 juta);
3. Peningkatan Kapasitas SDM Pengawas dan Penguji Laboratorium sebesar Rp 2.395,3 juta;
4. Pengembangan Sistem Informasi dan Fasilitas Pembinaan Masyarakat terdiri atas Komunikasi publik oleh UPT (Rp 1.665,4 juta), Fasilitas pembinaan masyarakat oleh UPT (Rp 9.131,9 juta), Sistem informasi POM yang real time dan



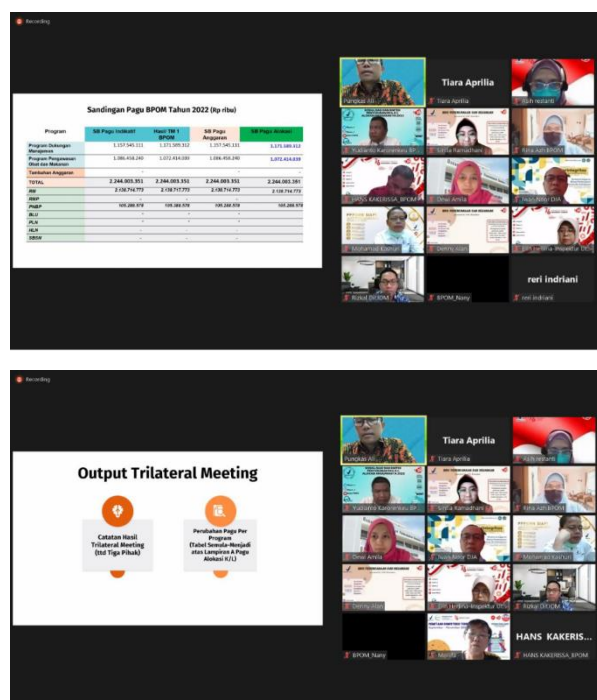
- terintegrasi (Rp 1.447,6 juta), dan Pengadaan sistem informasi SIBER POM (Rp 13.976,2 juta);
5. Perluasan Cakupan Riset dan Penguatan Kefarmasian Dalam Negeri terdiri atas Riset dan kajian yang dimanfaatkan (Rp 1.348,5 juta), Keputusan registrasi obat yang diselesaikan sesuai standar (Rp 1.302,4 juta), Standar obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif yang disusun (Rp 1.190,0 juta), dan Keputusan pengawalan tahapan pemenuhan fasilitas produksi obat hasil inovasi yang diterbitkan (Rp 2.325,4 juta).

Hasil kesepakatan *TM* diacu dalam penelaahan RKA K/L sekaligus untuk menentukan alokasi akhir anggaran untuk masing-masing RO. Penelaahan RKAKL akan difokuskan untuk menelaah kewajaran anggaran dengan mengacu pada prinsip efisiensi dan efektifitas dengan mempertimbangkan TOR/RAB dan dokumen pendukung lainnya, serta diupayakan tetap menjaga target output yang telah disepakati.

Pada tanggal 23 Juli 2021 terbit Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor: S-634/MK.02/2021 dan 516/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2021 tentang Pagu Anggaran K/L dan Penyelesaian RKA/KL TA 2022. Pagu anggaran BPOM TA 2022 adalah Rp.2.244.003.351.000,- (Dua Triliun, dua ratus empat puluh empat miliar, tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) atau tidak mengalami perubahan dari Pagu Indikatif. Berdasarkan pencermatan Kementerian PPN/Bappenas terkait peruntukan anggaran BPOM pada *Major Project* Reformasi Sistem Kesehatan Nasional telah sesuai dan tidak mengalami perubahan dibandingkan kesepakatan pada *Trilateral Meeting* (TM) tahap 1.

Pagu Alokasi Anggaran BPOM TA 2022, beserta sebaran pagu di Satuan Kerja telah mendapatkan persetujuan Badan Anggaran DPR RI pada Rapat Dengar Pendapat Bersama Komisi IX DPR RI tanggal 20 September 2021. Kemudian pada tanggal 6 September 2021 telah dilaksanakan pertemuan dengan mitra di Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan secara *daring* melalui *zoom meeting* untuk membahas *pending issue* pada Renja BPOM TA 2022 antara lain :

1. Adanya kebijakan standarisasi Rincian Output (RO) generik berdasarkan Surat Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas No. 05920 /PP.04.03/Dt.8.2/B/05/2021 Tanggal 21 Mei 2021.
2. Adanya beberapa RO yang diusulkan mengalami perubahan baik pada nomenklatur maupun target, berdasarkan tindak lanjut catatan pembahasan TM tahap I.



Gambar 4. 52 Trilateral Meeting Tahap II Penyusunan Penyusunan

Hasil pembahasan TM II Renja BPOM 2022 adalah sebagai berikut:

1. Standarisasi Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) Generik
 - a. Secara umum pemetaan standarisasi KRO dan RO generik yang dilakukan oleh BPOM disetujui oleh mitra Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan
 - b. Kementerian Keuangan merekomendasi agar RO "Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan" pada UPT BPOM dapat dipilah antara kegiatan Operasional dan Non-Operasional dengan mekanisme kegiatan Operasional dimasukkan ke dalam RO Layanan Perkantoran pada komponen 002 sedangkan kegiatan Non-Operasional dimasukkan ke RO Layanan Umum pada Program Pengawasan Obat dan Makanan.

c. RO Layanan Perkantoran mengikuti ketentuan standarisasi RO dengan menggunakan kode 994 sehingga seluruh RO *existing* yang telah dirinci per Satker akan digabung menjadi satu RO Layanan Perkantoran.

Selain pembahasan tersebut, Kementerian PPN/Bappenas juga mengangkat issue terkait wacana penyatuan semua lembaga riset di bawah BRIN dalam bentuk peleburan, sebagai tindak lanjut dari adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2021 tentang BRIN serta Surat Edaran MenPANRB Nomor B/295/M.SM.02.03/2021 tentang Pengalihan Peneliti pada Lembaga Penelitian dan Pengembangan K/L ke BRIN. Bappenas menyampaikan bahwa berdasarkan surat yang disampaikan kepada Kementerian PPN/ Bappenas, BRIN telah melakukan identifikasi terhadap anggaran pada Renja TA 2022 dan Badan POM termasuk salah satu K/L yang direncanakan akan dipindahkan anggarannya sebesar 19 Milyar rupiah.

Untuk menghindari hal tersebut, Badan POM telah menyampaikan Surat Usulan Perubahan Nomenklatur Kegiatan, KRO dan RO No. B-PR.03.01.1.2.10.21.278 tanggal 25 Oktober 2021 kepada Menteri PPN/ Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan dalam rangka menghindari persepsi tumpang tindih antara kegiatan di BPOM dan tugas fungsi BRIN serta mengacu pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga. Adapun tindak lanjut dari surat usulan tersebut telah disetujui oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan serta telah dilakukan penyesuaian nomenklatur Kegiatan, Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output pada Aplikasi Krisna.

h. Penyusunan Revisi Perjanjian Kinerja BPOM Tahun 2021 dan Penyusunan Perjanjian Kinerja BPOM Tahun 2022

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 Tentang Reviu Rencana Strategis BPOM Tahun 2020-2024 dan mengingat adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja

BPOM, maka perlu dilakukan revisi dokumen Perjanjian Kinerja (PK) BPOM tahun 2021 sebagai tindak lanjut dari perubahan perencanaan kinerja tahunan BPOM yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan rencana kinerja seluruh unit kerja dan unit teknis di lingkungan BPOM.



Gambar 4. 53 Dokumen Revisi Perjanjian Kinerja BPOM tahun 2021.

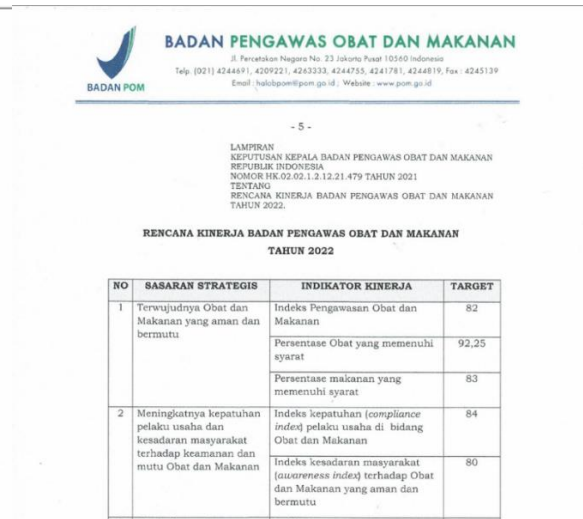
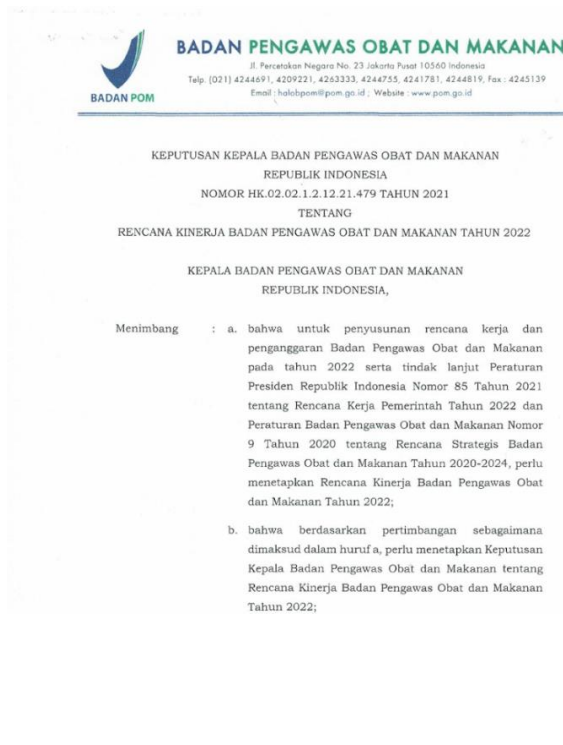
Selain revisi dokumen PK BPOM tahun 2021, dilakukan juga penyusunan dokumen PK tahun 2022 sebagai tindak lanjut dari penetapan Rencana Kinerja Tahunan BPOM Tahun 2022. Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi mengenai sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang akan dicapai, serta total alokasi anggaran.



Gambar 4. 54 Dokumen Perjanjian Kinerja BPOM tahun 2022.

i. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BPOM Tahun 2022

Penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BPOM yang memuat informasi mengenai sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang ingin dicapai BPOM pada tahun 2022 merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, serta Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BPOM Tahun 2020-2024. RKT BPOM tahun 2022 kemudian akan diturunkan ke dalam penetapan RKT Unit Kerja dan menjadi pedoman/acuan pelaksanaan bagi unit kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya guna pencapaian sasaran dan target yang ditetapkan.



Gambar 4. 55 Penetapan SK Kepala Badan POM tentang RKT BPOM Tahun 2022.

IKU 9: Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan SETTAMA yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar

Kegiatan-kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan IKU 9 adalah:

a. Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2020

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Utama mengacu pada Renstra Sekretariat Utama Tahun 2020-2024. Laporan Kinerja Sekretariat Utama merupakan dokumen evaluasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja dan sebagai bahan untuk perencanaan yang lebih responsif terhadap perubahan lingkungan strategis. Laporan Kinerja Sekretariat Utama ini dapat menjadi media pertanggungjawaban bagi Sekretariat Utama dan dapat memberikan sumbangan bagi peningkatan kinerja BPOM kedepan. Berikut adalah gambar buku laporan kinerja Sekretariat Utama yang ditunjukkan pada gambar 4.36.

Laporan Kinerja juga diharapkan dapat digunakan sebagai media evaluasi untuk melihat efisiensi dan efektifitas pencapaian sasaran dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan yang berdampak pada pencapaian visi dan misi BPOM. Evaluasi dimaksudkan untuk melihat kegiatan yang mempunyai daya ungkit secara signifikan dalam mencapai visi dan misi BPOM untuk melihat prioritas kegiatan yang harus diutamakan untuk perencanaan-perencanaan selanjutnya, mengingat sumber daya dan sumber dana yang terbatas dibandingkan dengan tuntutan lingkungan strategis yang semakin berkembang.



Gambar 4. 56 Buku Laporan Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2021

Sebagai salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja, Pelaporan Kinerja memiliki bobot nilai sebesar 15 (lima belas) meliputi aspek: pemenuhan pelaporan (3%), kualitas pelaporan (7,5%) dan pemanfaatan pelaporan (4,5%). Hasil evaluasi oleh Inspektur Utama BPOM terhadap implementasi SAKIP di Sekretariat Utama tahun 2021, untuk komponen Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 13,48 dengan pemenuhan sebesar 89,87% terhadap bobot komponen (15), meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut disampaikan pula bahwa laporan kinerja telah menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja, evaluasi kinerja, termasuk perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan dengan target jangka menengah. Rekomendasi yang diberikan antara lain agar dapat mengkuantifikasikan perhitungan efisiensi sumber daya dan menganalisis besaran efisiensi dan pemanfaatan atas informasi kinerja secara maksimal untuk digunakan dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.

b. Penyusunan Reviu Rencana Strategis Sekretariat Utama Tahun 2020-2024

Sejalan dengan proses penyusunan dan penetapan reviu Renstra BPOM 2020-2024 sebagai implikasi dari perubahan Organisasi dan Tata Kerja BPOM serta lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan, Unit Organisasi Eselon I/Satuan Kerja di Lingkungan BPOM juga diamanatkan untuk melakukan reviu terhadap dokumen Rencana Strategis nya masing-masing sebagai upaya untuk menjaga keselarasan dan memastikan berbagai kebijakan, strategi dan sasaran kinerja BPOM diturunkan pada dokumen perencanaan kinerja Unit Organisasi. Untuk itu, sebagai Unit Organisasi Eselon I yang memiliki fungsi strategis dalam memberikan dukungan manajemen BPOM, Sekretariat Utama dengan dikoordinir oleh Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan Reviu terhadap dokumen Renstra Sekretariat Utama Tahun 2020-2024 dengan memperhatikan perubahan Organisasi dan Tata Kerja serta perubahan lingkungan strategis khususnya terkait tugas dan fungsi Kesektamaan.

Dalam rangka penyusunan reviu Renstra Sekretariat Utama, dilakukan pertemuan bersama Plt. Sekretaris Utama serta seluruh Unit Kerja Eselon II di Lingkup Sekretariat Utama pada tanggal 13 Oktober 2021 yang membahas berbagai muatan, antara lain:

1. Reviu terhadap Bab 1 Pendahuluan, mencakup reviu profil dan kebutuhan SDM berdasarkan ABK, capaian kinerja tahun 2020 serta berbagai potensi dan permasalahan baru yang muncul.
2. Reviu terhadap Bab 2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, khususnya konfirmasi terkait peta strategi masing-masing Unit Kerja.
3. Reviu Terhadap Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan.
4. Reviu Terhadap Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan.
5. Reviu Terhadap Lampiran I Matriks Kinerja dan Pendanaan, khususnya terkait perubahan sasaran, indikator, target kinerja yang disertai dengan data realisasi masing-masing indikator Tahun 2020 serta dilengkapi dengan justifikasi apabila terdapat perubahan target.



Gambar 4. 57 Keputusan Sekretaris Utama Nomor HK.02.02.2.21.12.21.305 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Sekretariat Utama BPOM Tahun 2020-2024

Proses penyusunan tersebut menghasilkan output berupa Keputusan Sekretaris Utama Nomor HK.02.02.2.21.12.21.305 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Sekretariat Utama BPOM Tahun 2020-2024 yang selanjutnya digunakan sebagai input dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja tahunan Sekretariat Utama hingga akhir periode Renstra.

c. Penyusunan Revisi Perjanjian Kinerja BPOM Tahun 2021 dan Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2022.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 Tentang Reviu Rencana Strategis BPOM Tahun 2020-2024, serta menindaklanjuti Keputusan Sekretaris Utama BPOM Nomor HK.02.02.1.2.12.21.305 Tahun 2021 Tentang Reviu Rencana Strategis Sekretariat Utama BPOM 2020-2024, maka perlu dilakukan revisi dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Utama tahun 2021 sebagai tindaklanjut dari perubahan perencanaan kinerja tahunan yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan rencana kinerja seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Utama BPOM.



Gambar 4. 58 Dokumen Revisi Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama tahun 2021.

Selain revisi dokumen PK Sekretariat Utama tahun 2021, dilakukan juga penyusunan dokumen PK tahun 2022 sebagai tindaklanjut dari penetapan Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Utama Tahun 2022. Dokumen Perjanjian Kinerja ini memuat informasi mengenai sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang akan dicapai, serta total alokasi anggaran.

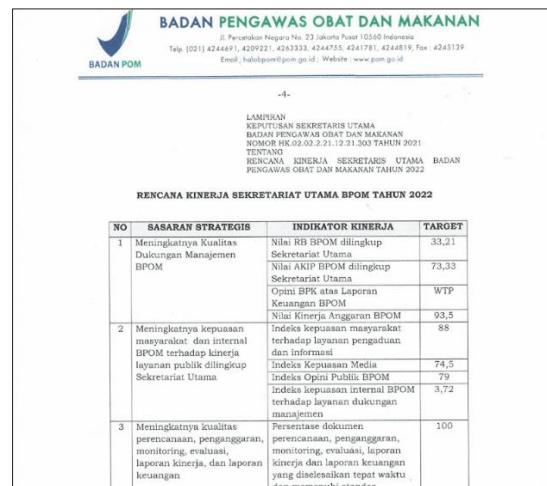
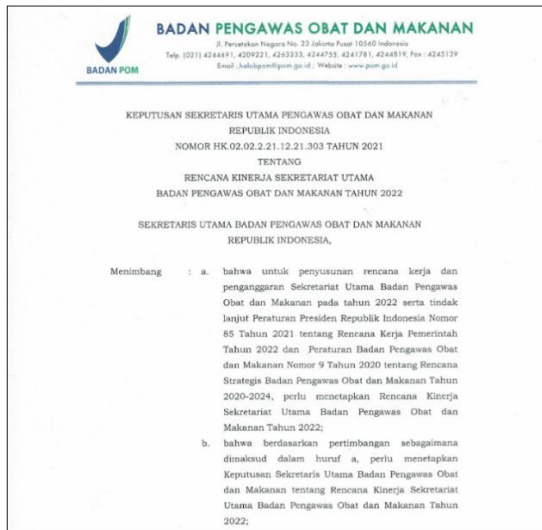


Gambar 4. 59 Dokumen Perjanjian Kinerja BPOM tahun 2022.

c. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Utama Tahun 2022

Penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Utama yang memuat informasi mengenai sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang ingin dicapai Sekretariat Utama pada tahun 2022 merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BPOM Tahun 2020-2024, serta Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.12.21.479 Tahun 2021 tentang Rencana Kinerja BPOM tahun 2022.

RKT Sekretariat Utama tahun 2022 menjadi pedoman/acuan pelaksanaan bagi unit kerja di lingkungan Sekretariat Utama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya guna pencapaian sasaran dan target yang ditetapkan.



Gambar 4. 60 Penetapan SK Sekretaris Utama BPOM tentang RKT Sekretariat Utama Tahun 2022.

Sasaran Kegiatan 5:

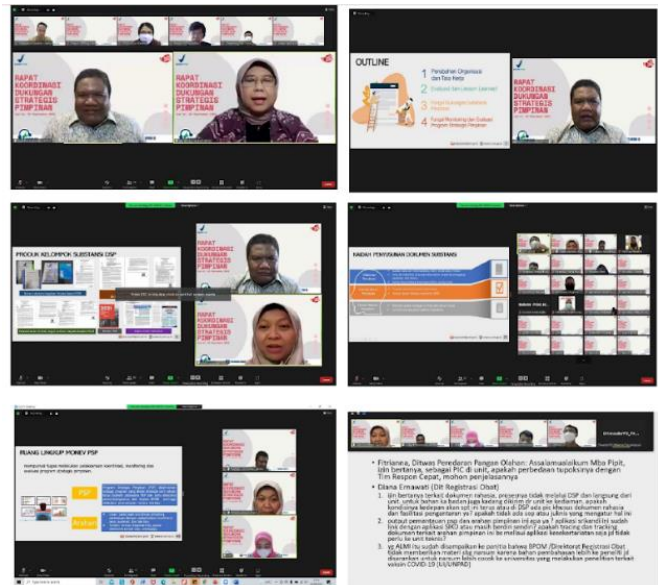
Meningkatnya kualitas layanan dukungan strategis Pimpinan

IKU 10: Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis Pimpinan

Kegiatan-kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan IKU 10 adalah:

a. Koordinasi Penyiapan Bahan Substansi Kepala BPOM

Koordinasi penyiapan bahan substansi Kepala BPOM dilaksanakan melalui komunikasi intensif antara Kelompok Substansi DSP dengan unit kerja terkait serta rapat koordinasi dan pembahasan. Rapat Koordinasi DSP secara *online* telah dilaksanakan pada tanggal 24 September 2021 (Gambar 4.61) untuk meningkatkan koordinasi antar unit kerja dalam pelaksanaan fungsi DSP dan menyosialisasikan revisi terkini SOP



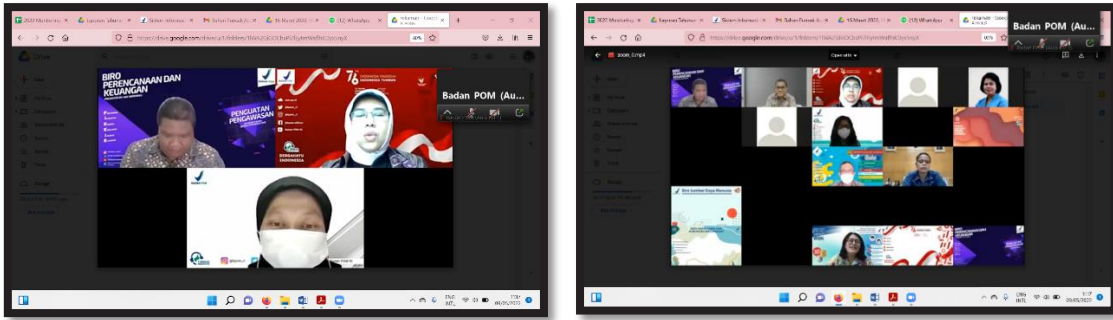
Gambar 4. 61 Rapat Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan 24 September 2021

POM-01.03/CFM.01/ SOP.01 Ketersediaan Dokumen Substansi Teknis Pimpinan pasca penataan organisasi BPOM. Pertemuan dihadiri oleh 91 peserta dari 26 unit kerja di BPOM. Setelah pembukaan oleh Sekretaris Utama (Sestama), Tim DSP menyampaikan paparan terkait Pelaksanaan Fungsi DSP Pasca Penataan Organisasi Badan POM yang meliputi penjelasan implikasi perubahan struktur dan organisasi tata kerja Badan POM pada SOP terkait fungsi DSP, evaluasi dan *lesson learned*, serta pelaksanaan fungsi dukungan substansi pimpinan dan fungsi monitoring dan evaluasi program strategis pimpinan. Beberapa usulan peserta pada lembar evaluasi kegiatan yaitu penyelenggaraan kegiatan sejenis dengan materi lebih teknis seperti *do and don't's* dalam menyiapkan bahan substansi pimpinan, penulisan efektif, dan aplikasi untuk dukungan strategis pimpinan (Srikandi).



Beberapa tantangan yang dihadapi pada pelaksanaan fungsi DSP pasca penataan organisasi awal tahun 2021, yaitu (1) jalur koordinasi dan komunikasi antar tim pendukung pimpinan semakin kompleks, (2) penugasan penyiapan bahan melalui disposisi tertulis kepada Tim DSP lebih terbatas, (3) tren pelaksanaan kegiatan Kepala BPOM secara online menyebabkan jadwal menjadi sangat dinamis dan cenderung dilakukan maraton *tapping* beberapa sambutan dalam waktu bersamaan, serta (4) penempatan ruang kerja antara Tim DSP dengan Tim Jadwal dan Tim Bahan pada Kesekretariatan Kepala BPOM pada gedung yang berbeda. Dalam rangka menjawab tantangan ini, **Rapat Koordinasi Mekanisme Penyiapan Bahan Pimpinan** dilaksanakan pada tanggal 2 November 2021 dipimpin oleh Plt. Sestama dan dihadiri \pm 100 orang terdiri dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama atau yang mewakili dari 30 unit kerja di lingkungan BPOM (Gambar 4.62). Rapat bertujuan untuk menyamakan persepsi, membahas solusi, dan meningkatkan komitmen bersama dalam melaksanakan penyiapan bahan pimpinan secara lebih baik. Peserta pertemuan ini menyepakati alur proses penyiapan bahan dan berkomitmen untuk percepatan di setiap titik dengan prinsip koordinasi dan komunikasi yang efektif sesuai peran dan tanggungjawabnya masing-masing. Tim DSP berwenang untuk mengolah bahan yang dirumuskan oleh unit kerja dan berkoordinasi dengan unit kerja terhadap penyesuaian bahan hingga mendapatkan persetujuan Eselon I. Unit kerja berkontribusi untuk siaga 24/7 dalam penyiapan bahan bersama dengan Tim DSP.

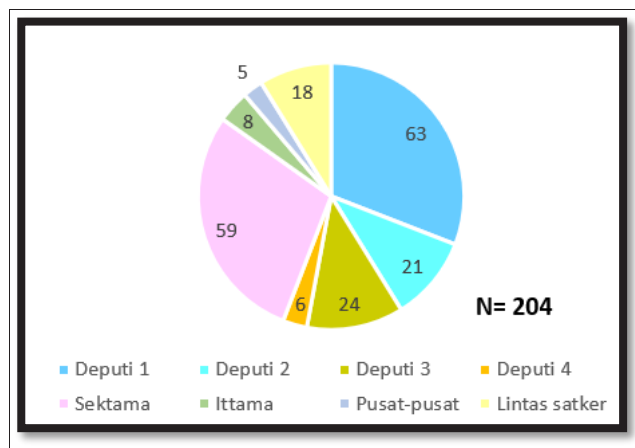




Gambar 4. 62 Rapat Koordinasi Mekanisme Penyiapan Bahan Pimpinan tanggal 2 November 2021

Tim DSP mengoordinasikan bahan substansi Kepala BPOM, baik dengan mengolah konsep bahan dari unit kerja maupun menyusun bahan dari *database* substansi dan literatur/referensi terpercaya untuk kemudian mengomunikasikan dan meminta masukan dari unit kerja terkait jika diperlukan atau dimungkinkan. Tergantung kompleksitas substansi dan teknis kegiatan, tim DSP memerlukan sekurangnya 2 hari kerja (HK) untuk melakukan *review*, pengolahan, dan finalisasi bahan serta 4 HK untuk menyusun bahan yang diinisiasi oleh Tim DSP.

Selama tahun 2021, Tim DSP mengelola ±291 paket dokumen substansi kegiatan Kepala BPOM yang terdiri dari 117 paket bahan bicara, 112 paket bahan informasi, dan 2 bahan lainnya (surat dan *foreword*). Bahan ini disiapkan untuk 204 kegiatan Kepala BPOM dengan sebaran keterkaitan topik kegiatan atau substansi bahan dengan ranah tugas dan fungsi Satuan Kerja (Satker) dapat dilihat pada Gambar 4.63



Gambar 4. 63 Sebaran Keterkaitan Topik Bahan Kegiatan Kepala BPOM tahun 2021 dan Satker

d. Pendampingan Kegiatan Strategis Kepala BPOM

Tim DSP melakukan pendampingan kegiatan kedinasan Kepala BPOM untuk mengawal bahan substansi dan mendokumentasikan arahan lisan serta hasil kegiatan yang dihadiri Kepala BPOM. Sepanjang tahun 2021, Tim DSP melakukan pendampingan pada 182 kegiatan Kepala BPOM baik secara *offline* maupun *online*. Kegiatan pendampingan ini dilaporkan melalui 161 nota dinas dari Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan (Rorenkeu) kepada Sestama dan diteruskan dengan 57 nota dinas tindak lanjut arahan lisan Kepala BPOM dari Sekretaris Utama kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama terkait. Arahan lisan Kepala BPOM yang harus segera ditindaklanjuti pada waktu yang terbatas, seperti arahan terkait pelaksanaan kegiatan esok hari, disampaikan oleh Tim DSP kepada unit kerja penanggung jawab kegiatan berupa *keypoints* hasil pertemuan melalui aplikasi percakapan.

e. Pemantauan Tindak Lanjut Arahan Kepala BPOM dan *Monitoring* dan Evaluasi Program Strategis Pimpinan (PSP)

Desk pemantauan tindak lanjut arahan Kepala BPOM dan perkembangan PSP pada tahun 2021 diselenggarakan pada tanggal 22-23 April 2021 (triwulan 1), 16 dan 19 Juli 2022 (triwulan 2), dan 28-29 Oktober 2021 (triwulan 3). Sedangkan desk triwulan 4 akan dilaksanakan pada awal tahun 2022. Dalam rangka meningkatkan ketertelusuran dan penyelesaian tindak lanjut arahan Kepala BPOM serta pelaksanaan PSP, dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi (Tim Monev) Pelaksanaan Tindak Lanjut Arahan dan Program Strategis Pimpinan Tahun 2021-2022 yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris Utama Nomor HK.02.02.2.21.10.21.251 tanggal 5 Oktober 2021 yang beranggotakan perwakilan 30 unit kerja pusat dan 7 Kesekretariatan Pimpinan.

Anggota Tim Monev mempunyai tugas menyediakan dan melakukan pemutakhiran data dan informasi perkembangan tindak lanjut arahan Kepala Badan POM, dan pelaksanaan PSP melalui aplikasi monitoring dan evaluasi PSP (aplikasi Srikandi). Anggota Tim juga diharapkan partisipasi aktifnya pada rapat atau *desk* monitoring

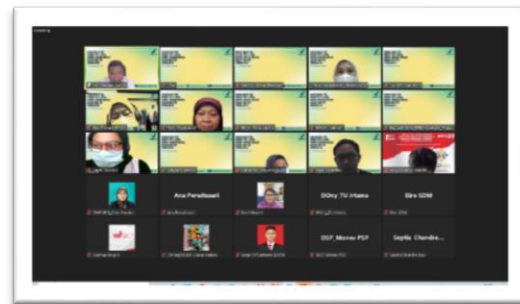
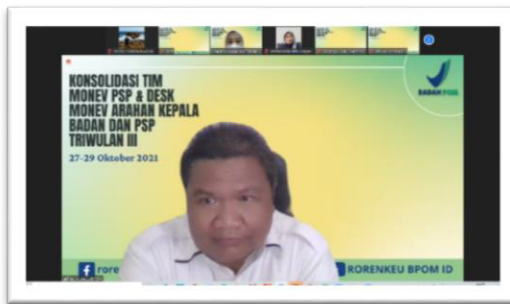
dan evaluasi tindak lanjut arahan Kepala Badan POM, dan PSP yang dilaksanakan setiap triwulan.



Rapat konsolidasi tim telah diselenggarakan pada tanggal 27 Oktober 2021 untuk menyosialisasikan pelaksanaan fungsi monev PSP dan peran serta tugas

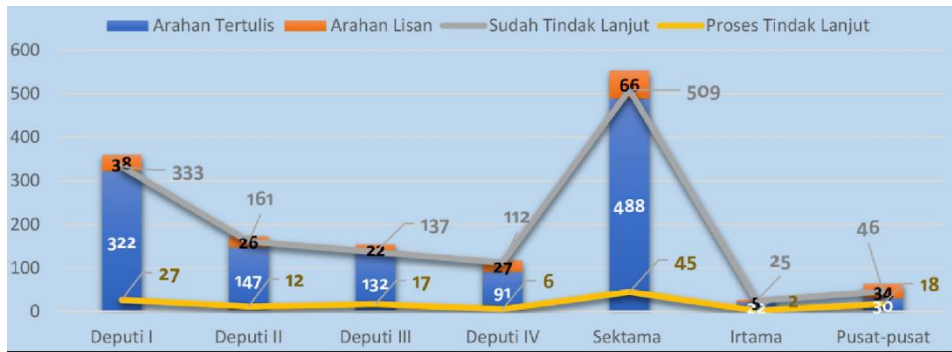
Tim Monev

sehingga terbangun persepsi yang sama untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemantauan perkembangan tindak lanjut arahan Kepala Badan POM dan perkembangan PSP (gambar 4.64).



Gambar 4. 64 Konsolidasi Tim Monev PSP 27 Oktober 2021

Pemantauan Tindak Lanjut Arahan Kepala BPOM tahun 2021 dilakukan terhadap 682 disposisi surat dan 173 arahan lisan Kepala BPOM (Gambar 4.62). Hasil pemantauan telah disampaikan secara rutin melalui nota dinas Sekretaris Utama kepada PPT Madya dan PPT Pratama terkait melalui 45 laporan pemantauan mingguan dan 12 laporan pemantauan bulanan (tembusan kepada Kepala BPOM). Sebanyak 92% dari 855 disposisi/arahan tersebut telah ditindaklanjuti sedangkan sisanya dalam proses.



Gambar 4. 65 Profil Sebaran Disposisi 'Pantau' per Satker dan Status Tindak Lanjut Tahun 2021



Gambar 4. 66 Laporan Monev PSP Tahun 2021
 Pada tahun 2021, monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap 62 program strategis pimpinan (PSP) dari 26 unit kerja. Laporan hasil monev PSP disampaikan per triwulan dari Sekretaris Utama kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Kepala Pusat-Pusat serta tembusan kepada Kepala BPOM (gambar 4.63).

Sasaran Kegiatan 6:

Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Biro Perencanaan dan Keuangan yang optimal

IKU 11: Indeks RB Biro Perencanaan dan Keuangan

Kegiatan-kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan IKU 11 adalah:

a. Nilai Reformasi Birokrasi Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2021

Pada Tahun 2021, Indeks Nilai RB Biro Perencanaan dan Keuangan dapat dijabarkan dalam Data Nilai RB BPOM per Area Perubahan, berdasarkan koordinasi Inspektorat II dengan Tim Evaluator RB dari Kementerian PANRB diperoleh secara informal data nilai RB BPOM Tahun 2021 per area perubahan sebagai berikut:

Penilaian		Bobot	Indeks RB 2021
A. PENGUNGKIT			
I. PEMENUHAN (20)		20.00	18.37
1	MANAJEMEN PERUBAHAN	2.00	1.88
2	DEREGULASI KEBIJAKAN	2.00	1.97
3	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	3.00	2.93
4	PENATAAN TATALAKSANA	2.50	1.86
5	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	3.00	2.89
6	PENGUATAN AKUNTABILITAS	2.50	2.19
7	PENGUATAN PENGAWASAN	2.50	2.36
8	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	2.50	2.28
II. HASIL ANTARA AREA PERUBAHAN (10)		10.00	7.91
III. REFORM (30)		30.00	23.70
1	MANAJEMEN PERUBAHAN	3.00	2.78
2	DEREGULASI KEBIJAKAN	3.00	2.15
3	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	4.50	4.41
4	PENATAAN TATALAKSANA	3.75	3.02
5	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	4.50	2.76
6	PENGUATAN AKUNTABILITAS	3.75	1.88
7	PENGUATAN PENGAWASAN	3.75	3.31
8	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	3.75	3.39
TOTAL PENGUNGKIT		60.00	49.98
B. HASIL (40)			
1 AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN (10)		10.00	8.53
i. Opini BPK (3)		3.00	3.00
ii. Nilai SAKIP (7)		7.00	5.53
2 KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10)		10.00	8.98
- Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)		10.00	8.98
3 PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (10)		10.00	8.93
- Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)		10.00	8.93
4 KINERJA ORGANISASI (10)		10.00	8.26
i. Capaian Kinerja		5.00	3.60
ii. Kinerja Lainnya		2.00	2.00
iii. Survei Internal Organisasi		3.00	2.67
TOTAL HASIL		40.00	34.70
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI		100.00	84.68

Gambar 4. 67 Data Nilai RB BPOM per Area Perubahan Tahun 2021

Sasaran Kegiatan 7:

Terwujudnya SDM Biro Perencanaan dan Keuangan yang Berkinerja Optimal

IKU 12: Indeks Profesionalitas ASN Biro Perencanaan dan Keuangan

Kegiatan-kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan IKU 12 adalah:

a. Pemeliharaan bagian Perencanaan

Pemeliharaan seluruh peralatan mesin/perangkat yang dapat menunjang kelancaran aktivitas pekerjaan seluruh pegawai di Bagian Perencanaan sehari-hari yang meliputi pemeliharaan PC/laptop, mesin fotokopi, *Printer*, *LCD proyektor*, dan mesin ketik tenaga listrik.

b. Koordinasi Biro Perencanaan dan Keuangan Lintas Sektor

Dalam rangka meningkatkan kepuasan layanan internal Biro Perencanaan dan Keuangan, maka pada tahun 2021 dilakukan rapat-rapat dengan unit-unit terkait di Biro Perencanaan dan Keuangan seperti dengan Biro SDM dalam rangka layanan kepegawaian, dengan biro umum dalam rangka pengadaan, dengan inspektorat Utama. Disamping itu dilaksanakan juga kegiatan perjalanan dinas kunjungan, bimbingan teknis dan pendampingan pimpinan dalam mengikuti kegiatan internal maupun eksternal BPOM diantaranya Perjalanan Dinas ke BBPOM Semarang, BBPOM Bandung, BBPOM Yogyakarta, BBPOM Denpasar, BBPOM Banjarmasin, BBPOM Medan, BBPOM Pekanbaru dan Loka POM Tarakan

Pada kegiatan ini karena masih dalam suasana pandemic covid, maka dalam rangka menunjang kinerja maka terdapat langgana akun zoom meeting dan pemberian pulsa untuk rapat-rapat secara online.

Bab 5: PENUTUP

Sepanjang tahun 2021, Biro Perencanaan dan Keuangan telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada visi Badan POM yaitu Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa.

Pada laporan tahunan 2021 ini, penyajian hasil-hasil kegiatan dikelompokkan berdasarkan kontribusinya terhadap pencapaian 10 Sasaran kegiatan dan 19 Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Perencanaan dan Keuangan yaitu : 1) Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas; 2) Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM; 3) Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) BPOM; 4) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPOM; 5) Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan BPOM yang disusun sesuai SAP; 6) indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan; 7) Persentase kesesuaian dokumen perencanaan kinerja satker terhadap pedoman; 8) Persentase dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar; 9) Persentase satker yang memperoleh nilai kinerja anggaran minimal 95 berdasarkan mekanisme *reward and punishment*; 10) Persentase dokumen penganggaran yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar; 11) Persentase laporan capaian kinerja dan anggaran sesuai pedoman; 12) Persentase dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu; 13) Persentase satker yang memperoleh nilai kinerja pelaksanaan anggaran minimal baik; 14) Persentase dokumen laporan keuangan satker yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar; 15) Persentase laporan PNPB unit kerja yang disampaikan tepat waktu; 16) Indeks RB Biro Perencanaan dan Keuangan; 17) Indeks Profesionalitas ASN Biro Perencanaan dan Keuangan; 18) Indeks pengelolaan data dan informasi di Biro Perencanaan dan Keuangan; dan 19) Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan. Dari kesembilan-belas indikator, terdapat 1 indikator dengan kategori sangat kurang, 2 indikator dengan kategori cukup, 14 indikator dengan kategori baik dan 2 indikator dengan kategori sangat baik.







Sebagian besar kegiatan-kegiatan di Biro Perencanaan dan Keuangan telah dilaksanakan dengan baik oleh seluruh staf dengan upaya seoptimal mungkin walaupun dengan berbagai keterbatasan yang ada, seperti kurangnya tenaga SDM baik secara kuantitas maupun kompetensi dan terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia. Diharapkan kedepan, Biro Perencanaan dan Keuangan dapat terus meningkatkan kinerjanya dengan dukungan seluruh staf dan menjalin kerjasama yang semakin baik dengan pihak-pihak internal di lingkungan Badan POM sendiri maupun eksternal yaitu para *stakeholders*.



LAPORAN TAHUNAN BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN 2021



-  Rorenkeu Bpom
-  @rorenkeu_bpom
-  RORENKEU BPOM ID
-  https://linktr.ee/rorenkeu_bpom

